



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAN TNI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
(Studi Kasus Peran Korem 032/Wirabraja Dalam Penanggulangan
Bencana Alam di Sumatera Barat)**

T E S I S

**A D R I L
NPM. 0806448131**

**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA
KAJIAN STRATEJIK KETAHANAN NASIONAL
JAKARTA
2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAN TNI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
(Studi Kasus Peran Korem 032/Wirabraja Dalam Penanggulangan
Bencana Alam di Sumatera Barat)**

T E S I S

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Megister Sains (M.Si) Pada Program Studi Kajian Ketahanan Nasional
Pascasarjana Universitas Indonesia**

**A D R I L
NPM. 0806448131**

**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA
KAJIAN STRATEJIK KETAHANAN NASIONAL
JAKARTA
2011**



**PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL**

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Adril
NPM : 0806448131
Kekhususan : Kajian Strategik Ketahanan Nasional
Judul Tesis : **PERAN TNI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (Studi Kasus Peran Korem 032/Wirabraja Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Sumatera Barat)**

Telah disetujui untuk diuji

PEMBIMBING I

Prof. Dr. Burhan D. Magenda, MA

PEMBIMBING II

Laksda TNI (Purn) Wahyono, SK, PhD

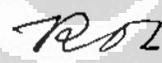
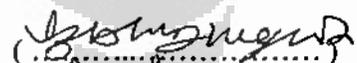
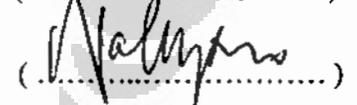
HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Adril
 NPM : 0806448131
 Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
 Judul Tesis : **PERAN TNI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (Studi Kasus Peran Korem 032/Wirabraja Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Sumatera Barat)**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Megister Sains (M.Si) pada Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Pascasarjana Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Tb. Ronny R. Nitibaskara	 (.....)
Anggota	: 1. Prof. Dr. Burhan Djabir Magenda	 (.....)
	: 2. Laksda TNI (Purn) Wahyono, SK, PhD	 (.....)
	: 3. Dr. Amirsyah Sahil, S.E., M.Si	 (.....)
Sekretaris	: Dr. Amirsyah Sahil, S.E., M.Si	 (.....)

Ditetapkan di : Jakarta
 Hari / Tanggal : Kamis/ 10 Maret 2011
 Pukul : 11.00 – 13.00 WIB

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya, saya dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Megister Sains (M.Si) pada Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Pascasarjana Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan Tesis ini, oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) Prof. Dr. Tb. Ronny Rahman Nitibaskara selaku Ketua Program PKN UI,
- (2) Prof Dr.Burhan D. Magenda,MA selaku Pembimbing I yang dengan teliti memeriksa, mengarahkan dan memberi masukan dalam penyusunan tesis ini.
- (3) Laksda TNI (Purn) Wahyono, SK,PhD selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan petunjuk dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
- (3) Dr. Amirsyah Sahil, SE, M.Si selaku Sekretaris Program PKN UI sekaligus sebagai Dewan Penguji dalam pelaksanaan Sidang Tesis ini.
- (4) Seluruh Dosen PKN UI yang sejak awal perkuliahan telah memberikan gambaran kepada penulis tentang rencana penyusunan tesis sebagai tugas akhir yang harus dilaksanakan dalam mengikuti perkuliahan di Universitas Indonesia.
- (5) Seluruh Karyawan PKN UI yang telah sabar melayani agar penulis sukses dalam studi.
- (6) Rekan-rakan PKN UI Angkatan ke-27 yang telah memberi semangat dan masukan dalam memperkaya dimensi tesis ini.
- (7) Orang Tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan baik moril maupun materiil dalam proses penulisan hingga sampai penyelesaian Tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, Maret 2011

Penulis


 Adril

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adril
NPM : 0806448131
Program Studi : Kajian Strategik Ketahanan Nasional
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PERAN TNI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
(Studi Kasus Peran Korem 032/Wirabraja Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Sumatera Barat)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta
Pada tanggal : Maret 2011
Yang menyatakan,



(Adril)

ABSTRAK

Nama : Adril
 NPM : 0806448131
 Program Studi : Kajian Strategik Ketahanan Nasional
 Judul Tesis : **PERAN TNI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM**
 (Studi Kasus Peran Korem 032/Wirabraja Dalam Penanggulangan
 Bencana Alam di Sumatera Barat)

Bencana alam yang menimpa berbagai wilayah di tanah air akhir-akhir ini secara kuantitas maupun kualitas, intensitasnya semakin meningkat. Korban jiwa, harta benda dan kerusakan infrastruktur merupakan sesuatu masalah yang tidak terelakan apabila terjadi ancaman bencana alam seperti gempa bumi, tsunami dan letusan gunung merapi. Sejak tahun 2007 dalam rangka mengantisipasi ancaman bencana pemerintah telah menetapkan kebijakan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat Pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditingkat Propinsi maupun Kabupaten /Kota.

Upaya penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab BNPB/BPBD, akan tetapi membutuhkan keterlibatan segenap institusi pemerintah, swasta dan seluruh komponen masyarakat, termasuk keterlibatan unsur TNI; baik TNI AD, TNI AL maupun TNI AU dengan jaringan Komandonya yang tersebar diseluruh wilayah NKRI. Salah satu wilayah NKRI yang sangat rentan terhadap ancaman bencana alam adalah wilayah propinsi Sumatera Barat yang secara geografis merupakan wilayah dengan sejarah kebencanaan cukup panjang. Keterlibatan unsur TNI AD dengan Komando Kewilayahannya (Korem 032/Wirabraja) dalam penanggulangan bencana alam didaerah ini menjadi begitu urgen, walaupun sudah ada BPBD, karena pada saat terjadi bencana, disamping merupakan bagian dari korban bencana, jajaran Korem 032/Wirabraja juga merupakan garda terdepan yang dituntut selalu siap membantu korban bencana.

Sebagai Sub Kompartemen Strategis, Korem 032/Wirabraja mengemban tugas menyiapkan potensi wilayah menjadi kekuatan wilayah yang terdiri dari ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh guna menghadapi setiap ancaman baik militer maupun nonmiliter. Dalam kondisi damai pemberdayaan wilayah pertahanan dalam konteks pembinaan teritorial yang dilaksanakan Korem 032/ Wirabaraja dan jajarannya akan sangat bermanfaat untuk mengantisipasi ancaman bencana alam yang sering terjadi diwilayah Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran TNI, khususnya Korem 032/Wirabraja dalam membantu penanggulangan bencana alam dilihat dari perspektif Ketahanan Nasional.

Kata kunci : Bencana Alam, Ancaman, Tanggap Darurat, OMSP, Korem, Pemberdayaan Wilayah Pertahanan, Binter, BNPB&BPBD, Ketahanan Wilayah.

ABSTRACT

Nama : Adril
 NPM : 0806448131
 Program Studi : Kajian Strategik Ketahanan Nasional
 Judul Tesis : **ROLE OF INDONESIAN ARMED FORCES (TNI) IN DISASTER MANAGEMENT ASSISTANCE (STUDY CASE AT KOREM 032/WIRABRAJA TO OVERCOME THE NATURAL DISASTER IN WEST SUMATERA)**

Natural disaster that occurred in many areas in our country nowadays the intensity has dramatically increased, both quantity and quality. Loss of life, property and infrastructure damage are avoidable if the natural disasters such as earthquakes, tsunami and volcanic Merapi happens. Since year of 2007, in order to anticipate the threat of disaster, the government has established a policy with the publication of law No. 24 of 2007 on Disaster Management (BNPB) at the central level and the Agency for Disaster reduction (BPBD) Provincial and Regency/ Municipality.

The effort of disaster relief are not only the responsibility of BNPB/BPBD, but also are require the involvement of all government institutions, private sector and all components of society, including the involvement of TNI: either Army, Navy and Air Force commando with a network that spread throughtout the Republic of Indonesia. One of NKRI which has a highly vulnerable to natural hazards is the province of West Sumatera that geographically is a region with a long history of disaster. The involvement of TNI AD with command region (Korem 032/Wirabraja) in natural disaster management became very urgent in this area, although there has been BPBD, because when disasters happen, beside as disaster victims, Korem 032/Wirabraja is also as a front guard command and must ready to assist the disaster victims.

As a Strategic Sub Compartement, Korem 032/ Wirabraja has a vital role to set up potential areas into regions that consists of space, equipment and fighting a tough condition to cope with any militier or non military threats. Under peace conditions of empowerment territory defence in the context of territorial development is implemented Korem 032/Wirabraja and its range will be very useful to anticipate natural disaster threats that often occur in the region of West Sumatera. This study aim is to describe how the role of TNI, especially Korem 032/Wirabraja in natural disasters management assistance from the perspective of National Resilience.

Keywords: Natural Disasters, Threat, Emergency Response, MOOTW, Korem, Empowerment Area Defense, Binter, BNPB&BPBD, Regional Resilience.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Pembatasan Masalah.....	6
1.4. Rumusan Masalah	6
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.6. Metode Penelitian.....	8
1.7. Sistematika Penulisan	11
BAB II. KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	13
2.1. Teori Peran.....	13
2.2. Teori Analisis Kebijakan.....	14
2.3. Teori Negara (Peran Lembaga- Lembaga Negara).....	16
2.4. Konsepsi Tentang Peran Militer (TNI).....	18
2.5. Konsep Pemberdayaan Wilayah Pertahanan.....	27
2.6. Bencana Alam Sebagai Salah Satu Bentuk Ancaman.....	34
2.7. Konsep Ketahanan Nasional	42
BAB III. TINJAUAN OBYEK PENELITIAN.....	45
3.1. Organisasi dan Tugas Korem Secara Umum.....	45
3.2. Profil dan Sejarah Korem 032/Wirabaja.....	49

3.3.	Organisasi Korem 032/Wbr Sesuai Protap Penanggulangan Bencana Alam.....	54
3.4	Gambaran Umum Wilayah Propinsi Sumatera Barat	56
3.5.	Sejarah Gempa Bumi di Wilayah Sumatera Barat.....	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		67
4.1.	Kebijakan Nasional Dalam Penanggulangan Bencana.....	67
4.2.	Tantangan Bagi Mekanisme Penanggulangan Bencana.....	76
4.3.	Keterlibatan TNI Dalam Penanggulangan Bencana Alam.....	78
4.4.	Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Menghadapi Ancaman Bencana Alam.....	110
4.5.	Pendapat Narasumber tentang Penanggulangan Bencana Alam.....	114
4.6.	Rangkuman Pendapat Narasumber.....	120
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		122
5.1.	Kesimpulan	122
5.2.	Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA.....		125
LAMPIRAN		
SURAT KETERANGAN		

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua (yakni benua Asia dan Australia) dan dua samudera yakni (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik) dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun di sisi lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Potensi penyebab bencana diwilayah NKRI dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Terjadinya bencana biasanya disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menimbulkan korban jiwa manusia, harta benda dan lingkungan.¹

Terjadinya bencana alam di sebagian wilayah Indonesia akhir-akhir ini, seperti gempa bumi, gelombang tsunami, gelombang pasang, tanah longsor, banjir, angin topan, dan gunung meletus, telah menimbulkan korban jiwa (meninggal maupun luka berat/ringan), merusak sarana permukiman, peribadatan, perkantoran, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya, serta gelombang pengungsi yang serba memprihatinkan kondisinya. Bencana alam, khususnya gempa bumi, yang sulit diprediksikan kapan dan dimana kejadiannya, tentu menjadi ancaman bagi kehidupan sosial masyarakat Indonesia sehingga perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Penanggulangan bencana alam, baik dalam kondisi tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi membutuhkan upaya yang serba cepat, tepat, dan

¹Undang- undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 *Tentang Penanggulangan Bencana Alam.*

terorganisir, mulai dari pencarian korban meninggal, evakuasi korban luka, penanganan pengungsi, dan pengamanan wilayah yang terkena bencana alam.

Bencana alam dasyat yang terjadi di Indonesia di tahun 2009 dan 2010 yang lalu adalah gempa bumi Sumbar 30 September 2009 dan gempa bumi yang diikuti gelombang tsunami Mentawai 25 Oktober 2010. Wilayah Indonesia yang luas dan berpulau-pulau sangat rentan terhadap ancaman gempa bumi, karena kebetulan posisi geografis Indonesia dilalui oleh pertemuan lempeng tektonik dunia. Wilayah rawan gempa di Indonesia adalah daerah yang terdapat pertemuan antar 3 lempeng tektonik dunia, yaitu Indo Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Indonesia terletak diantara cincin api atau *"the ring of fire"*, sehingga akan selalu diterpa gempa bumi, yang tentunya akan menimbulkan gelombang tsunami apabila skala gempa mencapai di atas 7 SR, sebagaimana pernah terjadi di Nanggro Aceh Darrusalam, Desember 2004 yang lalu. Bahkan, berdasarkan catatan BMKG, wilayah Indonesia hampir setiap hari dilanda gempa bumi, dengan skala dan magnitude yang berbeda di masing-masing wilayah. Gempa bumi dasyat terakhir yang terjadi di wilayah Indonesia adalah gempa bumi di Sumatera Barat 30 September 2009 yang lalu. Gempa berskala 7, 9 SR pada pukul 17. 16. 09 WIB tepatnya berada di lokasi 0.84 Lintang Selatan dan 99.65 Bujur Timur dan Pusat gempa berada di arah 57 kilometer barat daya Pariaman, Sumatera Barat,² serta gempa bumi yang diikuti gelombang tsunami di kepulauan Mentawai pada tanggal 25 Oktober 2010 yang lalu.

Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya, karena belum ada undang-undang yang secara khusus menangani bencana. Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana, oleh pemerintah atas persetujuan DPR disusunlah Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana (UU No. 24/ 2007) yang pada prinsipnya mengatur

² Lihat Situs Internet, www.depsos.go.id

tahapan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.³ Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, ditetapkanlah suatu Peraturan Presiden tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dipusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dalam rangka penanggulangan bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Sumatera Barat, diperlukan membangun suatu sinergi, koordinasi, komunikasi, dan langkah terencana antara berbagai pihak terkait, baik BNPB, BPBD Propinsi dan Kabupaten / Kota, TNI, Polri, Ormas, LSM, dan berbagai stake holder lainnya. Upaya penanggulangan bencana gempa bumi ini tidak hanya dibebankan kepada satu pihak saja, melainkan merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia, termasuk keterlibatan unsur TNI.⁴ Penanganan bencana alam yang terjadi di Indonesia, sesuai dengan amanat UU RI No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai wadah koordinasi yang bersifat non struktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sedangkan penanggulangan bencana di tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota, diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang diketuai oleh Gubernur/Bupati/ Walikota.⁵

Sejalan dengan Visi TNI kedepan yaitu TNI yang solid, profesional, tangguh-modern, berwawasan kebangsaan, serta mencintai dan dicintai rakyat, menuntut TNI senantiasa harus mampu menjamin tetap tegaknya kedaulatan Negara, mempertahankan tetap utuhnya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta menjamin keselamatan bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia dari segala bentuk ancaman dan gangguan. Sehubungan dengan itu Mabes TNI memprioritaskan tiga program yaitu: *“penanggulangan terorisme, penanggulangan bencana alam*

³ Lihat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

⁴ Lihat Situs Internet. <http://dutamasyarakat.com/artikel-23950>

⁵ George Toisutta, *Peran TNI Angkatan Darat Dalam Penanggulangan Bencana*, Media Informasi dan Komunikasi TNI AD, Yudhagama, No.85 Tahun XXIX Edisi Desember 2009

dan pembangunan pos perbatasan ⁶. TNI sebagai alat pertahanan negara sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI memegang amanat untuk melakukan tugas pokok dalam operasi militer selain perang (OMSP), diantaranya membantu *penanggulangan bencana alam*, baik pada tahap tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Tugas membantu penanggulangan bencana alam dalam konteks OMSP di Sumbar ini, peran satuan TNI khususnya pada saat tanggap darurat tentunya pada kesempatan pertama sangat tergantung kepada *Satuan Kewilayahan* yang berada disana seperti *Korem 032/Wbr dan jajarannya*, Satuan TNI AL (Lanal) dan Satuan TNI AU (Lanud), disamping itu juga satuan- satuan yang dikirim oleh Mabes Angkatan masing- masing dibawah kendali Mabes TNI, serta partisipasi Militer Asing.

Meskipun pemerintah telah membentuk BNPB, BPBD Propinsi dan Kabupaten / Kota berdasarkan UU 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, namun karena adanya berbagai kendala, badan ini masih mengalami keterbatasan dalam menanggulangi dampak gempa bumi, khususnya pada tahap tanggap darurat yang memerlukan tindakan secara cepat, terorganisir, dan didukung oleh personil yang terlatih, karena tuntutan situasi & kondisi, suasana yang serba terdadak, serba terbatas, serba mencekam, dan serba kritis. Perlu diakui bahwa dalam situasi bencana yang mengakibatkan kerusakan berbagai infrastruktur vital serta jatuhnya korban dalam jumlah besar, TNI merupakan institusi paling solid yang dapat melakukan pertolongan pertama (immediate response) khususnya dalam penyelamatan korban.⁷ Oleh karena itu, peran serta dan keterlibatan TNI, khususnya diwilayah Korem 032 / Wirabraja sangat penting sekali dalam membantu penanggulangan gempa bumi di Sumatera Barat 30 September 2009 dan gempa bumi yang diikuti oleh gelombang tsunami yang terjadi di Mentawai tanggal 25 Oktober 2010 yang lalu, karena TNI memiliki kapasitas dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dalam kondisi darurat

⁶Ramadhan Pohan & TIM, *Sisi Lain Hankam Kita*, Jakarta, GARASI, , 2010

⁷ Edy Prasetyono dkk, *Sistem Keamanan Nasional dalam Penanggulangan Kasus Bencana Alam*, Jakarta, Pacivis UI, 2008; Hal 210&212.

dengan jaringan komandonya (Kowil) sampai ketingkat daerah, bahkan sampai tingkat Desa/ Nagari.

Penelitian ini akan menguraikan tentang bagaimana peran TNI khususnya Korem 032/Wirabraja dalam membantu penanggulangan bencana alam gempa bumi yang terjadi di wilayah Sumatera Barat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir ini yaitu gempa bumi yang terjadi pada tanggal 30 September 2009 dan Gempa bumi yang diikuti gelombang tsunami Mentawai 25 Oktober 2010, khususnya pada masa tanggap darurat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui BNPB; dan bagaimana pula mekanisme pelibatan TNI pada tahap pra bencana, tahap rehabilitasi maupun rekonstruksi.

1.2 Identifikasi Masalah.

Permasalahan bencana alam merupakan permasalahan yang selalu dihadapi oleh bangsa Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini. Bahkan eskalasinya cenderung meningkat dari tahun ketahun, yang sudah barang tentu menuntut perhatian serius Negara dalam upaya penanggulangannya dengan melibatkan segenap potensi yang ada, termasuk keterlibatan unsur TNI khususnya struktur Komando Kewilayahan yang tersebar diseluruh wilayah nusantara ini, karena Komando Kewilayahan inilah yang jadi andalan untuk merespon ancaman bencana yang terjadi terutama pada kesempatan pertama pada tahap tanggap darurat. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1.1.1. Bagaimana kebijakan nasional dalam penanggulangan bencana alam yang sudah berjalan selama ini ?
- 1.1.2. Apakah kebijakan tersebut sudah berjalan secara efektif dan terimplementasi dengan baik sampai ketingkat daerah ?
- 1.1.3. Apakah peran TNI dalam membantu penanggulangan bencana alam gempa bumi di Sumbar sudah memenuhi prinsip- prinsip OMSP secara profesional

1.1.4. Dalam kondisi damai dan kondisi geografis NKRI yang rawan bencana, sudah selayaknya kebijakan pemerintah dan pimpinan TNI lebih mengarah kepada upaya peningkatan profesionalisme prajurit dalam upaya membantu penanggulangan bencana alam, yang disinergikan sistem pemberdayaan wilayah pertahanan.

1.1.5. Terpenuhinya prinsip-prinsip cepat dan tepat, prioritas, serta koordinasi dan keterpaduan dalam penanggulangan bencana.

1.1.6. Banyak peraturan perundang-undangan tidak bisa berjalan karena lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah.

1.1.7. Apakah Institusi TNI sudah didukung dengan sarana, sumber daya prajurit dan anggaran siap pakai dalam membantu penanggulangan bencana?

1.1.8. Apakah unsur pelaksana BNPB yang tidak memiliki keanggotaan yang bersifat tetap, melainkan memanfaatkan keberadaan organisasi-organisasi yang berada di pemerintah atau masyarakat seperti TNI, lembaga medis, LSM dan organisasi sosial lainnya sudah efektif berjalan dibawah satu komando?

1.3 Pembatasan Masalah.

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan tentang peran TNI khususnya Korem 032/ Wirabaja dalam membantu penanggulangan bencana alam di wilayah Sumatera Barat, yang didasari pada kebijakan nasional penanggulangan bencana, serta dilihat dari perspektif Ketahanan Nasional.

1.4 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah diatas, maka penulisan tesis mengenai peran TNI dalam penanggulangan bencana alam ini akan membahas permasalahan yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Bagaimana kebijakan nasional penanggulangan bencana di Indonesia saat ini?

1.4.2 Bagaimana peran TNI khususnya Korem 032/Wbr dalam membantu penanggulangan bencana alam di wilayah Sumatera Barat?

1.4.3 Apakah pemberdayaan wilayah pertahanan dalam kondisi damai sebaiknya diarahkan dan disinergikan pada upaya mengantisipasi ancaman bencana?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang bagaimana kebijakan nasional penanggulangan bencana di Indonesia saat ini.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis peran TNI khususnya Satuan Kewilayahan (Korem 032/Wirabraja) dalam membantu penanggulangan bencana alam di wilayah Sumatera Barat.
- c. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya mensinergikan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dengan kegiatan antisipasi ancaman bencana alam tanpa mengabaikan kesiapan wilayah dalam konteks pertahanan Negara.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Dari Aspek Akademik; Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti sendiri khususnya dan kalangan akademis serta non akademis pada umumnya, dalam memahami tentang ancaman bencana, serta pemahaman tentang bagaimana peran yang harus dimainkan oleh TNI melalui Satuan Kewilayahan (Korem) sesuai tugas pokok yang diemban TNI untuk membantu penanggulangan bencana alam dalam konteks OMSP sesuai amanat Undang- Undang.
- b. Dari Aspek Praktis; diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan kontribusi sebagai berikut:

1) Memberikan masukan kepada penentu kebijakan penanggulangan bencana dilingkungan pemerintah pada umumnya, dan dilingkungan TNI pada khususnya, bahwa pelibatan TNI dalam membantu penanggulangan bencana alam perlu diberdayakan secara terus-menerus dalam konteks OMSP.

1) Membantu pemerintah daerah dalam rangka bantuan penanggulangan bencana sesuai amanat UU No.34/2004 tentang TNI, karena mayoritas daerah-daerah diseluruh wilayah NKRI sangat rentan terhadap ancaman bencana alam.

1.6 . Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif, yaitu penggambaran secara menyeluruh, luas dan mendalam, serta menggunakan metode induktif yaitu berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesa atau teori. Dalam penelitian kualitatif, peneliti lebih mengutamakan proses dari pada hasil dengan cara memfokuskan diri pada proses pengumpulan data dan analisis data dalam membangun suatu konsep, hipotesis dan teori secara detail. Dalam ilmu sosial, pendekatan kualitatif memiliki akses dan perangkat metodologis yang memadai dan relevan untuk membongkar hal-hal yang tersembunyi dibalik fakta. Menurut Strauss dan Corbin (1997:13), metode- metode kualitatif dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena (symptom, gejala) yang sering kali merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami. Metode kualitatif dapat juga digunakan untuk mencapai dan memperoleh suatu cerita, pandangan yang segar, dan cerita mengenai segala sesuatu yang sebagian besar sudah dan dapat diketahui. Metode kualitatif pun diyakini dapat memberikan penjelasan secara

lebih terinci dan memadai mengenai fenomena yang sulit diungkapkan dengan metode konvensional-kuantitatif.⁸

1.6.2 Instrument Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti sendiri yang mengumpulkan datanya mulai dari agustus s.d Desember 2010. Peneliti sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, analisa data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya terhadap bidang yang diteliti.

1.6.3 Unit Analisis/ Sumber Data Penelitian.

Unit Analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subyek penelitian (subyek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti/ pusat penelitian atau sasaran peneliti), Menurut Lexi J.Moleong unit analisis dipakai untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya.⁹ Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Satuan Korem 032/ Wirabraja dan jajarannya, pejabat atau orang yang berkompoten dalam upaya pelibatan TNI untuk membantu penanggulangan bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera Barat, khususnya gempa bumi yang terjadi pada tanggal 30 september 2009 di Barat Daya Pariaman, dan gempa bumi serta gelombang tsunami Mentawai 25 Oktober 2010 yang lalu, serta berbagai narasumber yang kompeten, dan selanjutnya dari sumber dokumen, laporan, data- data gempa yang terjadi, UU No 34/2004 tentang TNI, UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah RI No.21/2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Perpres no. 8/2008 Tentang BNPB, serta dokumen- dokumen pendukung lainnya.

⁸ Syamsul Maarif, *Militer Dalam Masyarakat, Menuju TNI Profesional di Era Reformasi*, Disertasi, Jakarta, 2007.

⁹Ibid.

1.6.4 Waktu dan Tempat Penelitian.

b. Waktu Penelitian. Waktu penelitian ini berlangsung selama 4 bulan, yaitu terhitung mulai bulan Agustus – Desember 2010.

b. Tempat Penelitian. Penelitian dilaksanakan di Padang, Pariaman dan Jakarta.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara dan dokumen dalam bentuk:

a. Pengumpulan data primer melalui metode survey dan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan para pejabat TNI/Militer, Sipil dan Tokoh- tokoh masyarakat yang telah berperan dalam membantu penanggulangan bencana gempa bumi di Sumbar.

b. Pengumpulan data sekunder dengan cara studi dokumentasi, mempelajari, mendalami dan mengutip teori- teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur, baik buku, jurnal, koran, internet, dan laporan- laporan atau karya tulis yang relevan dengan tema penelitian guna mendapatkan data sekunder sebagai pelengkap data penelitian lapangan.

1.6.6 Teknik Analisis Data.

a. Menurut Miles dan Huberman teknik analisa data melalui tahapan¹⁰ sebagai berikut:

1) Reduksi data; yaitu setelah data terkumpul dilakukan pemilihan hal- hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal- hal penting yang berkaitan dengan penelitian.

2) Penyajian data; yaitu dapat berupa teks yang bersifat naratif.

¹⁰ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan kuantitatif*, Yogyakarta, 2007; hal 181.

3) Kesimpulan (verifikasi), apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti- bukti yang kuat yang mendukung pada tahapan pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Disamping itu dilakukan juga analisa dokumen dan laporan serta catatan yang menyangkut kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh TNI pada umumnya, dan Korem 032/Wirabaja pada khususnya. Proses ini dilakukan dengan cara pemilahan terhadap data yang sudah terkumpul, dan dianalisa, serta dihadapkan atau dilihat dari perspektif ketahanan nasional.

1.7 Sistematika Penulisan

Tesis ini direncanakan terdiri dari lima (V) Bab yang saling berkaitan satu sama lainnya dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan, yang antara lain menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II. Kajian Kepustakaan, menguraikan tentang Teori Peran, Teori Analisis Kebijakan, Teori tentang Negara (Lembaga- lembaga Negara), Konsepsi Tentang Peran Militer (TNI), Konsep Pemberdayaan Wilayah Pertahanan, dan Bencana Alam Sebagai Salah Satu Bentuk Ancaman, , serta Konsep Ketahanan Nasional.

BAB III Tinjauan Objek Penelitian, Menguraikan tentang Organisasi dan Tugas Korem secara umum, Organisasi dan Tugas Korem 032/Wirabraja, Profil dan Sejarah Korem 032/ Wirabraja, serta Sejarah dan Gambaran Gempa Sumbar.

BAB IV Analisa dan Hasil Penelitian, Menguraikan tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan Bencana, bagaimana Peran TNI (Korem 032/Wbr) dalam membantu Penanggulangan bencana alam gempa bumi diwilayah Sumbar, dan bagaimana pemberdayaan wilayah pertahanan dalam kondisi damai diarahkan dan disinergikan untuk mengantisipasi ancaman bencana, serta Pendapat Para Narasumber tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan Bencana dan Keterlibatan TNI serta Pemberdayaan Wilhan dalam Penanggulangan Bencana.

BAB V. Kesimpulan dan Saran. Menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan kemudian mengajukan beberapa saran yang bermanfaat bagi pemerintah pada umumnya dan pimpinan TNI pada khususnya tentang pentingnya peran/ pelibatan TNI (Satuan Komando Kewilayahan) dalam membantu penanggulangan bencana alam.

II. KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1. Teori Peran

Peran adalah sesuatu yang diharapkan dan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat; peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan sehingga bila ditinjau dari struktur dan fungsional maka peran dalam arti struktur adalah semua tindakan yang harus dilakukan oleh setiap komponen (fungsional) dari suatu institusi demi terwujudnya tujuan (sasaran) yang telah ditetapkan. Sedangkan peran dalam arti fungsional adalah sebagai konsekuensi dari dianutnya paradigma sistem yang dikenal dengan *system approach* oleh semua pemikir dunia sejak tahun 1950-an. Jadi dalam pengertian fungsional adalah output dari interaksi sejumlah komponen terhadap suatu sistem/instansi/organisasi.¹¹

Posisi merupakan suatu susunan harapan yang mencakup konsep perilaku yang diharapkan ada pada si pemegang peran, sehingga dapat dikatakan bahwa posisi merupakan suatu susunan harapan peran. Barnest mengatakan bahwa fungsi peran itu sendiri adalah sekedar kumpulan tugas / tanggung jawab yang dilimpahkan pada seseorang atau apa yang diharapkan organisasi agar dikerjakan oleh pemegang jabatan tersebut¹². Oleh karena itu suatu organisasi seperti militer (Kowil TNI) sebagai suatu sistem yang menyandarkan diri pada lingkungannya untuk mewujudkan aktifitas, maka setiap unit dalam organisasi pun merupakan sub-sistem terbuka yang menyandarkan diri pada interaksi dengan unit-unit lain demi kelangsungan hidupnya.

Sesuai dengan arti leksikal kata peran mempunyai arti apa yang dilakukan dan diucapkan seseorang dalam posisi tertentu¹³. Menurut Depdikbud (sekarang Depdiknas), menyatakan bahwa peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat; peranan bagian dari tugas

¹¹ Salim, Peter & Salim, Yenny, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*, Jakarta, Modern English Press, 1995; hal 1132. 1995.

¹² MC Barnest, *Company Organization : Theory and Practice*, London, George Allen & Unwin Ltd, 1969, p.118.

¹³ Hari Murti Krida Laksana, *Kamus Linguistik*, Jakarta, PT.Gramedia, 1993. Hal 168.

utama yang harus dilaksanakan¹⁴. Setiap insan dan lembaga mempunyai peran (role) yang merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang atau lembaga melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran.. Sejalan dengan itu bahwa peran disusun dengan cara tertentu untuk mendapatkan kewajiban- kewajiban, hak- hak, hukuman, bahkan sikap dan keyakinan.

Dari pengertian/ pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peran dalam diri seseorang atau organisasi yang memiliki status khusus. Istilah seperangkat berarti bahwa didalamnya banyak terdapat kandungan pemahaman menyangkut perilaku, sikap, kewajiban, tugas dan hak- hak yang harus dilaksanakan oleh organisasi itu sendiri. TNI sebagai suatu organisasi yang sudah ada sejak berdirinya NKRI ini, tentu memiliki tugas dan kewajiban yang harus diemban dalam mengawal NKRI dari segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu pencapaian tujuan nasional yang di cita- citakan, termasuk ancaman bencana alam seperti gempa bumi yang sering terjadi hampir diseluruh penjuru tanah air.

2.2 Teori Analisis Kebijakan.

Teori analisis kebijakan adalah *lay-theory*. Mengikuti Schermerhorn (1993), teori adalah “*a set of concept and ideas that explains and predict physical and social phenomena*”. Teori terbagi atas dua pemahaman, yaitu *lay theory* and *scientific theory*. *Lay theories* adalah teori yang dikembangkan dari pengalaman, atau disebut Schermerhorn sebagai *developed by them-selves or learned from others over time and as result of their experiences*; sementara *scientific theories* adalah teori yang dikembangkan melalui metode- metode ilmiah, atau *that are developed through scientific methods*. Teori analisis kebijakan, seperti sebagian besar teori- teori manajemen, baik sektor publik maupun bisnis, dikembangkan dari *best practices*, yang kemudian diverifikasi, divalidasi, dan kemudian dikodifikasikan – berbeda dengan teori- teori dalam ilmu alam atau non sosial, yang dikembangkan dari

¹⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002; hal 667.

penelitian ilmiah, kemudian dikembangkan menjadi praktek. Pemahaman lay theory ini banyak diperdebatkan, apakah layak disebut teori. Para penentangannya biasanya berlatar belakang positivis yang sangat dipengaruhi oleh pendekatan pembenaran ilmiah dari ilmu- ilmu alam atau non sosial. Jadi analisis kebijakan adalah teori yang berasal dari pengalaman terbaik, dan bukan diawali dari temuan, kajian akademik, atau penelitian ilmiah. Artinya , teori analisis kebijakan adalah lay theory, bukan *academical theory*. Dengan demikian, pengembangan teori analisis kebijakan dimasa mendatang akan semakin ditentukan oleh keberhasilan- dan kegagalan- kegagalan- yang terjadi dilingkungan administrasi publik. Ranah keberhasilan- kegagalan analisis kebijakan berkenaan dengan produk akhirnya, yaitu kebijakan publik. Disini kita perlu memahami ruang bagi kebijakan publik itu sendiri.¹⁵

Pada dasarnya, meskipun tidak tertulis, dalam memahami kebijakan publik ada dua jenis aliran atau pemahaman, yaitu *Kontinentalis* dan *Anglo-Saxonis*. Pemahaman kontinentalis melihat bahwa kebijakan publik adalah turunan dari hukum, bahkan kadang mempersamakan antara kebijakan publik dan hukum, utamanya hukum publik ataupun hukum tata Negara, sehingga kita melihatnya sebagai proses interaksi diantara institusi- institusi Negara. Pemahaman anglo-saxon memahami bahwa kebijakan publik adalah turunan dari politik- demokrasi sehingga melihatnya sebagai sebuah produk interaksi antara Negara dan publik.¹⁶

Berkenaan dengan karakter kebijakan di Indonesia, kita menemukan bahwa kebijakan di Indonesia, sesuai dengan Undang- Undang No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan Pasal 7 mengatur jenis dan hierarki Peraturan Perundang- undangan sebagai berikut:

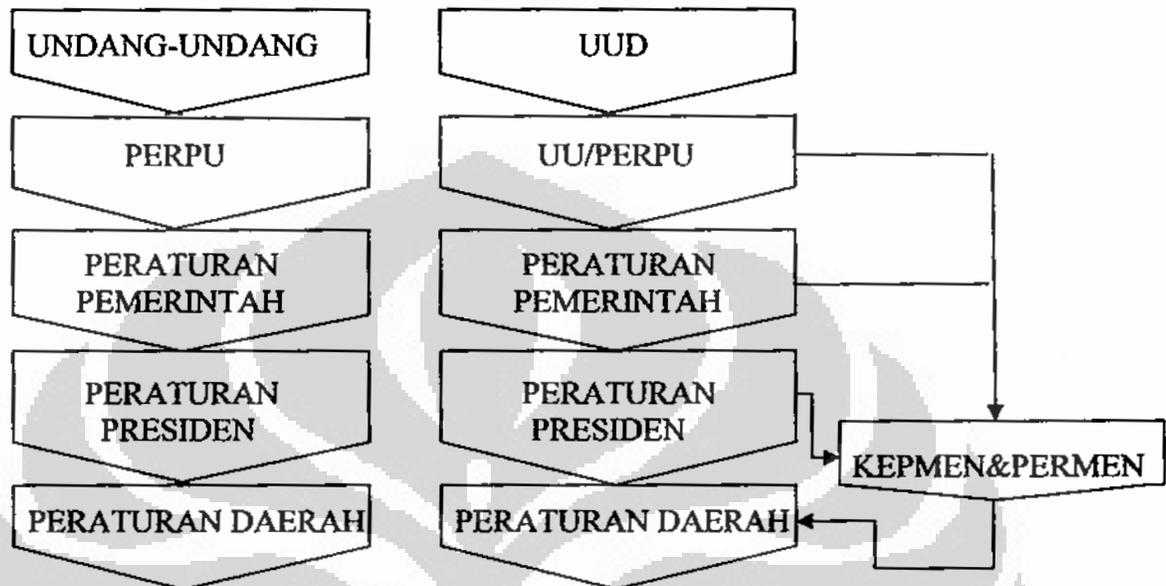
- 2.2.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2.2.2 Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 2.2.3 Peraturan Pemerintah
- 2.2.4 Peraturan Presiden

¹⁵ Riant Nugroho, *Public Policy*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, 2008, hal: 157-158.

¹⁶ *Ibid*, hal: 22

2.2.5 Peraturan Daerah.

Sebagaimana digambarkan sebagai berikut:



Gambar: Hierarki Kebijakan Publik Indonesia menurut UU No. 10/2004.¹⁷

Berpedoman dari teori analisis kebijakan yang menyangkut analisa kebijakan publik di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan penanggulangan bencana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana tentu sangat kental aliran kontinentalnya, karena kebijakan publik dalam penanggulangan bencana ini merupakan produk hukum yang diatur dalam undang-undang.

2.3 Teori Negara (Peran Lembaga- Lembaga Negara).

Menurut ahli ilmu politik Amerika Serikat, *Samuel Huntington*, peralihan dari sistem otoriter ke demokrasi membutuhkan kelembagaan Negara yang kuat. Lembaga Negara yang kuat tidak sama dengan lembaga Negara yang otoriter. Semua lembaga Negara ini harusnya sudah ada secara kuat, sebelum partisipasi rakyat secara penuh diberikan.¹⁸ Selanjutnya menurut *Prof Miriam Budiardjo* Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan

¹⁷ Ibid, hal: 28-29

¹⁸ Arief Budiman, *Kebebasan, Negara, Pembangunan*. Kumpulan Tulisan 1965-2005, Jakarta, Pustaka Alvabet, Agustus 2006, hal 55.

ditaati oleh rakyatnya. Para sarjana yang menekankan negara sebagai inti dari politik (politics), memusatkan perhatiannya pada *lembaga- lembaga kenegaraan* serta bentuk formalnya. Pendekatan ini dinamakan Pendekatan Institusional (Institutional Approach).¹⁹ Dari teori dan pendekatan tersebut diatas terlihat bahwa begitu pentingnya peran lembaga- lembaga negara dalam menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi bangsa atau Negara itu sendiri. Negara atau lembaga- lembaga negara harus kuat dulu baru berbicara partisipasi masyarakat. Untuk kasus Indonesia keberadaan Lembaga- lembaga Negara seperti TNI, BNPB/BPBD termasuk lembaga Negara yang berada didaerah seperti Pemda sangat krusial dalam upaya penanggulangan bencana alam yang sering terjadi beberapa tahun belakangan ini, disamping partisipasi masyarakat, LSM, dan berbagai macam relawan yang terlibat. Untuk Negara Indonesia yang mengalami transisi demokrasi satu dekade terakhir, kalau merujuk kepada teori tersebut diatas, seyogyanya Lembaga-Lembaga Negara yang berkompeten dalam upaya penanggulangan bencana harus kuat terlebih dahulu, baru berbicara partisipasi komponen bangsa yang lain.

Sejalan dengan tujuan bernegara yang dilakoni oleh lembaga- lembaga Negara tersebut, *Roger F Soltau* dalam bukunya *Introduction to politics* mengatakan "ilmu politik mempelajari Negara, tujuan- tujuan Negara....dan *lembaga- lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu*, hubungan antara Negara dengan warganya serta hubungan antar Negara (Political science is the study of the state, its aims purposes...the institutions by which these are going to be realized, its relations with its individual members, and other state).²⁰ Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi; "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dari seluruh tumpah darah Indonesia...,"²¹ disini secara implisit dinyatakan bahwa sudah menjadi tanggung jawab pemerintah Negara Indonesia lewat lembaga-lembaga Negara yang ada untuk melindungi segenap warganya dari segala bentuk ancaman

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar- Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal 17

²⁰ Roger F.Soltau, *An Introduction to Politic* (London; Longmans, 1961), hal 4.

²¹ Lihat Pembukaan UUD 1945, Alinea ke 4.

yang akan menghambat terciptanya kondisi ketahanan nasional yang dinamis, dalam kerangka pencapaian tujuan nasional yang di cita- citakan.

2.4 Konsep tentang Peran Militer (TNI).

Tugas utama dari pasukan militer adalah menjaga keamanan Negara dari ancaman eksternal. Tetapi sejak munculnya tentara dalam jumlah yang besar, para sarjana dan politisi mulai memperdebatkan apakah angkatan bersenjata seharusnya juga digunakan untuk misi perdamaian yang bermanfaat bagi komunitas yang lebih besar atau tidak. Sebenarnya argumen ini telah dikemukakan jauh sebelumnya. Setelah pecah perang dunia kedua banyak pembuat kebijakan menyarankan bahwa *angkatan bersenjata yang terlatih dengan baik dapat digunakan untuk tujuan non-militer*.²² Dilingkungan Angkatan Darat Amerika, misalnya apa yang dikenal dengan operasi militer selain perang meliputi tiga belas bidang kegiatan.²³ Sebagai berikut:

- a. non combatant evacuation operations
- b. arms control
- c. support to domestic civil authorities
- d. **humanitarian assistance and disaster relief**
- e. security assistance
- f. nation assistance
- g. support to counter-drug operation
- h. combating terrorism
- i. peace keeping operation
- j. peace enforcement
- k. show of force
- l. support for insurgencies and counter-insurgencies, and
- m. attacks and raids.

²² Diamond, Larry dan Plattner Marc F, *Hubungan Sipil- Militer dan Konsolidasi Demokrasi*, Penerjemah Tri Wibowi Budi Santoso, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001, hal: 45.

²³ Jamal A. Rahman & Nurbaity, *Memperkuat Tentara Nasional Indonesia*, Implementasi Peran TNI dalam Sejarah Bangsa, Jakarta, Yayasan Karya Pemuda Indonesia, 2006, hal: 90

Sebagian besar masyarakat kita sedikit mendapat informasi mengenai sebuah peran baru militer yang dikenal sebagai pelaksana *Military Operation Other Than War (MOOTW)* atau operasi militer selain perang. Yang termasuk dalam kategori operasi militer selain perang adalah *“humanitarian disaster relief, civic mission, dan tugas perbantuan perbantuan kepada fungsi kepolisian atas keputusan politik pemerintah”*. Dalam hal ini, diketahui bahwa fungsi polisi termasuk didalam ranah fungsi pemerintahan. Dalam bukunya *“Guide to Military Operations Other Than War”*, dua Perwira angkatan darat Amerika Serikat, Keith Bonn dan Anthony A Baker menguraikan jenis- jenis operasi MOOTW yang dijalankan pasukan AS. Pemberian bantuan kemanusiaan didaerah krisis telah menjadi bagian dari doktrin MOOTW Amerika Serikat, dimana didalamnya termasuk *foreign disaster relief, refuge/displaced civilian support, security for those providing aid, technical assistance and support*.²⁴

Prajurit Amerika juga memainkan peran khusus pada masa genting; mereka sering dipanggil untuk memadamkan kerusuhan di wilayah urban atau memberi pertolongan di wilayah yang terlanda *banjir, gempa bumi, angin ribut atau badai*. Laporan keamanan nasional dari Presiden Clinton pada bulan Juli 1994 mengakui kembali perang sebagai *“misi utama bagi angkatan bersenjata AS”*, tetapi secara khusus menyebutkan peran sekunder seperti memerangi terorisme, melindungi keamanan warga Amerika diluar negeri, menyediakan pelatihan militer dan nasihat kepada pemerintah Negara sahabat, *membantu dalam menolong korban bencana alam, membantu program luar angkasa, dan berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian multinasional*.²⁵ Disamping itu menurut *Larry Diamond & Marc F. Plattner* dalam bukunya *“Civil Military Relations and Democracy”*, Negara- Negara yang baru- baru ini mengalami proses demokratisasi dapat menarik empat pelajaran dari pengalaman Amerika Serikat.²⁶

²⁴ Ibid, hal:94

²⁵ Diamond, Larry dan Plattner Marc F, *Hubungan Sipil- Militer dan Konsolidasi Demokrasi*, Penerjemah Tri Wibowi Budi Santoso, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001,hal: 52.

²⁶ Ibid hal: 53.

- a. Perang selalu merupakan misi utama dari angkatan bersenjata AS – menghalangi agresi dan, bila perlu, bertempur dan memenangkan konflik yang mengancam kepentingan nasional yang vital.
- b. *Menolong korban bencana adalah misi sekunder* yang dapat berlangsung lama- memberi bantuan makanan, perawatan medis, dan melindungi keamanan korban banjir, badai, gempa bumi, dan kerusuhan sipil.
- c. Misi baru pasca perang dingin adalah penggunaan militer AS dalam operasi penjaga perdamaian- mempromosikan demokrasi atau menyelesaikan konflik dengan memberikan bantuan pesawat pengangkut, pemikiran atau dukungan komunikasi atau kalau perlu, unit tempur.
- d. Beberapa misi lain yang bersifat transisional dapat dilakukan bila perlu, dan harus dilepaskan segera setelah otoritas sipil dirasa dapat memikul tanggung jawabnya kembali.

Dari pengalaman maupun pendapat para ahli dibidang pertahanan yang telah banyak meneliti keterlibatan militer untuk operasi militer selain perang, terutama dinegara adidaya seperti Amerika Serikat yang banyak ditiru oleh negara- negara lain, ternyata keterlibatan militer dalam kondisi damai untuk menghadapi berbagai ancaman yang terjadi masih sangat dibutuhkan, bahkan di sahkan dan dilindungi lewat payung hukum. Kalau kita lihat kondisi geogarafis Indonesia yang sangat rentan terhadap ancaman bencana alam, sudah barang tentu kehadiran TNI dengan Komando Kewilayahannya yang tersebar diseluruh pelosok tanah air akan sangat signifikan menjawab kebutuhan untuk penanggulangannya.

Jika melihat arti leksikal dan konsep dari peran maupun peran militer tersebut diatas, bila dikaitkan dengan lembaga/organisasi kemiliteran (TNI), maka peran TNI tersebut yaitu jika TNI melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, sehingga peran disini menyangkut tugas dan fungsi TNI, artinya tugas dan fungsi ini diletakkan dalam konteks tugas pokok. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara.mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh

tumpah darah Indonesia dari *ancaman* dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.²⁷

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:²⁸

- a. Operasi militer untuk perang(OMP).
- b. **Operasi militer selain perang (OMSP), yaitu untuk :**
 1. mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
 2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
 3. mengatasi aksi terorisme;
 4. mengamankan wilayah perbatasan;
 5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 7. mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;
 8. *memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;*
 9. *membantu tugas pemerintahan di daerah;*
 10. membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
 11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
 12. *membantu menaggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;*
 13. *membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta*

²⁷ Lihat, Undang- Undang Nomor 34/2004 ttg TNI Pasal 7 Ayat 1

²⁸ Ibid, Pasal 7 Ayat 2

14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara.²⁹

Salah satu tuntutan reformasi terhadap TNI yang mengemuka sejak tahun 1998 adalah mewujudkan TNI yang profesional dengan fokus pada peran dan fungsi pertahanan. Uraian tentang peran TNI semenjak era reformasi 1998 mengalami banyak perubahan, sebagaimana dirumuskan oleh Mabes TNI tentang peran TNI abad 21 yang mencakup hal-hal sebagai berikut.³⁰

- a. Mempertahankan kedaulatan dan integritas Negara terhadap ancaman dari luar.
- b. Menjaga keamanan terhadap ancaman dari dalam negeri.
- c. *Memberi sumbangan dharma bhakti dalam pembangunan bangsa.*
- d. Turut serta secara aktif mengembangkan demokrasi dan mengantar masyarakat Indonesia menuju masyarakat madani sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
- e. *Turut serta secara aktif meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti seluas-luasnya.*
- f. Turut serta secara aktif dalam tugas-tugas pemeliharaan perdamaian dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.

Dalam TAP MPR no VII tahun 2002 ttg Peran TNI dan POLRI; dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) tentang Tugas Bantuan TNI; bahwa "TNI bertugas membantu penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan (Civic Mission)". Hal inilah yang menjadikan suatu kewajiban bagi TNI untuk menyelenggarakan suatu operasi kemanusiaan apabila terjadi bencana di Indonesia. Disamping itu, berdasarkan UU No.3 tahun 2002 dijelaskan bahwa dalam pasal 10 ayat (3) "TNI bertugas untuk

²⁹ Opcit, Pasal 7 Ayat 3

³⁰ Markas Besar TNI, TNI abad 21, *Redefenisi, Reposisi, dan Reaktualisasi Peran TNI Dalam Kehidupan Bangsa*. Jakarta, CV.Jasa Buma, 1999. Hal 44.

menyelenggarakan kebijakan pertahanan negara diantaranya ialah menyelenggarakan Operasi Militer Selain Perang”. Sedangkan penanggulangan bencana merupakan operasi kemanusiaan yang merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang, sehingga suksesnya penanggulangan bencana yang dilakukan oleh TNI, merupakan salah satu indikator keberhasilan Operasi Militer Selain Perang yang diemban oleh TNI. Selanjutnya dalam dalam pasal 7 UU No 34 mengamanatkan agar **TNI menggelar Operasi Militer Selain Perang (OMSP)**, yang didalamnya, antara lain terdapat amanat bagi TNI untuk **membantu penanggulangan bencana, membantu pemerintahan di daerah dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan.**

Sampai saat ini masih ada dari segelintir kalangan yang mewacanakan isu tentang pembubaran Koter (Kowil), padahal **institusi TNI AD ini merupakan Salah satu sarana untuk membantu pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan bangsa, seperti kemiskinan, pengangguran, degradasi lingkungan dan bencana alam,** Satuan Kowil TNI AD yang tergelar di seluruh wilayah Indonesia sangat berperan penting dan strategis dalam membantu meningkatkan ketahanan daerah . Melalui gelar OMSP Kowil TNI AD dapat membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Binter dengan metode Bintangwil, Komsos dan Bhakti TNI.

Berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/ 142 / 2002 tanggal 4 Juni 2002, tentang komando kewilayahan sebagai gelar Balahanwil, ditentukan sebagai berikut: **(1) TNI AD : Kodam, Korem, Kodim dan Koramil; (2) TNI AL : Koarmada, Lantamal, Lanal dan Pos TNI AL; (3) TNI AU : Koops AU, Lanud dan Pos TNI AU.** Data kekuatan satuan Komando Kewilayahan TNI AD, AL dan AU saat ini terdiri dari : (1) Satuan Komando Kewilayahan TNI AD, terdiri dari Kodam : 12 Kodam, Korem : 42 Korem, Kodim : 273 Kodim, Koramil : 3.323 Koramil; (2) Satuan Komando Kewilayahan TNI AL, terdiri dari Ko Armada : 2 Ko Armada, Lantamal : 9 Lantamal, Lanal : 24 Lanal, Pos TNI AL : 63 Pos TNI AL; (3) Satuan

Komando Kewilayahan TNI AU, terdiri dari Koops AU : 2 Koops AU, Lanud : 41 Lanud, Pos TNI AU : 80 Pos TNI AU.³¹

Suatu hal yang kontradiktif tergambar dari pendapat segelintir kalangan tentang reformasi TNI, dimana dikatakan bahwa; “ada tiga hal pokok dari reformasi bidang militer yang digulirkan masyarakat sipil, yaitu: *(1) penghapusan peran politik TNI, (2) penghapusan bisnis militer, dan (3) penghapusan komando teritorial sebagai bagian dari evaluasi postur dan fokus pertahanan yang kurang tepat.* Banyak kalangan berpendapat ketiga hal utama inilah yang menjadi sumber utama tidak profesionalnya TNI, dan ditegaskan lagi bahwa, dalam konteks postur utama pertahanan, komando teritorial sudah tidak relevan. Tapi ironinya kehadiran kowil (koter/binter) dalam konteks OMSP justru sangat diharapkan sebagaimana dinyatakan Teguh Santosa dkk dalam buku *KOMISI I Senjata-Satelit-Diplomasi* sebagai berikut: *“Kehadiran TNI ditengah-tengah masyarakat tidak perlu disimbolkan dengan hadirnya kantor kodam, korem, kodim,dan koramil (berikut beban birokrasinya) disetiap wilayah administrasi pemerintahan, tetapi melalui program-program seperti penanggulangan bencana dan wabah penyakit, serta operasi- operasi sosial kemasyarakatan lainnya. Itulah konsep pembinaan teritorial yang lebih “membumi” dan bermanfaat.*³² Dari pendapat tentang ide/ wacana penghapusan Komando Teritorial tersebut diatas terkesan bahwa; disuatu sisi kehadiran Koter itu sangat dibutuhkan untuk program- program bagi kepentingan sosial masyarakat seperti penanggulangan bencana, akan tetapi disisi lain ada keinginan segelintir kalangan untuk dibubarkan. Bagaimana mungkin tanpa kehadiran Kowil (Koter) didaerah/ wilayah yang tiba- tiba ditimpa musibah bencana alam seperti gempa bumi pasukan TNI harus dikerahkan dengan cepat menggunakan sarana alat sista yang sangat terbatas, tanpa didukung oleh kehadiran organisasi Komando Kewilayahan didaerah atau wilayah yang terkena

³¹Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/ 142 / 2002 tanggal 4 Juni 2002, tentang Penyebutan Gelar Komando Kewilayahan.

³²Teguh Santosa dkk, KOMISI I, Senjata-Satelit-Diplomasi, Jakarta, PT Suara Harapan Bangsa,Sept 2009, hal 73.

musibah bencana, dengan cepat, tepat, dan terorganisir. Kalau kita lihat kehadirannya secara riil dilapangan memang masih sangat diharapkan oleh masyarakat maupun aparat pemerintah lain di daerah (PEMDA). Bagaimana mungkin TNI mampu merespon secara cepat setiap ancaman bencana yang terjadi tanpa kehadiran Komando Kewilayahan yang digelar diseluruh wilayah nusantara.

Lain halnya dengan apa yang dikatakan oleh *Ikrar Nusa Bhakti* dalam tulisannya yang berjudul "*Xenofobia*", Tugas utama tentara dimanapun di dunia ini memang untuk mempertahankan kedaulatan nasional dari serangan luar, diplomasi internasional, dan keselamatan serta martabat bangsa. Namun, *tentara juga dapat difungsikan untuk operasi- operasi militer selain perang, apakah untuk misi sosial kemasyarakatan (civic mission), penanggulangan bencana (human disaster relief), atau bahkan menangani keamanan dalam negeri dan terorisme ketika polisi kurang memiliki kapabilitas untuk itu.* Mengapa tentara menjadi motor penggerak utama karena tentara memiliki alat perlengkapan yang amat canggih, baik dibidang komunikasi, alat angkut udara, laut, dan darat, maupun rantai komando. Personil tentara juga memiliki kesiapan fisik dan mental yang selalu terjaga untuk melaksanakan berbagai tugas, perang maupun non perang. Selain itu, dalam situasi damai, adalah tentara yang dalam bahasa seorang dosen di Asia Pacific Center for Security Studies (APCSS), Honolulu, Hawaii, dapat dikatakan *unemployed*. Ketika kata itu digunakan, tidak sedikit Kolonel dan Brigadir Jenderal dari negara- negara Asia Pasific yang mengikuti Executive Course on Security di APCSS pada awal tahun 2002 tersebut menjadi marah. Kata yang tepat, mungkin, adalah yang sering digunakan oleh Letjen (Purn) Agus Wijoyo dan saya kutip juga untuk dialog di APCSS itu, yaitu *idle capacity*.³³

³³ Nusa Bhakti. Ikrar. *Xenofobia*, dalam buku *Bencana Gempa dan Tsunami, Nanggroe Aceh Darussalam & Sumatera Utara*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, PT.Kompas Media Nusantara, 2005: hal 542-543.

Disini terlihat bahwa dalam kondisi damai dari pada tentara lebih banyak menganggur setelah mengikuti latihan secara terus menerus yang sudah barang tentu kesiapsiagaannya selalu terjaga, alangkah baiknya dikerahkan untuk membantu tugas-tugas kemanusiaan seperti penanggulangan bencana. Apalagi kalau kita berbicara pemberdayaan wilayah pertahanan yang dalam perspektif pertahanan Negara ditujukan untuk menyiapkan wilayah untuk mendukung peperangan dalam konteks Sistem Pertahanan Semesta, tentu akan berguna jika disinergikan penyiapan wilayah pertahanan ini untuk kepentingan mengantisipasi ancaman bencana alam.

Sedang optimalisasi peran TNI menurut Jenderal TNI Djoko Santoso, hal ini dilandasi pemikiran bahwa *sumber daya manusia, alat peralatan dan sarana prasarana yang dimiliki oleh TNI masih memungkinkan untuk dimanfaatkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, disamping penggunaan untuk tugas pokok TNI*. Kerja sama kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah selama ini, dapat dirasakan manfaatnya dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu perlu dilanjutkan dan diperluas sepanjang dimungkinkan peraturan perundang-undangan.³⁴ Sedangkan Optimalisasi Peran TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah merupakan salah satu "Sapta Tunggal" kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rapim TNI Tahun 2010. Pada hakekatnya Optimalisasi Peran TNI merupakan bentuk dari kesadaran moral sekaligus fungsional TNI, untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara serta *Ketahanan Nasional*. Panglima TNI menegaskan, Optimalisasi Peran TNI bukan ambisi TNI dalam melakukan ekspansi atas peran TNI seperti pada masa yang lalu. Bukan pula keinginan dari TNI untuk mencampuri ataupun mengambil alih tugas dan urusan yang menjadi wewenang institusi atau komponen bangsa yang lain. Namun semata

³⁴Laporan Utama, *Sapta Tunggal Kebijakan Panglima TNI 2010*, Majalah Tentara Nasional Indonesia, PATRIOT, Media Komunikasi Prajurit TNI, Jakarta, CV.Satya Geminastiti, 2010: hal 19

mata dalam rangka menunaikan tugas perbantuan TNI bila mana dibutuhkan sesuai dengan kemampuan dan batas kemampuan TNI.³⁵

Sarana TNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara merupakan perpaduan dari kekuatan, kemampuan dan gelar pasukan. Untuk kekuatan TNI merupakan perpaduan dari personil, materil, fasilitas, anggaran, doktrin dan organisasi. Kemudian untuk kemampuan, TNI dibutuhkan agar peran yang diemban dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk itu TNI dalam pelaksanaan tugasnya terutama menghadapi berbagai ancaman dituntut memiliki empat (4) kemampuan; yaitu : kemampuan penangkalan, kemampuan penindakan (kemampuan pertahanan), kemampuan intelijen strategis, dan *kemampuan dukungan*. Sedangkan untuk gelar pasukan, *TNI digelar secara terpusat dan kewilayahan (seperti Korem)*, atau secara kedaerahan agar mampu merespon dengan cepat setiap ancaman dan gangguan yang terjadi diwilayah NKRI ini terutama ancaman bencana alam yang setiap saat selalu terjadi diberbagai wilayah Indonesia.

2.5 Konsep Pemberdayaan Wilayah Pertahanan.

Salah satu tugas TNI AD yang telah dituangkan dalam Perundang-undangan (UU RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI Pasal 8 d) adalah melaksanakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di darat. Tugas ini dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan sesuai ketatalaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam uraian tugas pokok TNI AD sesuai pasal 8d tersebut secara eksplisit memang tidak tertuang masalah Pembinaan Teritorial, akan tetapi tugas Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di darat ini dilaksanakan TNI AD melalui kegiatan yang disebut Pembinaan Teritorial.³⁶

³⁵ http://rindam-brawijaya.blogspot.com/2010_05_09_archive.html , *Sosialisasi Susunan Organisasi TNI dan Optimalisasi Peran TNI*

³⁶ Staf Umum Teritorial Mabesad, *Vademikum Teritorial Angkatan Darat*, Jakarta, Desember 2009, Cetakan Pertama, Edisi Tahun 2009; hal 372.

2.5.1 Maksud Pemberdayaan Wilayah Pertahanan. Adapun maksud Pemberdayaan Wilayah Pertahanan sesuai penjelasan UU TNI No. 34/2004 tentang TNI adalah sebagai berikut :

- a. Membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini, meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya untuk melaksanakan operasi militer untuk perang (OMP), pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara sesuai dengan sistem pertahanan Semesta.
- b. Membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- c. Membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

2.5.2 Makna Pemberdayaan Wilayah Pertahanan. Makna yang terkandung dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan, yaitu membantu pemerintah untuk menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini; meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya untuk melaksanakan operasi militer untuk perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan Negara sesuai Sishanta. Kekuatan Pertahanan disini mengandung 2 (dua) unsur yaitu “ Wilayah Pertahanan dan Kekuatan pendukungnya.”

- a. Unsur Wilayah Pertahanan, meliputi aspek geografi yang perlu dikelola dan didayagunakan sehingga menjadi kekuatan pertahanan dalam bentuk *ruang juang* yang tangguh, dan bermanfaat sebagai ruang manuver bagi pasukan saat melaksanakan operasi pertahanan serta sebagai tumpuan logistik wilayah yang dapat mendukung perang secara berlanjut.
- b. Unsur Kekuatan Pendukung terdiri dari manusianya (rakyat) yang meliputi 2 (dua) aspek kehidupan berupa kondisi sosial.

1) **Aspek Demografi**, yaitu dikelola dan didayagunakan sehingga menjadi kekuatan pertahanan dalam bentuk **alat juang** yang tangguh, dan bermanfaat untuk mendukung pertahanan Negara. Alat juang ini diwujudkan dalam bentuk **komponen cadangan dan komponen pendukung**.

2) **Aspek Kehidupan (Konsos)**, perlu dikelola dan didaya gunakan, sehingga menjadi kekuatan yang dapat mempengaruhi kondisi untuk mendukung lingkungan operasi, sehingga menjadi kekuatan pertahanan, dalam bentuk **kondisi juang yang tangguh**, untuk mendukung pertahanan Negara. Kondisi Juang ini terbentuk dari adanya ketahanan “ ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.”³⁷

2.5.3 Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di darat dilaksanakan melalui Pembinaan Teritorial.

a. Latar Belakang Sejarah (Kowil, Binter & Pasal 8d. UU No. 34/ 2004 tentang TNI).

Spontanitas rakyat Indonesia dalam perjuangan merebut dan menegakkan kemerdekaan pada tahun 1945 merupakan puncak semangat juang rakyat untuk membebaskan diri dari penjajahan dan penindasan dimuka bumi Indonesia. Dalam perjalanan sejarah semakin terlihat dengan jelas bahwa semangat kerakyatan, semangat kesemestaan dan semangat kewilayahan timbul secara spontan, dari terlihat pada saat agresi militer Belanda II yang terkoordinir dibawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Perlawanan dilancarkan berdasarkan strategi dan taktik yang tertuang dalam *Perintah Siasat Nomor I*. Pada saat itu seluruh potensi yang ada ikut serta menghadapi Belanda, sesuai kemampuan profesi masing- masing, dan saat ini biasa kita sebut dengan *Perang Rakyat Semesta*. Pada waktu itu, Angkatan Perang Indonesia disusun dalam *Pasukan Mobil* dan *Pasukan*

³⁷ Ibid. hal 372

Teritorial. Pasukan Mobil untuk melaksanakan penghambatan gerakan musuh dan menjadi tenaga penggempur dalam susunan *Batalyon, Kompi dan Peleton*. Sedangkan *Pasukan Teritorial* mengadakan penjagaan Kabupaten demi Kabupaten, menyebar menjadi inti gerakan gerilya rakyat dibagian daerah yang lebih kecil seperti *Distrik dan Onderan atau Kecamatan*. Organisasi Kewilayahan ketika itu adalah *Komando Militer Daerah (KMD), Komando Distrik Militer (KDM), Komando Order Distrik Militer (KODM) dan Kader Desa*. Gelar inilah yang menjadi cikal bakal Komando Teritorial (Koter) yang saat ini kita kenal dengan Komando Kewilayahan (Kowil), yang merupakan gelar kekuatan TNI AD, dan diyakini sebagai gelar yang memiliki efek tangkal serta sebagai langkah dini dalam penyelenggaraan pertahanan Negara, yang disusun secara mendalam.

Perlawanan menghadapi agresi Belanda II tersebut tampak jelas adanya bantuan rakyat kepada Angkatan Perang Indonesia sehingga dapat mengalahkan kekuatan Belanda dikala itu. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, terdapat berbagai peristiwa pemberontakan bersenjata dan makar politik seperti pemberontakan PKI Madiun, Permesta, DI TI, G 30 S/PKI, RMS dan lain-lain. Semua dapat teratasi karena adanya dukungan rakyat yang penuh kesadaran, keikhlasan dan tanggung jawab untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan NKRI. Kerja sama dan soloditas inilah yang saat ini kita sebut dengan *Kemanunggalan TNI-Rakyat*. Karena Kemanunggalan TNI-Rakyat merupakan salah satu kekuatan untuk menegakkan kedaulatan dan menjaga keutuhan NKRI, maka dari waktu ke waktu harus kita bangun dan pelihara melalui *Pembinaan Teritorial*.

Sejarah mencatat bahwa dalam pertempuran, pengaruh lingkungan operasi merupakan salah satu aspek non fisik yang sangat mempengaruhi untuk pencapaian kemenangan. Aspek non fisik dari

lingkungan operasi tersebut adalah dalam wujud *ruang, alat dan kondisi juang*, diantaranya adalah untuk kemandirian TNI- Rakyat. Karena itulah, sejak awal jauh sebelum adanya UU RI No.3/ 2002 tentang Pertahanan dan UU RI No.34/2004 tentang TNI, TNI khususnya TNI AD melakukan berbagai upaya, pekerjaan dan tindakan membangun lingkungan operasi untuk mewujudkan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh, guna tercapainya tugas pokok. Apa yang dilakukan TNI/ TNI AD itu kita kenal dengan istilah Binter atau Pembinaan Teritorial.

UU No.34 /2004 tentang TNI pasal 7 ayat 2, salah satu bentuk tugas dari OMSP yang dilaksanakan TNI adalah untuk “memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan “Sistem Pertahanan Semesta”.. Sedangkan pada pasal 8d, menyatakan AD bertugas “ melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat”. Dalam rangka terdukungnya tugas tersebut, TNI AD harus melakukan upaya, pekerjaan dan tindakan agar tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan sukses. Upaya, pekerjaan dan tindakan tersebut dilakukan dengan istilah yang disebut dengan *Pembinaan Teritorial*, yang dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan operasi ataupun pembinaan, dan sifatnya sebagai salah satu fungsi utama TNI AD, dalam tercapainya tugas pokok TNI AD. Agar Binter TNI AD dapat dilaksanakan sesuai perundang- undangan, dapat diterima keberadaannya oleh masyarakat, dapat diaplikasikan dan bisa dipertanggung jawabkan, maka perlu adanya reorientasi dan redefinisi Binter TNI AD.³⁸

Dalam konteks reorientasi dan redefinisi binter inilah, pada hakekatnya dalam kondisi damai disinergikan dan lebih difokuskan untuk menyiapkan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh disuatu wilayah guna mengantisipasi ancaman nonmiliter seperti bencana alam yang akhir- akhir ini sering terjadi hampir di seluruh wilayah

³⁸ *ibid*, hal 373- 374.

Indonesia. Pembinaan Teritorial yang dilaksanakan TNI AD pada umumnya, maupun Korem pada khususnya, sebaiknya juga didayagunakan untuk kepentingan melindungi keselamatan masyarakat dari berbagai ancaman bencana alam, terutama bagi Korem- Korem yang wilayah tugasnya sering dilanda oleh kejadian bencana alam yang sangat dasyat, seperti wilayah Korem 032/ Wirabraja yang meliputi seluruh wilayah propinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya menurut Aster Panglima TNI ; "Konsep Pemberdayaan Wilayah Pertahanan pada hakekatnya bertujuan untuk mensinergikan peran instansi fungsional dalam membina SDM, SDA, SDB, sarana dan prasarana, nilai- nilai, teknologi dan dana menjadi kekuatan kewilayahan yang tangguh untuk mendukung pertahanan negara yang dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan. Dalam perspektif Hanneg, bertujuan untuk menyiapkan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini dalam rangka memenangkan peperangan; dan dalam perspektif kepentingan masyarakat bertujuan untuk mengatasi kesulitan rakyat.³⁹ Disini terlihat bahwa membantu penanggulangan bencana alam pada hakekatnya adalah untuk mengatasi kesulitan rakyat, yang memang untuk kondisi di Indonesia sangat rentan terjadinya ancaman bencana seperti gempa bumi yang terjadi pada tanggal 30 Oktober 2009 di Barat Daya Pariaman serta gempa bumi dan tsunami 25 Oktober 2010 di wilayah Mentawai.

Dalam Sistem Pertahanan Negara sesuai amanat UU RI No.3/2002 pasal 1 antara lain menyatakan bahwa "Sistem Pertahanan Negara adalah Sistem Pertahanan yang bersifat Semesta. Melibatkan seluruh warga Negara, wilayah, sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dari segala ancaman".⁴⁰ Oleh sebab itu makna yang terkandung dalam Sistem Pertahanan Semesta tersebut merupakan satu sifat kesatuan yang bulat dan utuh serta total didalam penataan konsepsi pertahanan

³⁹Suprpto, *Pemberdayaan Wilayah Pertahanan, Laporan Utama*,Majalah TNI PATRIOT, Jakarta, CV.Satya Geminastiti, edisi 47, 2008: hal 10- 11.

⁴⁰ Mabasad, STERAD, *Vademikum Teritorial Angkatan Darat*, Cetakan Pertama, Edisi Tahun 2009, Jakarta Desember 2009.

Negara. Hal ini juga merupakan totalitas dari perwujudan Kemanunggalan TNI-Rakyat yang tidak terlepas dari sifat- sifat kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan yang harus dikembangkan secara berkelanjutan. Aktualisasi Kemanunggalan TNI-Rakyat dengan sifat- sifat kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan ini harus selalu dibangun, dikembangkan dan dipelihara konsistensinya, apalagi didayagunakan dan disinergikan untuk kepentingan menghadapi ancaman aktual diluar ancaman militer, seperti untuk menanggulangi ancaman bencana alam. Potensi wilayah yang disiapkan untuk mewujudkan Ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh ini dalam kondisi damai akan sangat bermanfaat bagi upaya perlindungan masyarakat menghadapi ancaman bencana alam yang akhir- akhir ini bagaikan monster menakutkan bagi sebagian wilayah/ Indonesia saat ini.

Dalam UU No. 34/ 2004 tentang TNI, terdapat tugas- tugas operasi militer selain perang (OMSP). Tugas ini menjadi perhatian dan sekaligus mendorong upaya untuk mencari metode pembinaan territorial yang tepat. Klausul pada pasal 7 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa TNI harus dapat melaksanakan usaha- usaha memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, serta harus mampu membantu tugas- tugas pemerintahan di daerah. Dua ayat tersebut sudah menggambarkan adanya tugas bahwa TNI harus mampu melakukan pemberdayaan wilayah dan membantu terselenggaranya pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tujuan Pembinaan Teritorial tidak lain adalah menciptakan ruang, alat dan kondisi juang untuk dapat didayagunakan pada saatnya nanti serta membantu dan memperlancar tugas- tugas TNI dalam sistem pertahanan semesta ketika negara dalam keadaan darurat atau perang,⁴¹ dan yang lebih penting serta mendesak untuk saat ini adalah; agar kondisi ini dapat didayagunakan untuk kepentingan penanggulangan bencana alam yang merupakan ancaman nyata yang setiap saat dihadapi oleh sebagian besar wilayah NKRI.

⁴¹ Soetomo Sakijo Admodjo, *Optimalisasi Strategi Kompartemensi Wilayah Pertahanan Pada Korern 121/ABW, Kalimantan Barat*, Jurnal Ketahanan Nasional, Proqram Studi Ketahanan Nasional Sekolah Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta, Desember 2009; hal 43.

2.6. Bencana Alam Sebagai Salah Satu Bentuk Ancaman

Dilihat dari sumber ancaman, semakin besar keterkaitan antara ancaman eksternal dan ancaman internal. Dimensi ancaman mudah berkembang dari satu dimensi ke dimensi lain, termasuk dimensi ideologi, ekonomi, politik, sosial, hukum, informasi dan teknologi, serta keamanan. Spektrum ancaman dapat berubah dengan tiba-tiba dari lokal ke nasional, demikian juga perkembangan eskalasi keadaan dari tertib hingga darurat, dan sebaliknya, tidak mudah untuk diprediksi. Mengingat kompleksitas ancaman yang dihadapi, semua komponen pertahanan negara dan unsur-unsur di luar bidang pertahanan dituntut untuk saling mendukung dan bersinergi satu dengan yang lain, dengan senantiasa mengindahkan tataran dan lingkup kewenangan yang sudah ditentukan peraturan perundang-undangan.

Diantara ancaman aktual yang menuntut sinergisme yang tinggi dan harus mendapat perhatian yang serius pada lima tahun ke depan, adalah ancaman terhadap konflik di wilayah perbatasan dan keamanan pulau-pulau kecil terluar, ancaman separatisme, terorisme, *bencana alam*, konflik horizontal, radikalisme, kelangkaan energi dan ragam kegiatan ilegal baik di darat maupun di laut yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Kesiapan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman potensial, antara lain pencemaran lingkungan, pandemik, *cyber crime*, pemanasan global, krisis finansial, agresi militer, serta berbagai kemungkinan ancaman yang muncul di sepanjang Alur Laut Kepulauan Indonesia tetap menjadi perhatian pembangunan pertahanan negara dalam jangka panjang.⁴² Ancaman berdimensi bagi keselamatan umum dapat terjadi karena *bencana alam*, misalnya gempa bumi, meletusnya gunung, dan tsunami. Ancaman karena manusia, misalnya penggunaan obat-obatan dan bahan kimia, pembuangan limbah industri, kebakaran, kecelakaan transportasi. Contoh Ancaman Nonmiliter yang terjadi di Aceh, Yogyakarta, dan gempa dasyat tanggal 30 September 2009 dan Gempa yang diikuti gelombang tsunami Mentawai di wilayah propinsi Sumatera

⁴² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2010 Tentang *Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014*.

Barat. Disini terlihat bahwa ancaman terbesar akhir- akhir ini di bidang Hankam justru muncul dari aspek nonmiliter seperti gempa bumi dan gelombang tsunami yang terjadi di Aceh, Yogyakarta dan Sumatera Barat.

Dengan memahami besarnya potensi bencana diwilayah nusantara ini, maka permasalahan bencana alam pada dasarnya merupakan permasalahan bangsa dan negara. Oleh karena itu penanggulangan bencana merupakan bagian dari pemenuhan permasalahan tujuan bernegara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.⁴³ Pemahaman penanggulangan bencana dalam konteks tujuan bernegara ini sejalan dengan tugas pokok TNI yaitu; “menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara”. Dalam konteks ini *bencana alam dapat dikategorikan sebagai ancaman* yang setiap saat dapat terjadi dimana saja dan kapan saja diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan menurut Danny Hilman Natawijaya pakar geologi dari Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, mengatakan bahwa; *“diwilayah Mentawai, Sumatera Barat, gempa yang terjadi sejak tahun 2000 bersumber pada daerah pinggiran biang gempa yang pernah menimbulkan gempa besar pada tahun 1883. Biang gempa yang berada dibawah Siberut- Pagai Utara- belum terlepas. Diperkirakan, aktifitas gempa di Mentawai sedang menuju klimaksnya. Biang gempa Mentawai berpotensi mengeluarkan gempa sebesar 8,9 SR”*.⁴⁴

Para ahli geologi pun sepakat bahwa potensi gempa di Indonesia cenderung meningkat. Hal itu diakui *Tim Revisi Peta Gempa Indonesia 2010* saat bertemu presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 16 Juli 2010 yang lalu. Ketua Tim, Masyur

⁴³Supriyadi, Brigjen TNI, *TNI Dalam Penanggulangan Bencana*, Majalah Tentara Nasional Indonesia, PATRIOT, Edisi No 53, 2009: hal: 19.

⁴⁴ Lihat, Kompas 17 Mei 2010, hal 14.

Irsyam, menjelaskan luas potensi gempa 2010 di Indonesia dua kali lipat ketimbang peta 2002. Kenaikan itu terutama terjadi didekat sumber gempa, seperti disekitar patahan dan sesar. Bukti konkret adalah tingkat guncangan gempa di Aceh meningkat dari 0,2 g (gravitasi) menjadi 0,33g. Adapun di Padang, guncangan dari 0,25 g menjadi 0,32 g. Di pulau Jawa juga meningkat dari 0,15 menjadi 0,2 g, kata Masyur yang juga pakar kegempaan dari ITB. *Tim tersebut juga mengingatkan bahwa Sumatera tetap menjadi sumber- gempa besar. Sampai sekarang masih ada energi gempa dengan kekuatan 9,0 pada skala Richter berada di Mentawai yang belum dilepaskan. Bila itu terjadi, imbasnya tak bisa dianggap main- main. Untuk itulah, mitigasi bencana harus ditingkatkan dan harus menjadi pedoman baku disetiap sekolah, institusi, dan sebagainya.*⁴⁵

Melihat hasil penelitian para ahli geologi tersebut diatas, sudah selayaknya segenap institusi termasuk TNI saling bersinergi dalam menghadapi ancaman bencana ini baik pada saat prabencana, maupun dalam keadaan tanggap darurat, serta pada tahap pasca bencana. Bencana tsunami di Mentawai dan letusan gunung Merapi di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan kebenaran teori para ahli bahwa Indonesia adalah negeri yang sangat rawan bencana. Rawan karena Indonesia secara geologis diapit tiga lempeng bumi yang berpotensi gempa. Yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Implikasinya hampir semua daerah di Indonesia sangat rawan gempa dan tsunami. Daerah- daerah yang sangat rawan gempa itu meliputi wilayah yang sangat luas mulai Selatan Pulau Sumatera, Selatan Pulau Jawa, Selatan Pulau Bali, hingga Kepulauan Maluku. Disisi lain wilayah Indonesia juga dilingkari rangkaian gunung berapi yang siap memuntahkan letusan. Teori tentang kerawanan Indonesia secara geografis dan geologis itu telah diketahui sejak lama, tidak saja oleh para ahli, tetapi juga pemerintah dan masyarakat.⁴⁶

⁴⁵ Lihat, Media Indonesia, *Masih Ada Potensi Gempa 9,0 SR*, Jakarta Senin 26 Juli 2010; HAL 20.

⁴⁶ Editorial, *Tsunami Mentawai Bencana Kebijakan*, Jakarta, Media Indonesia, Sabtu 30 Oktober 2010; hal 1

Peristiwa bencana dapat dikategorikan kedalam dua bentuk, yakni *bencana sosial dan bencana alam*. *Bencana sosial* umumnya disebabkan oleh adanya hubungan antar manusia yang menimbulkan berbagai peristiwa dimasyarakat seperti terjadinya konflik politik, konflik sosial, perang antar suku, perkelahian antar kelompok masyarakat, pencemaran lingkungan, dan eksploitasi alam oleh ulah manusia. Sementara itu *bencana alam* adalah bencana yang disebabkan oleh adanya perubahan alam secara alami; dampaknya dapat mengganggu kestabilan masyarakat atau kehancuran diwilayah terjadinya bencana itu.⁴⁷ Bentuk bencana alam ini bermacam- macam diantaranya ialah gelombang air pasang (tsunami), gempa bumi, gunung meletus, badai (taifu), banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan kebocoran sumber daya alam seperti gas bumi.⁴⁸

Bodley dalam bukunya "*Anthropology and Contemporary Human Problems*", memberikan beberapa analisis kontemporer dan prediksi tentang persoalan besar umat manusia kedalam beberapa tema besar, yakni:⁴⁹

- 2.6.1 Adaptasi dan krisis lingkungan
- 2.6.2 Sumber daya alam dan budaya konsumsi
- 2.6.3 Kelaparan dunia dan evolusi produksi makanan
- 2.6.4 Sistem makanan yang diolah secara industri
- 2.6.5 Problem populasi
- 2.6.6 Tata internal, dan
- 2.6.7 Perang dan tata internasional.

⁴⁷Sulistya Wardaya, , *Potret Bencana Sosial di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam sosialisasi& sarasehan bencana sosial di Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu, 2006.

⁴⁸ Eniarti B.Djohan, *Mengapa Kajian Bencana*, Masyarakat Indonesia, Majalah Ilmu- ilmu Sosial Indonesia, Jilid XXXIII, No.2, 2007, Jakarta, LIPI Press, 2007

⁴⁹ John H. Bodley, *Anthropology and Contemporary Human Problems*, California, Cummings Publishing Company, 1976; hal 2.

Sejalan dengan permasalahan tersebut diatas kita lihat di Indonesia pada pertengahan tahun 2010 ini telah terjadi perubahan iklim yang sangat ekstrem. Sebanyak 346.808 hektar sawah terancam raib karena naiknya permukaan air laut akibat dampak perubahan iklim ekstrem. Ditambah sejumlah kota di Jawa dan 750 pulau yang terancam tenggelam, serta hancurnya kehidupan pesisir dan petani, semua ini jadi lonceng peringatan betapa seriusnya dampak perubahan iklim terhadap lingkungan dan kelangsungan hidup bangsa kita. Peringatan dampak perubahan iklim terhadap kelangsungan hidup manusia rasanya sudah sering disuarakan, gerakan ditingkat global dan nasional untuk mencegah juga bergema kencang. Kita mengapresiasi peran besar pemerintah dalam upaya mitigasi perubahan iklim secara global. Rasanya pidato Presiden dalam berbagai forum dunia sangat tegas menunjukkan komitmen ini. Namun dalam tataran mikro dan operasional dilapangan, disadari ada gap yang lebar. Sebagai Negara yang lokasi geografisnya sangat rentan, rasanya kita sangat lamban bertindak. Langkah antisipasi dan mitigasi belum sepenuhnya terasa dilapangan dan belum jadi gerakan nasional yang melibatkan seluruh masyarakat. Kalaupun ada, masih sporadis dan lokal. Sekarang inipun kita sudah kewalahan meredam alih fungsi lahan produktif pertanian yang tak terbendung, yang dipicu oleh kebijakan tata ruang yang amburadul. Kita juga kewalahan menghadapi bencana banjir, hanya karena curah hujan tinggi. Belum lagi dampak terhadap kesehatan masyarakat, infrastruktur, dan lainnya. Kegagalan mengantisipasi lebih cepat perubahan iklim akan menjadi bencana besar ekonomi dan kemanusiaan yang katastrofik. Menyegerakan langkah mitigasi dan antisipasi dan antisipasi pada tataran langkah konkret dilapangan tak bisa ditawar-tawar lagi. Peran Negara diposisi terdepan menjadi sangat penting disini⁵⁰, termasuk keterlibatan peran TNI dengan Komando Kewilayahannya yang tersebar diseluruh pelosok tanah air.

Bencana alam akan semakin jelas maknanya bagi manusia melalui pemahaman dampak pasca bencana pada kehidupan sosial. G.A Theodorson dan A.G Theodorson menyatakan bahwa bencana dapat dipelajari dalam suatu studi yang

⁵⁰ Kompas, *Opini, Tajuk Rencana, Menyelamatkan Bumi Kita*, Jakarta, Rabu 21 Juli 2010.

disebut *disaster studies*, yakni studi tentang efek dari bencana yang datang secara mendadak (seperti gempa bumi, banjir bandang, angin tornado) terhadap organisasi sosial dan perilaku manusia. Studi ini memusatkan perhatian pada efek bencana terhadap proses penyesuaian hubungan sosial, baik secara individual maupun komunitas sebelum dan sesudah terjadinya bencana. Hal ini memberikan fokus studi tentang berbagai tipe organisasi sosial yang muncul selama dan setelah bencana, dan sejumlah efek nilai budaya terhadap perilaku selama terjadinya bencana.⁵¹ Ketua Departemen Kesehatan Lingkungan Universitas Indonesia mengungkapkan perubahan iklim akibat pemanasan global dapat berdampak langsung, seperti mengakibatkan gelombang panas, banjir dan bencana alam lain.⁵²

Bahaya bencana ini, khususnya bencana alam, diprediksi masih akan melanda Indonesia mengingat wilayahnya terdiri dari gugusan pulau dan gunung berapi yang sangat rawan terjadinya berbagai bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Abdullah dalam pidato pengukuhan Guru Besar Antropologi pada Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, dengan mengutip berbagai tulisan para ahli antropologi, sosiologi, politik, ekonomi, dan ekologi mengungkapkan bahwa Indonesia termasuk dalam peta dunia sebagai daerah bencana terpenting. Dari sisi sejarah kejadian bencana alam di Indonesia, terungkap bahwa 75.000 tahun yang lalu terjadi erupsi Danau Toba, yang debunya mencapai Negara Srilangka; tahun 1815 letusan gunung Tambora berdampak terhadap gagalnya panen dan hilangnya satu musim panas di Eropa dan Amerika Utara; tahun 1883 terjadi letusan gunung Krakatau; tahun 1820 terjadi gempa yang sangat dasyat di Bulukumba yang menyebabkan terjadinya tsunami. Setelah kejadian-kejadian bencana alam yang sangat terkenal itu, Indonesia masih sering dilanda berbagai peristiwa bencana alam, baik dalam skala kecil maupun besar. Diantaranya yang paling sering adalah gempa

⁵¹Theodorson, George A. dan Archiles G.Theodorson, *A Modern Dictionary of Sociology*, New York, A Barnes & Noble Books, 1969; hal 115.

⁵²Kompas, Perubahan Iklim, *Kesehatan Masyarakat juga Terkena Dampak*, Jakarta, Kamis 22 Juli 2010.

bumi, letusan gunung berapi, dan banjir,⁵³ seperti tsunami Aceh 2004, gempa bumi Yogyakarta 2006, dan gempa bumi di Sumatera Barat 30 September 2009 serta gempa bumi yang diikuti tsunami 25 oktober 2010 yang lalu di Kepulauan Mentawai.

Bencana tsunami di Mentawai yang merenggut ratusan jiwa dan meletusnya gunung merapi yang menelan korban puluhan orangpun bukanlah pertama dan diprediksi bukan yang terakhir. Kalangan ilmuwan dunia sepakat gempa dan gunung meletus akan terus terjadi di Indonesia. Bahkan ahli Seismologi terkemuka John McCloskey , professor di Institute Riset Sains Lingkungan Hidup di Universitas Ulster, Irlandia Utara, telah memprediksi terjadinya gempa yang memicu tsunami di Mentawai. Dalam penelitian di jurnal Nature Geoscience pada 18 Januari 2010, ia memperingatkan tsunami 26 Desember 2004 bisa terjadi lagi di Sumatera.⁵⁴

Sejalan dengan kondisi kebencanaan yang menimpa Indonesia beberapa tahun terakhir ini memang merupakan suatu keniscayaan, karena Negara Indonesia berada di jajaran Pacific Ring Of Fire. Pacific Ring of Fire atau biasa disebut Ring of Fire (Cincin Api) adalah zona dimana terdapat banyak aktifitas seismik. Zona yang berbentuk seperti tapal kuda ini terdiri dari busur vulkanik dan parit-parit (palung) didasar laut, memiliki panjang lebih dari 40.000 km memanjang dari barat daya Amerika Selatan dibagian timur hingga ke sebelah tenggara benua Australia di sebelah barat. Pada zona yang disebut Cincin Api inilah banyak terjadi gempa dan letusan gunung berapi. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang Cincin Api ini. Pada tahun 1960-an para ahli mengemukakan sebuah teori yang dinamakan "lempeng tektonik" yang menjelaskan tentang lokasi gunung berapi dan gejala-gejala geologi. Menurut teori tersebut, permukaan bumi terbentuk dari rangkaian lempeng-lempeng tektonik dengan ketebalan lebih kurang 80 km, dimana lempeng-lempeng tersebut bergerak, berubah posisi dan ukuran dengan kecepatan 1-10 cm per tahun atau bisa disamakan

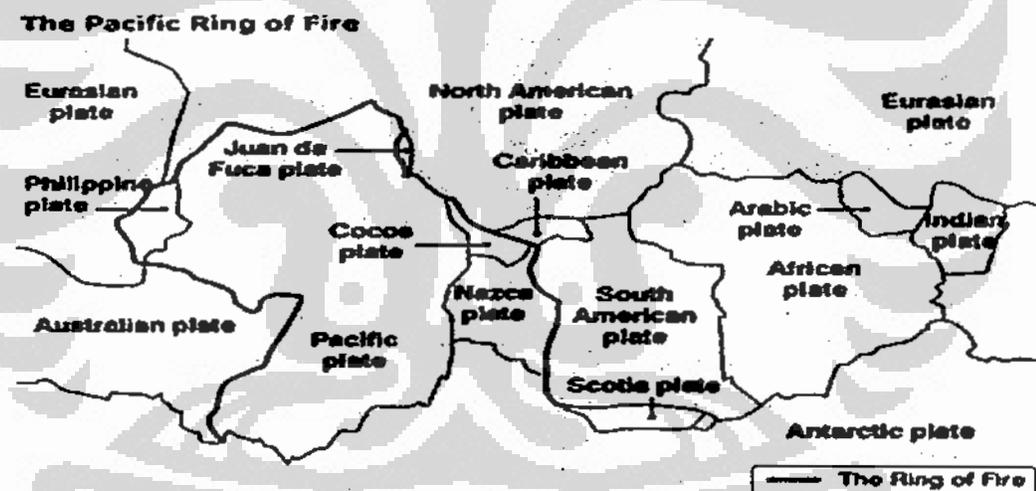
⁵³ Eniarti B.Djohan, *Mengapa Kajian Bencana*, Masyarakat Indonesia, Majalah Ilmu- ilmu Sosial Indonesia, Jilid XXXIII, No.2, 2007, Jakarta, LIPI Press, 2007; hal 4.

⁵⁴ Eko Yulianto, Peneliti Paleotsunami LIPI, *Letusan Gunung dan Tsunami Menghantui*, Jakarta, Media Indonesia, Senin 1 November 2010, hal 12.

dengan pertumbuhan kuku jari manusia. Di bawah laut terus menerus terjadi pembentukan kerak bumi akibat lava yang keluar dari gunung berapi bawah laut yang langsung bertemu dengan air laut sehingga mengeras. Maka untuk memberi ruang pada dasar laut yang baru jadi tadi semua lempeng bumi bergerak, dan saat mereka bergerak terjadilah aktifitas geologi pada tepian lempeng tersebut. Ketika lempeng bumi bergerak dapat terjadi tiga kemungkinan :

- a. Lempeng-lempeng bergerak saling menjauhi sehingga memberikan ruang untuk dasar laut yang baru.
- b. Lempeng saling bertumbukan yang menyebabkan salah satu lempeng terdesak kebawah dari lempeng yang lain.
- c. Tepian lempeng meluncur tanpa pergesekan yang berarti.

Ring of Fire terbentuk akibat pergesekan lempeng tektonik seperti terlihat pada gambar dibawah:



Di sisi timur Cincin Api terbentuk akibat lempeng Nazca dan lempeng Cocos bertumbukan mendorong lempeng Amerika Selatan ke arah barat. Lempeng Pasifik dan lempeng kecil Juan de Fuca terdorong ke bawah lempeng Amerika Utara. Sepanjang sisi utara lempeng Pasifik bergerak ke arah barat laut terdorong ke bawah busur vulkanik Pulau Aleutian. Di bagian barat lempeng Pasifik terdorong sepanjang Semenanjung Kamchatka-Kurile diselatan Jepang. Di bagian selatan Lempeng Pasifik bertumbukan dengan banyak lempeng-lempeng kecil, yang terbentang dari

Kepulauan Mariana, Philipina, Bougenville, Tonga sampai Selandia Baru. Indonesia terletak diantara Cincin Api dan Sabuk Alpide yang membentang dari Nusa Tenggara, Bali, Jawa, Sumatera, terus ke Himalaya, Mediterania dan berujung di Samudra Atlantik. Inilah sebabnya di Indonesia banyak gunung berapi aktif dan banyak terjadi gempa seperti yang baru-baru ini terjadi di **Sumatera Barat**. Gunung-gunung berapi di Indonesia termasuk yang paling aktif dalam jajaran gunung berapi pada Ring of Fire. Gunung berapi di Indonesia terbentuk dalam zona subduksi lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia.⁵⁵

2.7. Konsep Ketahanan Nasional

Menurut Brigjen TNI (Purn) Prof.GPH.S. Haryomataram, SH istilah Ketahanan Nasional dikenal pada tahun 1960, tetapi belum diberikan defenisi tertentu, disamping itu juga belum diberikan konsep yang lengkap dan menyeluruh. Istilah Ketahanan Nasional dipakai dalam rangka pembahasan tentang *pembinaan teritorial* atau pertahanan keamanan pada umumnya. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) telah menghasilkan konsep tahun 1968,1969 dan 1972 sebagai berikut:

2.7.1. Konsepsi Tahun 1968; Ketahanan Nasional adalah keuletan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala kekuatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung ataupun tidak langsung membahayakan kelangsungan Negara dan bangsa Indonesia.

2.7.2. Konsepsi Tahun 1969; Konsepsi kedua ini merupakan penyempurnaan dari konsepsi pertama, disamping isinya yang diperbaiki agar lebih logis juga sistematiknya dirubah. Defenisi Ketahanan Nasional adalah keuletan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala ancaman baik yang datangnya dari luar maupun dari dalam, yang langsung ataupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup Negara dan bangsa Indonesia,

⁵⁵ Wikipedia ,Pacific Ring of Fire,USGS Description : Ring of Fire, Plate Tectonics, Sea Floor Spreading, Subduction Zone, Hot Spot., dalam <http://ayahrachmat.blogspot.com/2009/10/ring-of-fire.html>

2.7.3. Konsepsi Tahun 1972; Defenisi Ketahanan Nasional adalah merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, didalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik yang dating dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan nasional. Yang menjadi inti gagasan adalah pernyataan bahwa kehidupan nasional dapat dibagi dalam beberapa aspek/ unsur- unsure Tannas yaitu:

- a. Aspek Alamiah; yaitu letak kedudukan geografi Negara, keadaan dan kekayaan alam, serta keadaan dan kemampuan penduduk, yang dikenal dengan Tri Gatra.
- b. Aspek Sosial; meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, militer/ hamkam, yang dikenal dengan Panca Gatra.

Keseluruhan aspek tersebut diatas dinamakan dengan Asta Gatra.⁵⁶

Ketahanan Nasional (Tannas) pada hakekatnya adalah kekuatan nasional dalam arti luas, dengan demikian unsur-unsur ketahanan nasional mencakup Asta Gatra yaitu geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial dan militer, sesuai dengan analogi menurut Cleine yaitu massa kritik (penduduk dan wilayah), ekonomi, militer, konsepsi strategi dan tekad nasional. Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketangguhan bangsa dalam mempertahankan eksistensi dalam melangsungkan hidupnya sesuai cita-cita dan citranya sendiri.⁵⁷

Selanjutnya Ketahanan Nasional (Tannas) ialah kondisi dinamik suatu bangsa , berisi keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional

⁵⁶ Ermaya Suradinata & Alex Dinuth, *Geopolitik dan Konsepsi Ketahanan Nasional*. Jakarta, PT Paradigma Cipta Yatsigama, 2001; hal 123.

⁵⁷ Sumarsono Soedarsono, *Ketahanan Pribadi dan Ketahanan Keluarga Sebagai Tumpuan Ketahanan Nasional*, Jakarta, Intermasa, Cetakan II, 1997; hal 54.

dalam menghadapi ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan) baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dapat dipandang sebagai dua suatu mata uang dengan dua sisi yakni keamanan (security) dan kesejahteraan (prosperity), dimana keduanya berjalan seimbang antara kesejahteraan dan keamanan mengandung muatan utama yakni partisipasi masyarakat yang demokratis.⁵⁸

Ketahanan Nasional dalam konteks pandangan makro juga terlihat pada defenisi ontologi sebagai berikut: *yaitu kondisi dinamik suatu bangsa, yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mampu mengembangkan kekuatan nasional didalam mengatasi dan menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional.*⁵⁹ Disamping itu pada hakekatnya ketahanan nasional merupakan suatu konsepsi dalam pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan kemakmuran serta pertahanan dan keamanan dalam kehidupan nasional. Secara hirarkis, ketahanan nasional dapat juga dilihat dari tingkat yang paling mikro sampai yang paling makro dimulai dari ketahanan pribadi, ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, ketahanan lingkungan, ketahanan daerah, ketahanan wilayah dan ketahanan nasional.

Perspektif Ketahanan Nasional yang kita pahami dari beberapa konsep tersebut diatas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa *bencana alam merupakan suatu ancaman yang bisa terjadi kapan saja dan dimana saja diwilayah NKRI ini, dan sudah barang tentu akan mengganggu dan menggoyahkan suatu tatanan ketahanan wilayah, yang apabila tidak diantisipasi secara dini tentunya akan mengganggu/ menggoyahkan salah satu aspek Ketahanan Nasional yang hendak kita bangun dan wujudkan.*

⁵⁸Wan Usman, *Daya Tahan Bangsa*, Jakarta, Program Studi Pengkajian Ketahan Nasional Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003; hal

⁵⁹R.M.Sunardi, *PEMBINAAN KETAHANAN BANGSA, Dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan NKRI*, Jakarta, PT Kuaternita Adidarma, 2004; hal 63.

BAB III

TINJAUAN OBYEK PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti mengambil fokus penelitian pada suatu obyek, yaitu Komando Resort Militer 032/Wirabraja dan jajarannya sebagai salah satu Komando Kewilayahan TNI dan merupakan Sub Kompartemen Strategis yang berkedudukan di Kota Padang Sumatera Barat. Dalam tinjauan obyek penelitian ini peneliti akan menguraikan tentang ; “Organisasi dan Tugas Korem secara umum, Profil dan Sejarah Korem 032/Wirabraja, Organisasi dan Tugas Korem 032/Wirabraja sesuai Protap Penanggulangan Bencana, dan Gambaran Umum Propinsi Sumatera Barat, serta uraian singkat tentang bagaimana Sejarah Gempa Bumi Di Wilayah Sumatera Barat.

3.1. Organisasi dan Tugas Komando Resort Militer (Orgas Korem),⁶⁰ Secara Umum.

3.1.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Tugas-Tugas.

- a. Kedudukan. Komando Resosrt Militer disingkat Korem adalah Badan Pelaksana Kodam sebagai Subkompartemen Strategis matra darat yang bersifat kewilayahan dan berkedudukan langsung dibawah Pangdam.
- b. Tugas Pokok. Korem bertugas pokok menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan, menyelenggarakan pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan wilayahnya dalam rangka mendukung tugas-pokok Kodam.
- c. Tugas- Tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Korem menyelenggarakan tugas- tugas sebagai berikut:

- 1) Tugas (melaksanakan Fungsi Utama).

⁶⁰ Peraturan KASAD; Nomor Perkasad/17/IV/2008 Tanggal 8 April 2008 Tentang Orgas Korem; Hal 1-2.

a) **Pertempuran.** Menyelenggarakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan, yang berkenaan dengan penyelenggaraan pertempuran darat di wilayahnya, baik dengan kemampuan sendiri maupun diperkuat dalam rangka mengamankan kepentingan nasional di wilayahnya.

b) **Pembinaan Kekuatan Satuan** antara lain:

(1) **Penyiapan Kekuatan.** Menyelenggarakan penyiapan kekuatan Angkatan Darat yang mempunyai kemampuan Intel, Tempur, Binter dan kesiapan operasi pertahanan Negara di darat.

(2) **Pengembangan Kekuatan.** Mengembangkan kekuatan dan kemampuan satuan Angkatan Darat yang profesional dalam rangka penyelenggaraan pertahanan Negara di darat.

c) **Pembinaan Teritorial.** Menyelenggarakan segala usaha, perencanaan dan pengembangan, serta pengerahan dan pengendalian potensi geografi, demografi dan kondisi sosial dengan segenap aspeknya menjadi kekuatan meliputi ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh guna kepentingan pertahanan Negara di darat.

2) **Tugas (melaksanakan Fungsi Organik Militer).** Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang intelijen, operasi, personil, logistik, teritorial, perencanaan serta pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka mendukung tugas pokok Korem.

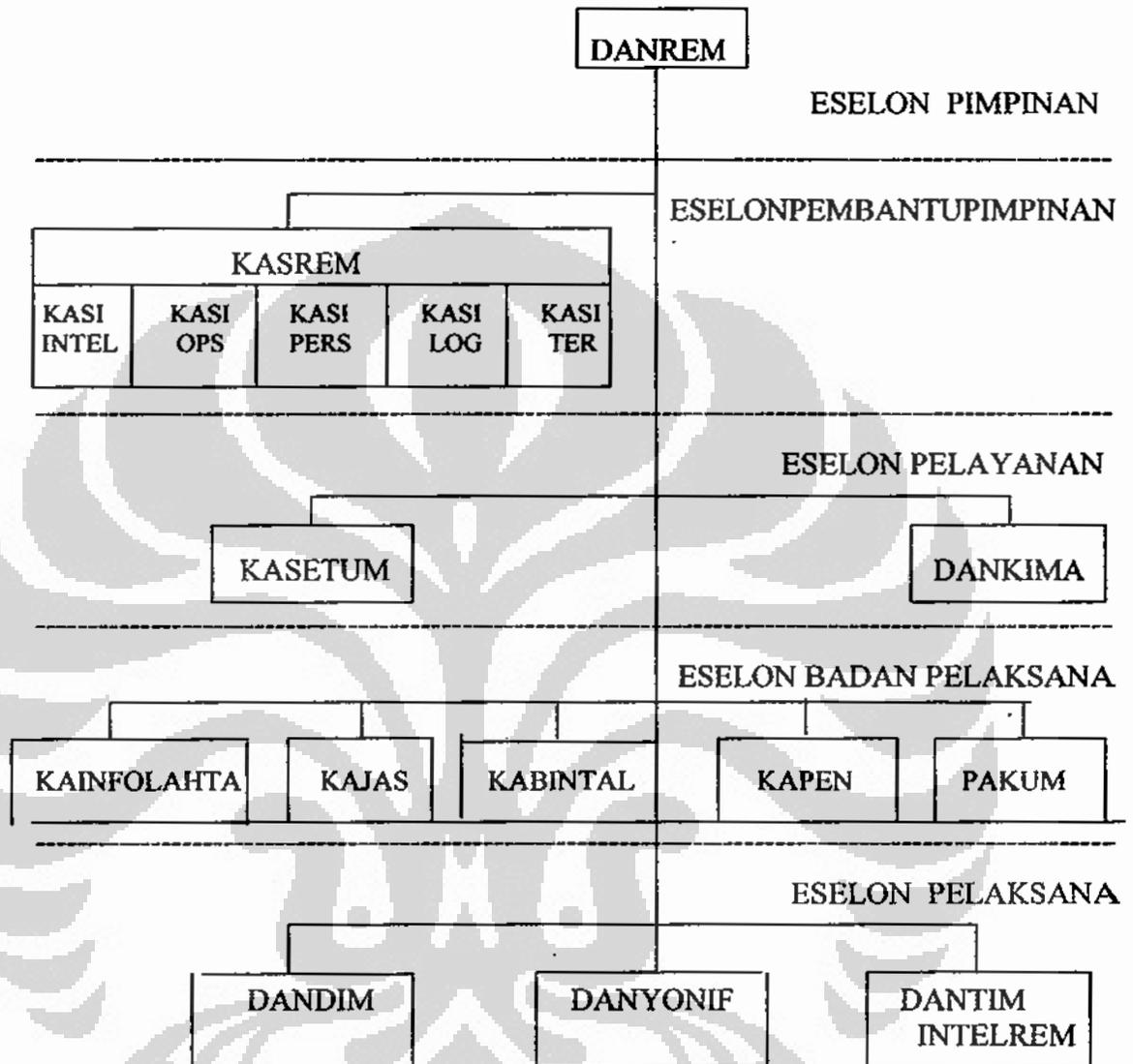
3) **Tugas (melaksanakan Fungsi Organik Pembinaan).** Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang latihan dalam rangka mendukung tugas pokok Korem.

3.1.2 Organisasi.

a. Susunan Organisasi. Organisasi Korem disusun dalam 5 (lima) Eselon dan Jabatan sebagai berikut:

- 1) Eselon Pimpinan. Komandan Komando Resort Militer, disingkat Danrem.
- 2) Eselon Pembantu Pimpinan.
 - a) Kepala Staf Korem, disingkat Kasrem.
 - b) Kepala Seksi Intelijen, disingkat Kasiintel.
 - c) Kepala Seksi Operasi, disingkat Kasiops.
 - d) Kepala Seksi Personil, disingkat Kasipers.
 - e) Kepala Seksi Logistik, disingkat Kasilog.
 - f) Kepala Seksi Teritorial, disingkat Kasiter.
- 3) Eselon Pelayan.
 - a) Kepala Sekretariat Umum, disingkat Kasetum.
 - b) Komandan Kompi Markas, disingkat Dankima
- 4) Eselon Badan Pelaksana.
 - a) Kepala Informasi dan Pengolahan Data, disingkat Kainfolaha.
 - b) Kepala Pembinaan Jasmani, disingkat Kajas.
 - c) Kepala Pembinaan Mental, disingkat Kabintal.
 - d) Kepala Penerangan, disingkat Kapen.
 - e) Perwira Hukum, disingkat Pakum.
- 5) Eselon Pelaksana.
 - a) Komandan Komando Distrik Militer, disingkat Dandim.
 - b) Komandan Batalyon Infanteri, disingkat Danyonif.
 - c) Komandan Tim Intel Korem, disingkat Dantimintelrem.

b. Struktur Organisasi (berdasarkan Eselon dan Jabatan).



3.2 Profil dan Sejarah Korem 032/ Wirabraja.⁶¹

3.2.1 Profil Korem 032/ Wirabraja.

a. Umum. Korem 032/Wbr sebagai Sub Kompartemen Strategis yang berkedudukan di Sumatera Barat sebagai bagian integral TNI-AD melaksanakan tugas pokok menegakkan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, khususnya di wilayah darat Sumbar. Korem 032/Wirabraja terbentuk sesuai dengan Surat Keputusan Kasad No. Kep/30/I/1985 tanggal 22 Januari 1985 dengan markas Komandonya berada di Kota Padang. Makna Sloka '**Wirabraja**', yakni *Prajurit sejati yang berani, ksatria yang siap siaga baik mental maupun fisiknya*. Jadi bila disimpulkan prajurit Korem 032/Wbr selalu siap, waspada dengan kemampuan dan kekuatan yang ada, menuju kesempurnaan dan kesuksesan dalam melaksanakan tugas agar mencapai kejayaan Nusa dan Bangsa yang berpedoman dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.⁶²

b. Tugas dan Kebijakan.⁶³

1) Tugas

a) Tugas Pokok Korem 032/Wbr. Korem 032/Wbr bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia di wilayah darat Sumbar dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

⁶¹ Sejarah Satuan Komando Resort Militer 032/Wirabraja, Padang Juni 2010

⁶² Infolahatrem 032/ Wbr, Profil dan Sejarah Korem 032/Wbr, Padang, Infolahatrem, Juni 2010.

⁶³ Ibid, hal 2.

b) Tugas-Tugas Korem 032/Wbr. Untuk melaksanakan tugas pokok Korem 032/Wbr tersebut, maka tugas-tugas Korem 032/Wbr dapat diuraikan sebagai berikut :

(1) Melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan di wilayah Korem 032/Wbr.

(2) Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah Korem 032/Wbr.

(3) Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan Matra Darat di wilayah Korem 032/Wbr.

(4) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat di wilayah Korem 032/Wbr.

2) Kebijakan Korem 032/Wbr. Untuk mencapai sasaran kegiatan yang ditetapkan agar mendapatkan hasil yang maksimal, perlu ditetapkan kebijakan-kebijakan pada setiap program yang akan dilaksanakan meliputi pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar satuan Korem 032/Wirabraja, serta anggaran.

c. Kondisi Wilayah.⁶⁴

1) Geografi. Secara geografis Provinsi Sumatera Barat terletak dipesisir barat pulau Sumatera dimana terdapat pertemuan lempengan Indo Australia dan Euroasia sehingga rawan gempa tektonik, pegunungan yang membentang dari Utara ke Selatan Bukit Barisan / perbukitan dan lembah dengan kondisi alam dan cuaca yang cukup ekstrim. Karakteristik wilayah tugas yang khas ini, membedakan dengan wilayah lainnya, dimana wilayahnya sebagian besar berada di daerah ketinggian berupa perbukitan, pegunungan dan dekat dengan wilayah pantai serta daerah kepulauan yaitu kepulauan Mentawai dan 2 pulau terluar yaitu pulau Sinyanyau dan pulau Sibaru-baru. Luas wilayah Sumatera Barat lebih kurang

⁶⁴ Ibid, hal 4- 5

49.778 Km². Karena posisi geografis tersebut ada bagian daerah tertentu yang rawan terhadap bencana alam dan longsor/galodo dimusim hujan.

2) Demografi. Jumlah penduduk 4.632.152 jiwa, terdiri dari laki-laki 2.285.480 jiwa, perempuan 2.346.672 jiwa, bermata pencarian sebagian besar penduduknya adalah pedagang, petani dan nelayan. Namun di daerah tujuan wisata seperti di beberapa bagian kota Padang dan kota Bukittinggi umumnya masyarakat bekerja di sektor pariwisata.

3) Kondisi Sosial. Sebagai Komando kewilayahan, Korem 032/Wirabraja memiliki ciri sosial kemasyarakatannya yang sangat agamis serta sangat menjunjung tinggi adat dan tradisi yang diwariskan oleh para leluhurnya. Segenap prajurit jajaran Korem 032/Wirabraja juga senantiasa menjunjung tinggi adat istiadat yang berlaku di daerah ini, sesuai dengan ungkapan pepatah di daerah ini, yang berbunyi "*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*", maka segenap prajurit di daerah ini selalu berbuat yang terbaik untuk kemajuan daerah Sumatera Barat khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Suku bangsa masyarakat di Sumatera Barat sebagian besar adalah suku Minang dengan mayoritas beragama Islam, sebagian kecil suku pendatang (suku Jawa, Batak, Bugis, Nias, Aceh, Melayu, dan etnis Cina).

d. Batas Wilayah Kewenangan dan Dislokasi Satuan.⁶⁵

1) Batas Wilayah Kewenangan. Batas-batas wilayah kewenangan Korem 032/Wirabraja di sebelah Utara berbatas dengan Tapanuli Selatan di sebelah Selatan berbatas dengan kabupaten Kerinci provinsi

⁶⁵ Ibid, hal 6- 7

Jambi, dan dan disebelah Timur berbatas dengan daerah Provinsi Riau atau wilayah Korem 031/Wirabima.

2) Dislokasi Satuan. Korem 032/Wirabraja merupakan Sub Kompartemen Strategis dengan wilayah teritorial kewenangannya membawahi wilayah provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 12 kabupaten dan 7 Kota sebagai wilayah pemerintahan, dan pada wilayah di bawah komando Korem tersebut tergelar 10 Kodim sebagai Satuan Teritorial Kewilayahan yang merupakan perpanjangan tangan Korem dalam penyelenggaraan pembinaan fungsi teritorial (Binter) di daerah. Adapun Kodim-kodim diwilayah Korem 032 /Wirabraja tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Kodim 0304/Agam berkedudukan di Bukit Tinggi.
- b) Kodim 0305/Pasaman berkedudukan di Lubuk Sikaping Pasaman Timur.
- c) Kodim 0306/50 Kota berkedudukan di Payakumbuh.
- d) Kodim 0307/Tanah Datar berkedudukan di Batu Sangkar.
- e) Kodim 0308/Pariaman berkedudukan di Pariaman.
- f) Kodim 0309/Solok berkedudukan di Solok.
- g) Kodim 0310/Swl Sjj berkedudukan di Sijunjung.
- h) Kodim 0311/Pesisir Selatan berkedudukan di Painan.
- i) Kodim 0312/Padang berkedudukan di Kota Padang.
- j). Kodim 0319/Mentawai berkedudukan di Tuapejat Kep Mentawai. .

Adapun Satuan-satuan Tempur di wilayah Korem 032 / Wirabraja adalah sebagai berikut :

- a) Batalyon Infanteri 131/Braja Sakti Berkedudukan di Payakumbuh.
- b) Batalyon Infanteri 133/ Yudha Sakti berkedudukan di Padang.

3.2.2 Sejarah Satuan Korem 032/ Wirabraja.

Setelah 25 tahun Kodam III/17 Agustus menjalankan tugasnya di daerah Sumatera Barat dan Riau, yang dimulai dari tanggal 17 April 1959 berdasarkan Surat Keputusan Kasad No. Kpts 265 / 1959 dengan Panglima Ahmad Yani, maka pada akhir tahun 1984 Kodam III/17 Agustus telah berhasil menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan sukses. Baik dalam tubuh Kodam III/17 Agustus sendiri maupun dalam menegakkan kedaulatan dan stabilitas di wilayah Sumbar dan Riau. Hasil yang menonjol sekali dalam tugas Kodam III/17 Agustus dalam wilayah jajarannya ialah pembangunan desa di Sumatera Barat. Kodam III/17 Agustus meliputi dua Propinsi yaitu : Propinsi Sumatera Barat dan Riau. Mempunyai 3 Satpur, 3 Banpur, 1 Unit Pendidikan dan Satuan Teritorial yaitu Korem 031/Wirabima, Korem 032/Wirabraja dan Korem 033/Wirayudha.

Berdasarkan kebijakan pimpinan TNI AD tentang rencana reorganisasi jajaran TNI-AD yang harus siap operasi pada bulan April 1986, maka mulai tahun anggaran 1984 / 1985 sudah diambil langkah langkah persiapan dan penyesuaian baik di bidang organisasi maupun pengembangan kekuatan. Secara umum penyederhanaan organisasi TNI-AD yaitu mengelompokkan beberapa fungsi untuk dibina oleh badan pelaksana pusat yang ditunjuk dan membagi wilayah Nusantara ke dalam Kodam dan 1 Kodam Ibu Kota. Tindak lanjut dari kebijakan tersebut maka langkah awal yang ditempuh Pangdam III/17 Agustus sesuai dengan perintah Kasad Nomor 1 tanggal 22 September 1984 tentang reorganisasi di lingkungan TNI-AD Dan Juklak Pangdam III/17 Agustus No. Juklak / 02 / VI /1984 tanggal 15 Juni 1984, maka Pangdam mengeluarkan perintah operasi No. 01 tanggal 29 0700 September 1984 yang isinya : Kodam III/17 Agustus melaksanakan penyusunan kembali struktur organisasi mulai hari H s.d 31 Maret 1985 dengan membentuk Usdalminpers PUSDALMINLOG dan PUSDALMINKU, melikuidasi Makodam, Korem 032, Korem 033 dan Korem Sumbar serta satuan lain diseluruh jajarannya, menyerahkan

Kodal Korem 032, Korem Sumbar, Yon Arhanudse-13, Denzipur-2 Subden Intel serta Subrapras kepada Kodam I/Bukit Barisan dalam rangka reorganisasi di lingkungan TNI- AD.

Pada tanggal 26 Januari 1985 bertempat dilapangan Imam Bonjol Padang, telah dilaksanakan Likuidasi Korem 032/Wirabraja dan Korem 033/Wirayudha dalam sebuah Upacara Militer, bertindak selaku Inspektur Upacara Pangdam III/17 Agustus Brigjen TNI Soeripto. Sejalan dengan Likuidasinya Korem 032/Wirabraja dan Korem 033/Wirayudha tersebut, Pangdam III/17 Agustus Brigjen TNI Soeripto melantik Kolonel Inf Iding Suwardi Nrp 19280 menjadi Danrem 032/Sumatera Barat yang kemudian berganti nama dengan Wirabraja sesuai dengan surat Keputusan Kasad No. Kep/ 30 / 1 / 1985 tanggal 22 Januari 1985 dan surat perintah Pangdam III/17 Agustus No Sprin / 91 / 1 / 1985 tanggal 23 Januari 1985. Sejak itu resmilah berdirinya Korem 032/Wirabraja yang berkedudukan di Padang .Wilayah Korem 032/Wirabraja meliputi wilayah Kodam III/17 Agustus kecuali wilayah Korem 031/Wirabima, dengan batas – batas wilayahnya sebagai berikut ; sebelah utara berbatas dengan Tapanuli Selatan,sebelah selatan berbatas dengan kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, dan sebelah timur berbatas dengan daerah Propinsi Riau atau wilayah Korem 031/Wirabima.

3.3 Organisasi Korem 032/ Wirabraja Sesuai Protap Penanggulangan Bencana Alam.

3.3.1 Umum. Penanggulangan bencana alam mengacu kepada Protap Penanggulangan Bencana Alam Korem 032/Wbr dan ketentuan yang berlaku pada masa tanggap darurat dilaksanakan secara serentak dengan skala prioritas.

3.3.2 Tugas Pokok. Korem 032/Wbr dengan perkuatannya melaksanakan Penanggulangan Bencana Alam gempa bumi, tanah longsor membantu penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,

pemulihan sarana dan prasarana umum serta perlindungan terhadap kelompok rentan mulai hari “ H “ sampai dengan H + 31 di wilayah Korem 032/Wbr dalam rangka membantu BPBD Provinsi Sumatera Barat dalam pemulihan kondisi wilayah.

3.3.3 Organisasi :

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| a. Penanggung jawab | : | Pangdam I/BB |
| b. Dansatgas | : | Danrem 032/Wbr |
| c. Wadan Satgas | : | Kasrem 032/Wbr |
| d. Kordinator Wilayah | : | 1) Dandim 0304/Agam
2) Dandim 0308/Pariaman
3) Dandim 0312/Padang |
| e. Koord Bid Pam Org Asing | : | Kasi Intel Rem 032/Wbr |
| f. Koord Bid Operasional | : | Kasi Ops Rem 032/Wbr |
| g. Koord Bid Protokoler | : | Kasi Pers Rem 032/Wbr |
| h. Koord Bid Logistik | : | Kasi Log Rem 032/Wbr |
| i. Koord Bid Asessment | : | Kasi Ter Rem 032/Wbr |
| j. Koord Bid kesehatan | : | Danden Kesyah |
| k. Koord Bid Distribusi | : | Danden Bekang |
| l. Koord Bid Angkutan | : | Dandenpal 1/5 |
| m. Koord Bid Rolakir | : | Danden Pom I/4 Padang |
| n. Koord Bid Kom/Hub | : | Danden Hub |
| o. Koord Bid Rehabilitasi | : | Danden Zibang 1/5 |
| p. Koord Bid Penerangan Media | : | Kapenrem 032/Wbr |
| q. Koord Bid Pasang Tenda | : | Dankima Rem 032/Wbr. ⁶⁶ |

⁶⁶ Korem 032/Wbr, *Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi dan Tanah Longsor Di Wil Rem/032Wbr Prov Sumbar*, Padang, Oktober 2009

3.4. Gambaran Umum Wilayah Propinsi Sumatera Barat.⁶⁷

3.4.1 Geografis.

Wilayah Sumatera Barat terletak antara 0 derajat Lintang Utara hingga 3 derajat Lintang Selatan, serta 98 derajat dan 101 derajat Bujur Timur. Wilayah Sumatera Barat dilalui oleh garis khatulistiwa (garis lintang nol derajat), tepatnya berada di kecamatan Bonjol kabupaten Pasaman Barat, kondisi ini menyebabkan wilayah Sumatera Barat beriklim tropis. Luas wilayah sekitar 4.229.730 Ha, setara dengan 2,17 % dari luas wilayah Negara Kasatuan Republik Indonesia, dengan luas perairan laut diperkirakan 186.500 Km² dan panjang garis pantai 2.420.57 Km. Keadaan topografi wilayah Sumatera Barat bervariasi, mulai dari wilayah datar, landai, bergelombang serta wilayah dengan kondisi alam yang terjal/curam dan berbukit. Suhu udara rata-rata di pantai Sumatera Barat berkisar antara 21 sampai 38 derajat celcius, daerah perbukitan berkisar antara 15 sampai 34 derajat celcius, sedangkan pada daerah datar di sebelah timur Bukit Barisan dengan suhu antara 19 sampai 34 derajat celcius. Hampir setiap tahun di Sumatera Barat terjadi dua puncak curah hujan maksimum, yaitu pada bulan Maret dan Desember. Curah hujan paling rendah terjadi pada bulan Juni/Juli. Jumlah curah hujan rata-rata maksimum mencapai 4000 mm/tahun terutama di wilayah pantai barat, sedangkan di beberapa tempat di bagian timur curah hujan relatif kecil antara 1500 sampai 2000 mm/tahun. Batas-batas wilayah Sumatera Barat dengan propinsi lainnya; Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Sumatera Utara, Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Bengkulu dan Jambi, dan Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Jambi dan Riau, serta Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia

⁶⁷ http://pakguruonline.pendidikan.net/rppd_2006_2010_bab_ii.html

3.4.2 Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota.

Propinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 daerah kabupaten dan kota, dengan rincian , 13 daerah Kabupaten dan 6 daerah Kota. Dari 19 daerah ini terbagi lagi atas 158 daerah kecamatan. Jumlah daerah kecamatan pada setiap kabupaten dan kota sebagai berikut : Nama Daerah Kabupaten/Kota dan Jumlah Kecamatan se Sumatera Barat

No	Daerah Kabupaten dan Kota	Jumlah Kecamatan
1	Kabupaten Agam	15
2	Kabupaten Pasaman	12
3	Kabupaten Pasaman Barat	7
4	Kabupaten Limapuluh Kota	13
5	Kabupaten Solok	14
6	Kabupaten Solok Selatan	5
7	Kabupaten Padang Pariaman	17
8	Kabupaten Pesisir Selatan	11
9	Kabupaten Tanah Datar	14
10	Kabupaten Sawahlunto Sijunjung	8
11	Kabupaten Darmasraya	4
12	Kabupaten Kepulauan Mentawai	4
13	Kota Bukittinggi	3
14	Kota Padang	11
15	Kota Padang Panjang	2
16	Kota Sawahlunto	4
17	Kota Solok	2
18	Kota Payakumbuh	3
19	Kota Pariaman	3

Sumber : Profil Pendidikan Kab/Kota 2005/2006

3.4.3 Gambaran Umum Penduduk Sumatera Barat⁶⁸

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat sementara adalah 4.845.998 orang, yang terdiri atas 2.404.472 laki-laki dan 2.441.526 perempuan. Dari hasil SP2010 tersebut tampak bahwa sebaran penduduk Sumatera Barat 73,10 persen berada di daerah Kabupaten dan 26,90 persen berada di Kota. Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan 3 (tiga) daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang merupakan daerah dengan jumlah penduduk paling kecil. Dengan luas wilayah Provinsi Sumatera Barat sekitar 42.130,82 kilo meter persegi yang didiami oleh 4.845.998 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 115 orang per kilo meter persegi. Kota yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kota Bukit Tinggi yakni sebanyak 4.656 orang per kilo meter persegi sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai yakni sebanyak 13 orang per kilo meter persegi. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Sumatera Barat per tahun selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000-2010 sebesar 1,34 persen. LPP Kabupaten Dharmasraya adalah yang tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sumatera Barat yakni sebesar 3,09 persen, sedangkan LPP terendah di Kabupaten Tanah Datar yakni 0,33 persen. Angka pertumbuhan penduduk yang berada di bawah LPP Provinsi adalah Pesisir Selatan 0,93 persen, Kabupaten Solok 0,83 persen, Tanah Datar 0,33 persen, Padang Pariaman 0,70 persen, Agam 0,93 persen, Lima Puluh kota 1,10 persen, Pasaman 1,23 dan Kota Sawahlunto 1,10 persen. Umumnya LPP di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan LPP Provinsi yaitu Kota Padang 1,57 persen, Kota Solok 2,12 persen, Padang Panjang 1,59 persen, Bukittinggi 1,89 persen, Payakumbuh 1,79 persen dan Pariaman 1,35 persen.

⁶⁸ <http://www.bps.go.id/hasilSP2010/sumbar/1300.pdf>

3.4.4 Budaya Gotong Royong di Sumatera Barat.

Bencana alam tentu menimbulkan suatu tekanan bagi masyarakat suatu wilayah yang menjadi korban. Sumatera Barat sebagai salah satu daerah korban bencana alam yang sangat dasyat, yakni gempa bumi 30 September 2009 di Barat Daya Pariaman dan gempa bumi yang diikuti gelombang tsunami 25 Oktober 2010 yang lalu, telah menelan korban jiwa dan kerugian harta yang sangat besar jumlahnya. Musibah ini menjadi cobaan berat dan berdampak buruk terhadap kehidupan sosial masyarakat Minangkabau, baik dari segi materil maupun aspek spiritual berupa trauma yang timbul pasca gempa. Keadaan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut begitu saja, Sumatera Barat sekarang tengah berbenah diri untuk melakukan Pembangunan dalam konteks rehabilitasi maupun rekonstruksi. Upaya pembangunan suatu komunitas masyarakat dari musibah tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan usaha satu atau beberapa pihak saja. Semua ikut andil dalam mencapai keberhasilan pemulihan kondisi wilayah pasca bencana, baik upaya yang dilakukan pemerintah, TNI/Polri serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Barker (1984;37) dalam Soelaeman, M. (2001), kebudayaan dipandang sebagai penciptaan dan perkembangan nilai meliputi segala apa yang ada di dalam fisik, personal dan sosial, yang disempurnakan untuk realisasi tenaga manusia dan masyarakat. dengan adanya kebudayaan dapat tercipta suatu sistem budaya yang menjadi landasan normatif masyarakat dalam melakukan aktivitas sosial. Suatu budaya bukan dinilai dari kuantitatif semata akan tetapi yang menentukan adalah kesatuan, sintesis, atau konfigurasi nilai-nilai yang wajar. Budaya dapat muncul karena adanya keterikatan baik itu secara lahiriah contohnya budaya berasal dari masyarakat yang tinggal dalam satu lingkungan geografis yang sama.

Penduduk Sumatera Barat yang dikenal dengan masyarakat Minangkabau memiliki suatu budaya yang masih berlaku sampai saat ini yaitu “budaya gotong royong”. Budaya gotong royong ini telah menjadi filosofi adat-istiadat masyarakat minang sebagai dampak positif dari fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Budaya gotong royong di Sumatera Barat ini menurut *Audrey Kahin* dalam bukunya “*Dari Pemberontakan ke Integrasi*”; mengatakan bahwa, berkurangnya jumlah desa di Sumatera Barat dikaitkan dengan usaha untuk memperkuat kerja sama diantara tokoh- tokoh tradisonal pedalaman (Ninik Mamak), ulama, dan cerdas pandai (Intelektual), pejabat pemerintah dan penduduk setempat dalam program kerja sama pembangunan. Hal ini sudah dimulai sejak gubernur Anas, dengan nama “*Manunggal Sakato*”. Dalam program manunggal sakato, “Nagari” kembali diberi peran strategis dalam kebijakan pembangunan pedesaan.⁶⁹ Semangat gotong royong dengan slogan manunggal sakato ini masih tetap terlihat pada upaya penanggulangan bencana yang menimpa wilayah Sumatera Barat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir ini. Pada dasarnya kegiatan kerjasama yang lebih dikenal dengan istilah gotong royong telah menjadi filosofi dalam Minangkabau. Budaya gotong royong telah lama diterapkan masyarakat Sumatera Barat dalam memenuhi kebutuhannya baik itu yang bersifat individual maupun kelompok, sejalan dengan pepatah minang, yang berbunyi; “*barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang*”. Dahulunya semangat kebersamaan ini telah ada, contohnya dalam pembangunan *Rumah Gadang*. Dengan bersama-sama rumah gadang yang menjadi simbol suatu keluarga besar dapat dibangun dengan megah dan dalam jangka waktu yang tidak begitu lama. Sudah tepat pula kiranya masyarakat Minangkabau menerapkan kerjasama atau gotong royong ini dalam membangun kembali Sumatera Barat pasca bencana dengan mengikut sertakan semua lapisan masyarakat, pemerintah mulai dari provinsi, kota,

⁶⁹ Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008, hal 414.

kabupaten, dan unsur TNI , serta pemuka adat dan agama, sehingga Sumatera Barat dapat dibangun kembali sesuai harapan.

Jika ditelaah lebih lanjut, maka budaya dapat menjadi satu faktor penentu keberhasilan pertahanan dan pembangunan nasional. Dalam pembangunan dan ketahanan nasional tidak hanya diperlukan faktor ekonomi. Nurkse dalam bukunya *Lectures on Economic Development* juga mengatakan bahwa “ dalam pembangunan ekonomi, faktor sosial budaya, politik dan psikologi adalah sama pentingnya dengan faktor ekonomi” (Usman, W, 1997.). Jadi faktor budaya dapat menjadi penentu keberhasilan pembangunan suatu Negara, terutama pembangunan suatu wilayah pasca terjadinya bencana seperti yang kita bahas di atas. dalam perspektif Ketahanan Nasional.⁷⁰

3.4.5 Agama, Suku dan Bahasa.

Sebahagian besar penduduk Sumatera Barat beragama Islam, namun kehidupan beragama masyarakat Sumatera Barat yang sangat toleran dan menghargai adanya perbedaan, pelaksanaan ibadah bagi penduduk pemeluk agama lainnya berjalan dengan baik dan damai, hampir tidak ditemukan permasalahan antar pemeluk agama di Sumatera Barat, dalam menjalankan ibadah menurut kepercayaan masing-masing. Mayoritas suku dan bahasa di Sumatera Barat adalah Suku dan bahasa Minangkabau, yang sangat menghargai nilai-nilai adat dan budaya tradisional serta terbuka terhadap nilai positif lainnya yang datang dari luar, kondisi ini sangat memberikan pengaruh baik terhadap penyelenggaraan pendidikan di Sumatera Barat. Suku dan bahasa lainnya yang berkembang di Sumatera Barat, antara lain Suku Mentawai di Kepulauan Mentawai, Suku Mandailing di Pasaman, Suku Jawa terutama sekali di daerah transmigrasi dan pertambangan, serta kelompok etnis Tiongha. Interaksi sosial masyarakat antar suku yang dapat terjaga

⁷⁰<http://dendiagusti.blogspot.com/2010/12/budaya-gotong-royong-dalam-pembangunan.html>

dengan baik menjadi dasar bagi peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa di Sumatera Barat.

Dibidang budaya, sinergi antara nilai-nilai adat dan agama, serta nilai modern universal yang positif, diungkapkan dengan ungkapan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, dan *Tali Tigo Sapalin, Tunggu Tigo Sajaringan*, yang menggambarkan keterpaduan kepemimpinan ninik mamak, alim ulamo dan cerdik pandai yang disertai sikap pragmatisme dan kewirausahaan masyarakat, merupakan modal dasar pengembangan materi kurikulum yang adaptif dengan kondisi sosial masyarakat Minang khususnya dan masyarakat Sumatera Barat pada umumnya.

3.4.6 Prioritas Pembangunan Sumatera Barat.

Prioritas pembangunan Sumatera Barat, merupakan implementasi dari visi pembangunan 2006-2007, dimana rumusan visi ini sebelumnya disusun dan ditetapkan berdasarkan kajian permasalahan, tantangan, serta potensi yang dimiliki. Rumusan visi pembangunan Sumatera Barat 2006-2007, adalah *Mewujudkan Sumatera Barat yang tangguh, bersih dalam semangat kebersamaan*. Selanjutnya visi ini dijabarkan dalam tiga aspek pembangunan, yakni : “terwujudnya masyarakat relegius yang maju dan berbudaya, terwujudnya pemerintahan yang menjunjung tinggi hukum, adil dan demokratis terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan kehidupan yang layak secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat yang relegius yang maju dan berbudaya, maka pengembangan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama serta peningkatan sumber daya manusianya menjadi sangat penting. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang sejahtera, sehat penuh semangat, mandiri, terampil, profesional, disiplin, menjunjung tinggi hukum, kreatif dan inovatif serta berbudaya dan mampu mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan serta teknologi dalam meningkatkan harga diri dan kesejahteraannya.

Dari rumusan visi diatas, jelas sekali komitmen dan keinginan Pemerintah Daerah beserta masyarakat Sumatera Barat untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas guna mengantisipasi keterbatasan sumber daya alam yang tersedia, disamping mempersiapkan masyarakat Sumatera Barat agar mampu bersaing dalam berbagai lapangan kehidupan kedepan baik ditingkat nasional maupun global. Berdasarkan visi dan misi pembangunan Sumatera Baat 2006-2010, selanjutnya ditetapkan agenda-agenda utama pembangunan serta prioritas program; “meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan sosial budaya, membangun sumber daya manusia yang berkualitas, menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih, membangun ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, mengembangkan infrastruktur yang mendorong percepatan pembangunan, dan mempercepat penurunan tingkat kemiskinan, serta memberdayakan Nagari sebagai basis pembangunan ;

3.5. Sejarah Gempa Bumi Di Wilayah Sumatera Barat

Propinsi Sumatera Barat secara geografis terletak antara $0^{\circ} 45'$ LU dan $3^{\circ} 30'$ LS serta $98^{\circ} 36'$ dan $11^{\circ} 53'$ BT memiliki luas daerah 42,2 ribu Km², terdiri dari 19 Kab/Kota (12 Kab dan 7 Kota), dilalui garis Khatulistiwa tepatnya di Kecamatan Bonjol Kab. Pasaman Propinsi Sumatera Barat, beriklim tropis dengan suhu udara dan kelembaban yang tinggi. Letak geografis Sumatera Barat merupakan pertemuan tiga Lempeng raksasa Dunia yaitu lempeng Tektonik Indo-Australia, lempeng Eurasia dan lempeng Philipina yang sangat rawan dan berpotensi menimbulkan gempa bumi Tektonik dan Tsunami⁷¹. Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang terletak di bagian barat Pulau Sumatera merupakan bagian dari Lempeng Eurasia yang bergerak sangat lambat dan relatif ke arah tenggara dengan kecepatan sekitar 0,4 cm/tahun. Relatif berada di bagian barat provinsi ini, terdapat interaksi antara Lempeng Eurasia dan Lempeng Samudera Hindia yang bergerak relatif ke arah utara

⁷¹ Korem 032/Wbr, *Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi dan Tanah Longsor Di Wil Rem/032Wbr Prov Sumbar*, Padang, Oktober 2009.

dengan kecepatan mencapai 7 cm/tahun. Interaksi ini menghasilkan pola penunjaman atau subduksi menyudut (*oblique*), yang diperkirakan telah terbentuk sejak Zaman Kapur dan masih terus berlangsung hingga kini. Selain subduksi, interaksi kedua lempeng ini juga menghasilkan pola struktur utama Sumatera, yang dikenal sebagai Zona Sesar Sumatera dan Zona Sesar Mentawai. Wilayah barat Pulau Sumatera merupakan salah satu kawasan yang terletak pada pinggiran lempeng aktif (*active plate margin*) dunia yang dicerminkan tingginya frekuensi kejadian gempa bumi di wilayah ini. Sebaran gempa bumi di wilayah ini tidak hanya bersumber dari aktivitas zona subduksi, tetapi juga dari sistem sesar aktif di sepanjang Pulau Sumatera.⁷²

Berdasarkan catatan data sejarah kegempaan, daerah Sumatera Barat memang sudah berapa kali mengalami gempa bumi merusak. Sejak tahun 1822 hingga 2009 telah terjadi setidaknya 14 kali kejadian gempa bumi kuat dan merusak di Sumatera Barat, diantaranya menyebabkan tsunami. Sejarah panjang gempa bumi merusak di Sumatera Barat, diantaranya adalah Gempa bumi Padang (1822, 1835, 1981, 1991, 2005), Gempabumi Singkarak (1943), Gempa bumi Pasaman (1977) dan Gempa bumi Agam (2003). Sedangkan gempa bumi yang diikuti gelombang tsunami terjadi di Mentawai (1861) dan Sori-Sori (1904)⁷³. Catatan paling tua menunjukkan bahwa di Padang pada tahun 1822 telah terjadi gempa bumi kuat yang diikuti suara gemuruh yang berpusat di antara Gunung Talang dan Gunung Merapi. Penelitian di pesisir barat Padang yang dilakukan Danny Hilman dan Kerry Sieh dari California Institute of Technology Amerika Serikat, berhasil mengungkap terjadinya gempa dan tsunami di Padang. Berdasarkan data sejarah, tsunami pernah menerjang Padang pada 10 Februari 1797 akibat gempa bermagnitude momen 8,4 hingga menewaskan sekitar 300 orang. Namun dari penelitian pada kondisi terumbu karang diketahui, terjadi terjangan tsunami kedua pada 29 Januari 1833 dengan kekuatan 9,0. Tidak ada catatan berapa jumlah korban jiwa ketika itu.⁷⁴ Meski tidak ada laporan secara rinci

⁷²<http://nrahmanifa.files.wordpress.com/2010/11/101025sumatraeq-bmkg.pdf>

⁷³ Lihat dalam situs internet <http://www.mailarchive.com/porsenipar@opja.or.id/msg01740.html>

⁷⁴ Kompas, *Ilmu pengetahuan & Teknologi, Gempa Besar Masih Mengancam*, Jakarta, Rabu 27 Oktober 2010; hal 14

menyebutkan, namun gempa bumi ini dilaporkan menimbulkan kerusakan parah dan korban jiwa cukup banyak. Pada tanggal 28 Juni 1926, gempa bumi dahsyat 7.8 Skala Richter juga dilaporkan pernah mengguncang Padang Panjang. Akibat gempabumi ini tercatat korban tewas lebih dari 354 orang. Kerusakan parah terjadi di sekitar Danau Singkarak, Bukit Tinggi, Danau Maninjau, Padang Panjang, Kabupaten Solok, Sawah Lunto dan Alahan Panjang. Gempa bumi susulan mengakibatkan kerusakan pada sebagian wilayah Danau Singkarak. Tercatat di Kabupaten Agam sebanyak 472 rumah roboh, 57 orang tewas dan 16 orang luka berat. Di Padang Panjang sebanyak 2.383 rumah roboh, 247 orang tewas. Dampak gempa bumi juga menimbulkan banyak tanah terbelah, longsor di Padang Panjang, Kubu Krambil dan Simabur. Gempa bumi kuat dengan magnitudo 5.6 Skala Richter juga pernah terjadi pada 16 Pebruari 2004. Getaran gempa bumi ini dirasakan di sebagian besar daerah Sumatera Barat hingga pada VI MMI (Modified Mercalli Intensity) yang menimbulkan korban tewas sebanyak 6 orang dan meluluhlantakkan ratusan bangunan rumah di Kabupaten Tanah Datar. Selang beberapa hari kemudian, tepatnya pada 22 Pebruari 2004, gempa bumi yang lebih besar kembali mengguncang Sumatera Barat dengan magnitudo 6 Skala Richter. Gempa bumi ini mengakibatkan satu orang korban tewas dan beberapa orang luka parah serta ratusan rumah rusak berat di Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan data sejarah gempa bumi Sumatera, dalam 100 tahun terakhir, sudah sekitar 20 gempa besar dan merusak terjadi zona patahan ini. Berdasarkan penelitian, aktivitas gempa bumi di patahan Semangko rata-rata sekitar 5 tahun sekali. Meskipun gempa bumi di zona patahan ini magnitudonya relatif kecil, namun dampaknya bisa sangat berbahaya disebabkan sumbernya di daratan yang berdekatan dengan kawasan pemukiman. Sebagai kawasan yang sangat rawan gempa bumi, Daerah Sumatera Barat akan selalu menjadi kawasan yang sering diguncang gempa bumi. Jatuhnya banyak korban gempa bumi sebenarnya disebabkan karena kurang pemahamnya masyarakat dalam menghadapi gempa bumi.⁷⁵

Terkait dengan kondisi geografis daerah Sumatera Barat pada tanggal 30 September 2009 terjadi gempa bumi berkekuatan 7,9 SR dengan pusat gempa berada

⁷⁵ibid.

57 km sebelah Barat Daya Pariaman. Pada kedalaman 71 Km di koordinat $0^{\circ} 84'$ LS- $99^{\circ} 65'$ BT. Gempa Tektonik ini telah menimbulkan kerusakan Infrastruktur cukup parah dan korban jiwa yang besar di beberapa wilayah Propinsi Sumatera Barat, untuk daerah yang terparah Kota Padang, Kota Pariaman, Kab. Padang Pariaman dan Kab. Agam. Dari hasil pengamatan langsung penulis sampai akhir oktober 2010 yang lalu, masih banyak infrastruktur bangunan baik milik masyarakat maupun pemerintah yang belum direhabilitasi maupun direkonstruksi, karena memang secara kuantitas jumlahnya sangat besar, sehingga butuh waktu, biaya dan tenaga dari segenap komponen bangsa untuk memulihkan kondisi fisik maupun psikis di wilayah Sumatera Barat ini. Belum lagi pulih trauma kegempaan yang menimpa wilayah Sumatera Barat yang terjadi pada 30 September 2009 yang lalu, terjadi lagi Gempa bumi yang di ikuti gelombang tsunami di wilayah Mentawai pada tanggal 25 Oktober 2010, magnitudo 7.2 SR, lokasi 3.61 LS - 99.93 BT, 78 km Barat Daya Pagai Selatan, Mentawai - Sumatera Barat. Memenuhi kriteria sebagai gempa bumi yang menimbulkan tsunami (Magnitudo > 7.0 SR, posisi dilaut, kedalaman < 33 km). Gempabumi ini merupakan gempa tektonik yang diakibatkan oleh tumbukan lempeng Samudera Indo Australia terhadap lempeng benua Eurasia dengan mekanisme sumber berupa patahan naik (*thrust fault*).⁷⁶

⁷⁶<http://nrahmanifa.files.wordpress.com/2010/11/101025sumatracq-bmkg.pdf>

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kebijakan Nasional Dalam Penanggulangan Bencana

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Implementasi dari amanat Undang- Undang tersebut dilaksanakan melalui pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan *perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*.

Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang hidup saling berdampingan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai cermin persatuan yang dapat dijadikan modal dasar pembangunan bagi tumbuh dan kembangnya bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan, hambatan, dan ancaman kehidupan yang semakin komplek. Persatuan yang terjalin selama ini harus selalu dijaga keutuhan dan kelestariannya oleh seluruh komponen warga negara Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap tantangan, hambatan, dan ancaman terhadap salah satu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah kepulauan yang terletak diantara benua Asia dan Australia disamping memiliki posisi strategis dalam jalur lalu lintas perdagangan dunia juga memiliki kerawanan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga diperlukan penanggulangan bencana yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi.⁷⁷

⁷⁷Lihat Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya, karena belum ada undang-undang yang secara khusus menangani bencana. Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana, disusunlah Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana (UU No. 24 Tahun 2007) yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Materi muatan Undang-undang ini berisikan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:⁷⁸

4.1.1 Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

4.1.2 Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan penanggulangan bencana tersebut terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas dan fungsi antara lain pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya.

4.1.3 Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan perlindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

⁷⁸ Lihat; *Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana*

4.1.4 Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan kesempatan secara luas kepada lembaga usaha dan lembaga internasional.

4.1.5 Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing-masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda.

4.1.6 Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain didukung dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga disediakan dana siap pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus.

4.1.7 Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana.

4.1.8 Untuk menjamin ditaatinya undang-undang ini dan sekaligus memberikan efek jera terhadap para pihak, baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan sehingga menyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan kerugian, baik terhadap harta benda maupun matinya orang, menghambat kemudahan akses dalam kegiatan penanggulangan bencana, dan penyalahgunaan pengelolaan sumber daya bantuan bencana dikenakan sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, dengan menerapkan pidana minimum dan maksimum.

Dengan materi muatan sebagaimana disebutkan diatas, Undang-Undang ini diharapkan dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu dalam penanggulangan bencana, sehingga undang-undang ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Dalam upaya penanganan bencana yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi, Pemerintah telah mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-

undang tersebut dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik bencana tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun tingkat nasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4; bertujuan untuk antara lain :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 memberikan keseimbangan perhatian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari semula cenderung pada pertolongan dan pemberian bantuan kepada upaya-upaya penanganan sebelum terjadi bencana. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ruang lingkupnya meliputi:

- a. semua upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pada saat prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana;
- b. penitikberatan upaya-upaya yang bersifat preventif pada prabencana;
- c. pemberian kemudahan akses bagi badan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat; dan
- d. pelaksanaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pada pascabencana.

Untuk menindaklanjuti pelaksanaan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang pada dasarnya berisi tentang kedudukan, tugas fungsi BNPB, Organisasi BNPB itu sendiri, dan lain- lain yang menyangkut mekanisme kerja, pengangkatan dan pemberhentian serta pembiayaan. Adapun kebijakan umum tentang BNPB sesuai Perpres No. 8/2008 ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BNPB
 - 1) Kedudukan

a) Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya dalam Perpres ini disebut dengan BNPB adalah lembaga pemerintah non departemen sebagaimana dimaksud dalam UU No.24/2007 tentang penanggulangan bencana.

b) BNPB berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

c) BNPB dipimpin oleh seorang Kepala.

2) Tugas BNPB.

a) Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan merata.

b) Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang- undangan.

c) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.

d) Menggunakan dan mempertanggung jawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional.

e) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN.

f) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan

g) Menyusun pedoman pembentukan BPBD.

3) Fungsi BNPB:

a) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertidak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan

b) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan meyeluruh.

c) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BNPB dikoordinasikan oleh Menkokesra.

b. Organisasi.

1) Susunan Organisasi BNPB.

- a) Kepala
- b) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
- c) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.

2) Kepala. Kepala mempunyai tugas memimpin BNPB dalam menjalankan tugas dan fungsi BNPB.

3) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.

a) Kedudukan, Tugas dan Fungsi.

(1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPB.

(2) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas memberikan masukan dan sarana kepada Kepala BNPB dalam penanggulangan bencana.

(3) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :

- (a) Perumusan Konsep kebijakan penanggulangan bencana nasional.
- (b) Pemantauan.
- (c) Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

b) Keanggotaan. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala BNPB dan 19 (Sembilan belas) anggota, terdiri dari :

(1) 10 (sepuluh) Pejabat Pemerintah Eselon I atau yang setingkat, yang diusulkan oleh Pimpinan Lembaga Pemerintah, mewakili :

- (a) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

- (b) Departemen Dalam Negeri;
 - (c) Departemen Sosial;
 - (d) Departemen Pekerjaan Umum;
 - (e) Departemen Kesehatan;
 - (f) Departemen Keuangan;
 - (g) Departemen Perhubungan;
 - (h) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - (i) Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - (j) Tentara Nasional Republik Indonesia.**
- (2) 9 (Sembilan) anggota masyarakat profesional, berasal dari para pakar/ profesional/ dan/atau tokoh masyarakat.
- 4) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.
- a) Kedudukan, Tugas dan Fungsi.
 - (1) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BNPB.
 - (2) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
 - (3) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :
 - (a) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - (b) Komando penyelenggaraan penanggulangan bencana dan;
 - (c) Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - b) Susunan Organisasi. Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Penanggulangan bencana terdiri dari :
 - (1) Sekretaris Utama;

- (2) Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- (3) Deputi Bidang Penanganan Darurat;
- (4) Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- (5) Deputi Bidang Logistik dan Peralatan;
- (6) Inspektorat Utama;
- (7) Pusat;
- (8) Unit Pelaksana Teknis.

Walaupun kebijakan nasional penanggulangan bencana sudah ditetapkan pemerintah dan selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman dalam satu dekade 10 tahun terakhir ini, namun ternyata kebijakan tersebut belum mampu merespon secara maksimal upaya penanggulangan bencana yang terjadi. Masih segar dalam ingatan kita betapa tsunami telah meluluhlantakkan Aceh pada 2004 yang lalu. Ketidaksiapan kita menghadapi bencana besar masih saja terus terjadi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dibentuk mulai tahun 2008 sesuai amanat Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (BAKORNAS PB) tahun 2005, yang sebelumnya Bakornas PB ini juga merupakan penyempurnaan dari organisasi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP) yang dibentuk tahun 2001; kelihatan tidak memiliki otoritas tunggal dan tidak berdaya untuk menghadapi sebuah bencana, sehingga perubahan organisasi yang terjadi dalam kurun waktu 10 (sepuluh tahun) terakhir ini justru tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan bagi upaya penanggulangan bencana yang komprehensif.

Manajemen penanggulangan bencana masih amburadul karena BNPB belum bekerja efektif. Badan itu seperti linglung menghadapi bencana yang datang silih berganti akibat tidak mendapat dukungan organisasi dan dana dari daerah. Ketidakmampuan BNPB sangat kentara. Itu terlihat dalam penanganan bencana tsunami yang menerjang Kepulauan Mentawai pada 25 Oktober 2010 dan letusan gunung Merapi pada 26 Oktober 2010. Mayat-mayat di Mentawai masih bergelimpangan sehingga bau mayat menyengat di mana-mana. Distribusi

bantuanpun tersendat. BNPB juga mengakui kacau balaunya penanganan pengungsi. Menurut Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Sugeng Triutomo, sesuai UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, setiap kabupaten /kota mesti memiliki BPBD. Namun dari 530 kabupaten/kota, ternyata 359 daerah belum memiliki BPBD. Di tingkat propinsi baru 28 dari 33 propinsi yang membentuk BPBD.⁷⁹ Menurut *Yudha Luqianto Ketua Tahnas Konas Resimen Mahasiswa Jakarta* yang selalu terlibat dalam relawan BNPB diberbagai daerah mengatakan bahwa; sebagai organisasi baru, pengisian personel BNPB kebanyakan diambil/diminta dari berbagai Kementerian Negara/LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen). Seyogyanya yang diberikan para personel terbaik, akan tetapi kenyataannya malah sebaliknya.⁸⁰ Disamping itu kalau dianalisa secara proporsional, mana mungkin Kementerian Negara/ Lembaga/Pemerintah Non Departemen (KN/LPND) akan memberikan personel terbaiknya untuk dipindahkan atau diperbantukan ke BNPB, sementara KN/LPND sudah mendidik dan membina mereka untuk menjadi tulang punggung organisasi, yang tentunya sudah menyedot biaya, tenaga dan pikiran, setelah jadi dan siap pakai malah diminta insitusi lain.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengusulkan agar TNI menjadi bagian dari BNPB. Ini dilihat atas pantauan penanganan bencana di Wasior, Papua Barat, tsunami Mentawai, dan erupsi gunung Merapi. Menurut beliau :

“BNPB selama ini belum bisa bekerja secara efektif, terlihat belum bakunya Standar Operasional Prosedur dan tidak memadainya sumber daya manusia dilapangan hingga birokrasi yang masih ruwet. Sementara relawan dari organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat lebih mampu bersikap termasuk dalam penggalangan dana. TNI lebih menonjol perannya dari pada aparat BNPB. Perlu dipertimbangkan TNI sebagai unsur utama BNPB, ujar Mahfudz. Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini melanjutkan, UU TNI memungkinkan alat Negara bertugas dengan fungsi operasi militer nonperang. Karena itu, perlu penguatan peran TNI di BNPB. Caranya, para pejabat TNI direkrut permanen, misalnya sebagai deputi operasi. TNI punya kesiapan dan kemampuan dalam tahap aksi tanggap darurat melalui unit disaster quick response dan dalam tahap rehabilitasi serta rekonstruksi melalui

⁷⁹ Media Indonesia, *Mandul, Badan Nasional Penanggulangan Bencana*, Jakarta, Media Indonesia; Senin 1 Nopember 2010; hal 1.

⁸⁰ Hasil Wawancara 27 Oktober 2010.

korps Zeni. Hambatan pembentukan BNPB daerah bisa diatasi karena SDM TNI tersedia dengan jumlah memadai di setiap Kodam, Korem dan Kodim.⁸¹

Menurut *Laksda (Purn) Wahyono SK, Phd*, persiapan penanggulangan bencana meliputi kegiatan antara lain; “*menyiapkan jaringan organisasi penanggulangan bencana dari pusat sampai daerah yang bersifat tetap dan yang mobilisasi, menyiapkan depo- depo penanggulangan bencana ditiap propinsi dan daerah rawan bencana. serta menyiapkan petunjuk pelaksanaan yang segera dapat dilaksanakan didaerah bencana.*”⁸² Kalau kita lihat ketiga prasyarat tersebut sudah dimiliki oleh organisasi TNI pada umumnya dan Korem 032/Wirabraja pada khususnya, sedangkan organisasi BNPB maupun BPBD walaupun sesuai amanat undang- undang seyogyanya sudah memenuhi prasyarat tersebut diatas, kenyataannya dilapangan belum dapat diwujudkan secara maksimal, dan masih mengandalkan instistusi pemerintah maupun oganisasi non pemerintah. Sedangkan kondisi riil dilapangan menurut *Dasrial Kasmien Maharuyung Sumbar* yang setiap kali terjadi bencana didaerah ini selalu menjadi relawan, kebijakan penanggulngn bencana dibawah kendali BNPB/ BPBD didaerah Sumbar ini terkesan lamban dalam mengambil sikap dan tindakan yang diperlukan terutama pada masa tanggap darurat. Banyak tindakan yang diambil terkesan tidak efektif dan tidak terencana dengan baik.⁸³

4.2. Tantangan Bagi Mekanisme Penanggulangan Bencana.

Walaupun pada tataran normatif mekanisme penanggulangan bencana nampaknya sudah cukup ideal, namun masih ada bebarapa permasalahan yang menjadi tantangan ketika mekanisme tersebut diimplementasikan di lapangan. Permasalahan pertama adalah belum adanya aturan yang secara jelas dan tegas yang tercakup didalam berbagai regulasi tentang penanggulangan bencana menyatakan apakah TNI boleh bertindak langsung terkait dengan upaya penyelamatan masyarakat

⁸¹ Patriot. *Kesiapan TNI Dalam Penanggulangan Bencana*. Laporan Utama. Edisi No.71.Tahun XII, Januari 2011; hal :10.

⁸² Wahyono, SaK Laksda TNI (Purn), diberikan saat Kuliah Manajemen Pertahanan PKN-UI Angkatan 27, Semester Genap Tahun 2010.

⁸³ Hasil Wawancara 06 Januari 2011.

yang terkena bencana dalam situasi darurat bencana. UU TNI No.34/2004 menyatakan bahwa Panglima TNI memiliki tanggung jawab dalam penggunaan kekuatan TNI, yang kemudian mempertanggung jawabkannya kepada Presiden.⁸⁴

Selanjutnya menurut *Setri Yasra Seorang Redaktur/Wartawan Majalah Tempo* yang meliput secara khusus bencana Mentawai dari tanggal 24 Nopember s/d 2 Desember 2010 mengatakan bahwa; “Kebijakan nasional penanggulangan bencana alam sejatinya sudah cukup memadai. Aturan-aturan yang ada di Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sudah cukup baik. Namun, undang-undang yang baik itu menghadapi kendala dalam implementasi di lapangan. Kebijakan nasional penanggulangan bencana belum berjalan secara baik di lapangan. Implementasi aturan tersebut masih belum berjalan secara optimal karena ketidaksiapan infrastruktur maupun sumber daya mana manusia. Seluruh komponen bangsa, pemerintah maupun masyarakat harus bersatu padu dalam menanggulangi kondisi buruk yang muncul akibat bencana alam. Indonesia sebagai negara yang sangat rawan terjadi bencana alam, harusnya menjadi sebuah dasar bagi pemerintah untuk menyiapkan sebuah sistem penanggulangan bencana nasional terpadu yang melibatkan peran serta masyarakat luas. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Nasional dalam kenyataannya saat ini belum mampu merespons bencana alam yang datang tiba-tiba dengan medan yang begitu berat. BNPB maupun BPBD belum mampu mengorganisasi kegiatan penyelamatan korban bencana, maupun dalam penyaluran bantuan. Selanjutnya menurut Setri Yasra, salah satu persoalan mendasar dari aturan itu adalah belum adanya sosialisasi yang baik dan merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Alhasil, ketika bencana datang, semua komponen penanggulangan bencana seperti BNPB, Basarnas, pemerintah daerah, PMI dan lembaga-lembaga lain seperti bergerak sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi yang baik. Walaupun BNPB dan BPBD sampai saat ini sudah hadir disebahagiari Provinsi dan Kabupaten/Kota Indonesia. Akan tetapi keberadaan BNPB dan BPBD saat ini dirasakan belum mampu merespons dan menanggulangi bencana alam yang

⁸⁴ Edy Prasetyono dkk, *Sistem Keamanan Nasional Dalam Penanggulangan Kasus Bencana Alam*; dalam *Sistem Keamanan Nasional Indonesia: Aktor, Regulasi dan Mekanisme Koordinasi*, Jakarta, Pacivis University Of Indonesia, Juni 2008, hal 210&212.

terjadi di Indonesia. Seperti yang terjadi saat bencana gempa dan tsunami menerjang Kabupaten Mentawai pada 26 Oktober 2010 lalu. Lembaga penanggulangan bencana yang ada sangat lamban dalam memberikan respons pertama terhadap korban yang berada di medan-medan yang sangat berat. Kondisi ini mungkin saja disebabkan oleh tidak adanya personel yang bersifat tetap, sehingga membuat koordinasi di BNPB dan BPBD sangat sulit dan lambat, yang pada akhirnya belum mampu memenuhi unsur-unsur dan prinsip cepat dan tepat dalam penanggulangan bencana.⁸⁵

4.3 Keterlibatan TNI Dalam Penanggulangan Bencana Alam.

Dalam berbagai bencana, sudah menjadi tugas dan kewajiban sebagian anggota TNI untuk membantu menangani bencana itu, sehingga penderitaan rakyat dapat dikurangi, bahkan dapat diselesaikan dengan baik. Pada mulanya anggota TNI melaksanakan tugas itu karena perintah. Namun melihat kesungguhan anggota TNI bencana, kita berkeyakinan bahwa anggota TNI menjalankan tugas itu bukan hanya karena perintah, melainkan karena solidaritas sosial sesama anak bangsa. Sebagai bukti bahwa anggota TNI melaksanakan tugas itu karena solidaritas sosial, bukan hanya karena perintah, adalah mereka selalu memberikan sumbangsih yang besar di daerah bencana, melebihi tugas-tugas formal mereka. Karena itu wajar jika di daerah bencana kedatangan anggota TNI selalu disambut dengan hangat dan penuh harapan. Apalagi anak bangsa yang paling siap untuk menghadapi bencana alam dan semacamnya adalah anggota TNI.⁸⁶

Menurut anggota *Komisi I DPR RI Nurhayati Ali Assegaf* dari pemantauan beliau secara langsung dilapangan; TNI patut diberikan apresiasi, karena kerja TNI sangat cepat dan bagus, koordinasi yang terukur. BNPB bisa meningkatkan kerja sama dengan TNI dalam menanggulangi bencana karena TNI terlatih dan mampu menghadapi persoalan dengan cepat. Ia bahkan memimpikan BNPB seperti TNI, bekerja cepat, terlatih dan bisa bekerja sama dengan banyak pihak. Politisi perempuan

⁸⁵ Hasil Wawancara 20 Desember 2010.

⁸⁶ M. Bambang Pranowo, *Multidimensi Ketahanan Nasional*. Jakarta, Pustaka Alvabet, September 2010, hal: 144.

dari partai Demokrat itu menambahkan, berdasarkan kemampuannya penanggulangan bencana, maka sudah saatnya Alutsista yang dimiliki TNI kedepan harus multifungsi. Bisa sebagai alat perang dan bisa juga sebagai alat untuk misi kemanusiaan, membawa bantuan bagi korban bencana seperti pembelian pesawat Hercules dan kapal angkut mengingat Indonesia merupakan Negara kepulauan.⁸⁷

Perlu diakui bahwa dalam situasi bencana yang mengakibatkan kerusakan berbagai infrastruktur vital, serta jatuhnya korban dalam jumlah besar, seperti yang terjadi di Padang Pariaman 30 September 2009 dan di Kepulauan Mentawai 25 Oktober 2010, TNI pada umumnya serta Korem 032/ Wirabaja dan jajarannya pada khususnya, merupakan institusi paling solid dan jadi garda terdepan untuk melakukan pertolongan pertama (*immediate response*) terutama dalam penyelamatan korban. Karena itu, merupakan hal yang paling penting untuk mencantumkan tugas spesifik ini sebagai bagian dari upaya tanggap darurat pada tingkat yang paling ekstrim dan memerlukan penanganan secara cepat. Untuk itu, tentunya diperlukan suatu **Standart Operation Procedures (SOP)** yang jelas tentang bagaimana TNI harus bertindak dalam situasi *immediate response*, sehingga tindakan yang dilakukan efektif dan sesuai dengan kebutuhan dilapangan.⁸⁸ Dalam konteks *immediate response* ini, menurut *Edy Prasetyono* tidak perlu menunggu regulasi, TNI harus bertindak cepat, karena tuntutan situasi dan kondisi, akan tetapi amanat UU 24/2007 dan regulasi turunan tidak secara eksplisit mengatur keterlibatan TNI pada tataran implementatif.⁸⁹ Inilah yang menjadi kendala dilapangan, yang menurut Danrem 032/Wirabaja; tanpa mengecilkan keberadaan Pemda dan BPBD, pada saat terjadi bencana di wilayah Sumbar, TNI (Korem 032/Wbr) selalu berinisiatif untuk bergerak cepat, dan tentunya selalu dikoordinasikan instansi terkait seperti Pemda, BNPB/BPBD, walaupun sebenarnya anggota TNI di jajaran Korem 032/Wirabaja merupakan bagian

⁸⁷ Patriot, *Kesiapan TNI Dalam Penanggulangan Bencana*, Laporan Utama, Edisi No.71, Tahun XII, Januari 2011: hal :10.

⁸⁸ Edy Prasetyono dkk, *Sistem Keamanan Nasional Dalam Penanggulangan Kasus Bencana Alam*; dalam *Sistem Keamanan Nasional Indonesia: Aktor, Regulasi dan Mekanisme Koordinasi*, Jakarta, Pacivis University Of Indonesia, Juni 2008, hal 210&212.

⁸⁹ Hasil Wawancara Sabtu 11 Desember 2010.

dari korban bencana itu sendiri.⁹⁰ Kalau kita berpegang teguh terhadap aturan perundang-undangan tentang penanggulangan bencana tentunya BNPB dan BPBD lah yang bertanggung jawab penuh, akan tetapi atas dasar pertimbangan kemanusiaan dalam kondisi darurat TNI pada umumnya dan Korem 32/Wirabaja pada khususnya selalu dituntut siap membantu upaya penanggulangan bencana yang terjadi di wilayah tugasnya. Apresiasi terhadap kinerja TNI dalam penanganan bencana juga disampaikan **Ketua DPR RI Marzuki Alie**. Menurut Marzuki, bencana besar yang menerpa Indonesia tidak cukup hanya ditangani BNPB. Apalagi BNPB di daerah belum juga terbentuk.⁹¹

Sejalan dengan permasalahan pertama tersebut diatas, tentunya TNI diharapkan mampu menjawab keinginan masyarakat, sebagaimana yang dikatakan oleh Rahardi Ramelan Guru Besar ITS Surabaya yang mengumpamakan bencana tsunami dengan perang, dalam tulisannya di Opini Harian Republika hari Rabu 3 Nopember 2010 pada halaman 4, beliau mengatakan sebagai berikut :

Seandainya saja bencana Mentawai bukan disebabkan oleh tsunami melainkan akibat penyerangan dan pendudukan oleh musuh, dengan korban yang berjatuhan sedemikian besarnya, apakah kita juga akan bereaksi sama? Tidak bisa berbuat apa-apa karena cuaca yang tidak mendukung? Sangat menyedihkan kalau ini benar-benar terjadi, sehingga kita mengorbankan Kepulauan Mentawai untuk diduduki musuh, termasuk penduduknya menjadi tawanan. Jadi, siapa yang akan melindungi Negara dan bangsa ini? Saya yakin, TNI mempunyai kemampuan untuk melindungi dan menyelamatkan Kepulauan Mentawai dari musuh. Tetapi, mengapa BNPB tidak memanfaatkan semua kekuatan kita untuk menangani bencana yang diakibatkan oleh tsunami? Semua pejabat yang bertanggung jawab untuk mengatasi akibat bencana alam, menyatakan telah berbuat maksimal sesuai SOP dan kewenangannya. Rupanya SOP menghadapi bencana berbeda dengan SOP perang. Apakah juga jiwa dan nyawa rakyat kita punya nilai yang berbeda? Berarti SOP-nya yang keliru. Menyelamatkan jiwa dan nyawa setiap warga Negara harus menjadi perhatian utama semua pimpinan bangsa ini. Apakah jiwa dan nyawa warga Negara mempunyai nilai berbeda karena penyebab yang berbeda, seperti disebabkan oleh perang, perlakuan bangsa lain di luar negeri, bencana alam termasuk bencana tsunami. Jangan ada lagi pemimpin kita yang menganggap bahwa masyarakat yang menjadi penduduk

⁹⁰ Hasil Wawancara Jumat 27 Agustus 2010.

⁹¹ Patriot, *Kesiapan TNI Dalam Penanggulangan Bencana*, Laporan Utama, Edisi No.71, Tahun XII, Januari 2011; hal :10.

daerah- daerah rawan bencana, merupakan tanggung jawabnya sendiri. Nilai jiwa dan nyawa seorang Indonesia dimanapun berada adalah sama. Kita harus mempertanyakan siapa sesungguhnya otoritas tertinggi menghadapi bencana yang merenggut ratusan jiwa bangsa kita ini. Saya yakin bahwa TNI mampu menghadapi bencana seperti tsunami. Tetapi, mengapa reaksinya sampai terlambat.⁹²

Dari pernyataan tersebut diatas, dalam hal menghadapi bahaya atau ancaman bencana, TNI masih dianggap sebagai salah satu organisasi atau komponen bangsa yang memiliki kemampuan untuk melindungi dan menyelamatkan warga Negara dari ancaman musuh yang bernama bencana alam, baik gempa bumi maupun tsunami. Akan tetapi ironinya sesuai dengan tugas pokok TNI dibidang OMSP menurut Undang- Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, secara jelas mengamanatkan kepada TNI untuk membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. Akan tetapi, didalam ketentuan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, keterlibatan TNI tidak secara jelas dan tegas sebagai unsur pelaksana atau aktor penting dalam implementasi upaya penanggulangan bencana diwilayah, akan tetapi hanya sebagai salah satu unsur pengarah dari Sepuluh (10) Pejabat Pemerintah Eselon I Kementerian Negara yang dilibatkan. Sehingga kondisi ini sangat menjadi dilema bagi pelaksanaan tugas TNI khususnya Komando Kewilayahan seperti Korem 032/ Wirabraja di daerah- daerah rawan bencana. Disamping itu juga, ditengah keterbatasan dana, sarana dan prasarana yang dimiliki, Korem 032/ Wirabraja juga dituntut agar mampu merespon secara cepat, tepat dan terukur upaya penanggulanga bencana yang terjadi di wilayah Sumbar ; terutama gempa bumi pada tanggal 30 September 2009 maupun gempa & tsunami 25 Oktober 2010 yang lalu.

Prioritas pengerahan kekuatan TNI untuk lima tahun kedepan diarahkan untuk merespons ancaman aktual yaitu konflik di wilayah perbatasan dan keamanan pulau- pulau kecil terluar, ancaman separatisme, terorisme, *bencana alam*, konflik horizontal, dan ragam kegiatan ilegal yang membahayakan kedaulatan Negara baik di

⁹² Lihat Opini Republika, Rahardi Ramelan Guru Besar ITS Surabaya, *Tsunami dan Perang*, Jakarta, Republika, Rabu 3 Nopember 2010; hal: 4.

darat maupun di laut, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa sesuai dengan standar kemampuan Minimum Esensial Force, dengan menerapkan pola Trimatra Terpadu.

4.3.1 Peran TNI Secara Umum.

TNI dalam melaksanakan tugas pokok pertahanan Negara juga disiapkan untuk melaksanakan OMSP guna menghadapi berbagai bentuk ancaman diluar agresi militer. Penggunaan kekuatan TNI untuk OMSP dilaksanakan bersama- sama dengan instansi fungsional dalam suatu keterpaduan usaha yang sinergis. OMSP dilaksanakan TNI dengan mendahulukan tindakan preventif dari pada tindakan represif yang disesuaikan dengan eskalasi dan bentuk ancaman. OMSP diimplementasikan melalui peran/ keikutsertaan TNI secara aktif dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi bangsa diberbagai aspek kehidupan masyarakat seperti peran dalam melindungi masyarakat dari ancaman bencana alam yang sering terjadi hampir diseluruh penjuru tanah air kita. Pengerahan kekuatan TNI untuk OMSP sesuai amanat UU No.34/2004 tentang TNI, dilaksanakan berdasarkan kebijakan atau keputusan politik Negara. Adapun 14 bidang tugas OMSP yang harus diemban TNI dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Mengatasi Gerakan Separatis Bersenjata.
- b. Mengatasi Pemberontakan Bersenjata.
- c. Mengatasi aksi terorisme
- d. Megamankan wilayah perbatasan
- e. Mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis.
- f. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
- g. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.
- h. **Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.** Penggunaan kekuatan TNI dalam memberdayakan wilayah

pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; ditujukan untuk membantu pemerintah mempersiapkan *ruang, alat dan kondisi juang* secara dini di setiap wilayah NKRI sebagai suatu kesatuan pertahanan dengan memperhatikan hak masyarakat dan peraturan perundang-undangan; melakukan koordinasi dengan departemen terkait dan pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan guna kepentingan penyelenggaraan pertahanan Negara dan bersama-sama institusi terkait lainnya menjaga stabilitas keamanan dan wilayah pertahanan di darat, laut dan udara diseluruh wilayah NKRI. Kewenangan penggunaan kekuatan TNI untuk memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta dibawah pengendalian Panglima TNI.

i. **Membantu tugas pemerintah di daerah.** Penggunaan kekuatan TNI atas permintaan kepala daerah, ditujukan untuk membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dalam kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Bentuk perbantuan yang dapat diberikan antara lain *membantu mengatasi akibat bencana alam*, merehabilitasi infrastruktur, serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal; membantu melaksanakan ketertiban umum sesuai peraturan daerah dalam rangka mencegah gangguan penyelenggaraan roda pemerintahan daerah dan kelangsungan pembangunan daerah; dan bersama-sama instansi terkait lainnya ikut aktif mengamankan dan merehabilitasi akibat ketidaklancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kewenangan penggunaan kekuatan TNI untuk membantu tugas pemerintahan di daerah dibawah pengendalian Panglima TNI.

- j. Membantu Kepolisian Republik Indonesia dalam tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.
- k. Membantu mengamankan tamu Negara setingkat kepala Negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.
- l. **Membantu menanggulangi akibat bencana alam , pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan.** Penggunaan kekuatan TNI untuk bantuan kemanusiaan atas permintaan kepala daerah ditujukan untuk melakukan tindakan secara proporsional sesuai perundang- undangan yang berlaku; mencegah timbulnya korban dan atau kerugian yang lebih besar dalam pemberian bantuan; merencanakan area pengungsian, dan menyiapkan fasilitas dalam pemberian bantuan kemanusiaan; dan bersama- sama komponen bangsa lainnya memulihkan kondisi akibat bencana alam, penanganan pengungsi dan pemberian bantuan kemanusiaan. Kewenangan penggunaan kekuatan TNI untuk membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan berada dibawah pengendalian Panglima TNI.
- m. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue)
- n. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyeludupan.

Prioritas dan fokus pengembangan postur pertahanan militer diarahkan pada perwujudan Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force/MEF*) Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan tetap mengacu pada konsep pengembangan Postur Ideal TNI yang telah direncanakan dalam jangka panjang. Pengertian Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force/MEF*) adalah suatu standar kekuatan pokok dan minimum TNI yang mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya secara efektif tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual.

Prioritas pertama perwujudan MEF adalah peningkatan kemampuan mobilitas TNI Angkatan Udara (TNI AU), TNI Angkatan Laut (TNI AL), dan TNI Angkatan Darat (TNI AD) untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok TNI di seluruh wilayah nasional. Prioritas MEF selanjutnya adalah pada peningkatan kemampuan satuan tempur khususnya pasukan pemukul reaksi cepat (*striking force*) baik satuan ditingkat pusat maupun satuan di wilayah, serta *penyiapan pasukan siaga (standby force) terutama untuk penanganan bencana alam* serta untuk tugas-tugas misi perdamaian dunia dan keadaan darurat lainnya. Kebutuhan-kebutuhan pendukung lain dalam rangka perwujudan MEF akan dipenuhi pula secara bertahap sehingga diharapkan MEF dapat dijadikan sebagai pijakan dasar menuju postur TNI yang ideal.⁹³

Disamping itu, kebijakan kerja sama internasional bidang pertahanan Pemerintah mengembangkan kerja sama yang bernilai positif bagi kepentingan nasional dan lingkungan internasional, dengan memperhatikan prinsip saling menghormati, mempercayai, dan menguntungkan. Kerja sama internasional bidang pertahanan berkaitan dengan kebijakan politik luar negeri, sehingga harus senantiasa dilaksanakan dengan prinsip *one gate policy*. Segala bentuk kerjasama internasional bidang pertahanan menghindari pembentukan suatu pakta pertahanan yang dapat mengurangi makna politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Salah satu prioritas kerja sama internasional bidang pertahanan diarahkan pada peningkatan kerja sama dengan negara-negara sahabat yang memiliki komitmen tinggi terhadap pengembangan kemampuan (*capacity building*) pertahanan negara Indonesia, khususnya dalam upaya *penanganan terorisme, kegiatan bidang pendidikan dan latihan, pengembangan sumber daya manusia, penanggulangan bencana, penegakan hukum di laut dan di udara, serta transfer teknologi untuk Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI*.⁹⁴

⁹³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014.

⁹⁴ Ibid

4.3.2 Bantuan TNI Kepada Pemda Dalam Penanggulangan Bencana Alam.

Sesuai Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep /461/XII/2006 tanggal 21 Desember 2006 tentang Naskah Sementara Petunjuk Pelaksanaan Bantuan TNI kepada Pemerintahan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam; diatur tentang Ketentuan Permintaan dan pemberian bantuan TNI kepada Pemda, penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh TNI, administrasi dan logistik, serta komando, kendali dan komunikasi; yang terurai dalam penjelasan sebagai berikut:

a. Ketentuan Permintaan dan Pemberian Bantuan.

1) Ketentuan Permintaan Bantuan

- a) Bupati/ Gubernur secara lisan menyampaikan permohonan permintaan bantuan kekuatan TNI kepada Dandim/Danrem/Pangdam sesuai dengan strata jabatan di daerah yang terkena bencana, setelah itu diikuti permohonan permintaan secara tertulis.
- b) Permohonan permintaan bantuan TNI secara tertulis paling lambat 1 x 24 Jam , dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban TNI maupun pemerintah terhadap rakyat.
- c) Permohonan permintaan secara lisan diharapkan dapat menjelaskan :
 - (1) Perkembangan situasi terakhir tentang bencana yang timbul.
 - (2) Tempat terjadinya bencana.
 - (3) Jumlah korban manusia dan kerusakan daerah secara umum.
- d) Permohonan permintaan secara tertulis diharapkan :
 - (1) Mewadahi tiga persoalan yang telah disampaikan secara lisan diatas.

- (2) Kekuatan TNI dan peralatan yang digunakan.
- (3) Perkiraan waktu penggunaan bantuan TNI.
- (4) Dukungan administrasi dan logistik

2) Ketentuan Pemberian Bantuan.

- a) Dandim/Danrem/Pangdam setelah mengetahui terjadi bencana di daerahnya atau menerima permintaan secara lisan tentang bantuan TNI dari pemerintah segera mengerahkan kekuatan TNI yang terdekat, sambil mengingatkan kepada pemerintah untuk membuat surat permohonan permintaan bantuan secara tertulis sebagai pertanggung jawaban.
- b) Dandim/Danrem/Pangdam sambil mengendalikan dan mengkoordinasikan satuan TNI yang telah dikerahkan dilapangan selanjutnya melaporkan kepada Komando Atas tentang kejadian bencana dan pemberian bantuan TNI yang telah dilakukan.
- c) Dandim/ Danrem/Pangdam segera turun kelapangan untuk mengetahui dampak akibat bencana, seberapa banyak jumlah korban manusia dan kerusakan daerah yang timbul. Setelah mengetahui jumlah korban manusia dan kerusakan daerah masih dalam kemampuan PRC PB daerah, maka pengendalian dan pengomandoan penanggulangan bencana berada ditangan Pangdam, tetapi apabila hal itu diluar kemampuan PRC PB daerah, maka Pangdam segera mengajukan kekuatan PRC PB TNI Pusat kepada Panglima TNI.
- d) Apabila bencana yang terjadi pada skala nasional, maka pengendalian dan pengomandoan bantuan TNI ada ditangan Panglima TNI dengan mengerahkan kekuatan PRC PB TNI Pusat.

3) Ketentuan Khusus.

- a) Kekuatan TNI dalam melaksanakan penanggulangan bencana membantu pemerintah hanya selama tanggap darurat.
 - b) Pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, apabila pemerintah masih memerlukan bantuan TNI, selanjutnya secara prosedural mengajukan permintaan kepada Pangdam untuk melaksanakan Bhakti TNI.
 - c) TNI dalam membantu pemerintah untuk menanggulangi bencana tidak perlu membawa senjata.
 - d) TNI dalam pelaksanaan penanggulangan bencana skala lokal bertanggung jawab pejabat Kepala Daerah, dan skala nasional bertanggung jawab kepada Presiden.
- 4) Hal-hal yang perlu mendapat perhatian.
- a) Saat terjadi bencana banyak timbul korban, ada atau tidak ada permintaan bantuan TNI dari Bupati/Walikota/Gubernur, Dandim/Danrem/Pangdam segera melakukan kegiatan penanganan penanggulangan bencana, sambil berkoordinasi dengan instansi terkait.
 - b) Bencana alam skala lokal, Pangdam selaku wakil ketua Satkorlak, mengkoordinasikan dan mengendalikan semua bentuk kegiatan penanggulangan bencana.
 - c) Bencana Alam skala nasional, Pati TNI yang menjabat Dan PRC PB TNI, mengkoordinasikan dan mengendalikan semua bentuk kegiatan penanggulangan bencana baik dari dalam maupun dari luar negeri.
 - d) Dilakukan operasi penerangan dan dokumentasi oleh unsur satuan penerangan TNI.
 - e) Personel yang terlibat dalam bantuan TNI kepada Pemda harus memahami bahwa tugas yang dilaksanakan adalah tugas operasi bantuan kemanusiaan.

b. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

1) Tahap Kegiatan.

a) Tahap Perencanaan. Bupati/Walikota/Gubernur baik mengajukan bantuan ataupun tidak, termasuk apabila Dandim/Danrem/Pangdam telah mengetahui didaerahnya terjadi bencana, langkah selanjutnya adalah :

(1) Diwilayah sekitar bencana terdapat satuan pasukan TNI.

(a) Dandim segera mengerahkan satuan tersebut ke daerah bencana sambil melakukan koordinasi dengan Komandan atasannya.

(b) Dandim/Danrem setelah mengerahkan kekuatan TNI yang ada sambil melakukan kegiatan rapat staf dan berkoordinasi dengan satuan dan instansi yang terkait.

(c) Dandim/ Danrem sambil mengendalikan pengerahan kekuatan TNI melaporkan kepada Pangdam tentang perkembangan situasi terakhir bencana serta kekuatan TNI yang telah dikerahkan.

(d) Dandim/Danrem sambil mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan, membuat perencanaan kekuatan TNI dan alat peralatan yang dibutuhkan.

(2) Diwilayah sekitar bencana tidak terdapat pasukan TNI.

(a) Dandim/Danrem segera mengerahkan kekuatan TNI yang ada di jajaran Kodim dan

Korem sambil merencanakan kekuatan TNI dan peralatan yang dibutuhkan.

(b) Dandim/Danrem sambil mengendalikan dan mengerahkan kekuatan yang ada, melaporkan kepada Pangdam tentang perkembangan situasi terakhir daerah bencana dan kekuatan TNI yang dibutuhkan.

(c) Dandim/Danrem sambil mengendalikan penanggulangan bencana mengadakan rapat staf dalam rangka melakukan perencanaan.

b) Tahap Persiapan.

(1) Diwilayah sekitar bencana terdapat pasukan TNI.

(a) Dandim/ Danrem setelah mengerahkan kekuatan TNI yang ada diwilayahnya, selanjutnya melakukan koordinasi dengan satuan atasannya.

(b) Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk membahas tentang kekuatan TNI yang telah dikerahkan berkaitan dengan dukungan logistik.

(c) Dandim/Danrem melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengupayakan alat peralatan yang dibutuhkan dilapangan.

(2) Diwilayah sekitar bencana tidak terdapat pasukan TNI.

(a) Dandim/ Danrem setelah mengerahkan kekuatan TNI dari personel Kodim dan Korem. selanjutnya segera mengajukan permohonan kekuatan TNI kepada Komando atas.

(b) Dandim/Danrem selanjutnya melakukan koordinasi dengan pejabat daerah untuk membahas tentang dukungan logistik dan peralatan yang diperlukan.

c). Tahap Pelaksanaan.

(1) Diwilayah sekitar bencana terdapat pasukan TNI:

(a) Dandim/Danrem mengendalikan semua pasukan TNI yang dibantu oleh personel Kodim dan Korem di daerah bencana.

(b) Dandim/Danrem mengkoordinasikan semua bentuk kegiatan penanggulangan bencana diwilayahnya.

(c) Dandim/Danrem melaporkan setiap perkembangan situasi di lapangan kepada pejabat pemerintah daerah.

(2) Diwilayah sekitar bencana tidak terdapat pasukan TNI:

(a) Dandim/ Danrem sambil menunggu bantuan kekuatan pasukanTNI dari daerah lain, memimpin dan mengendalikan personel Kodim dan Korem yang sedang melaksanakan penanggulangan bencana.

(b) Setelah pasukan TNI dari daerah lain tiba, unsure- unsure Kodim dan Korem tetap melaksanakan kegiatan untuk membantu kekuatan pasukan inti yang dikendalikan oleh Dandim.

(c) Dandim/Danrem mengendalikan semua bentuk penanggulangan bencana diwilayahnya.

(d) Dandim/Danrem setiap saat harus melaporkan perkembangan situasi di daerah bencana alam kepada pejabat pemerintah daerah.

d). Tahap Pengakhiran.

(1) Dandim/ Danrem mengendalikan kegiatan konsolidasi personel dan alat peralatan yang dikerahkan.

(2) Setelah dinyatakan tanggap darurat selesai, satuan TNI kembali ke pangkalan masing-masing.

(3) Melaporkan kepada pejabat pemerintah dan satuan atasannya.

(4) Membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.

e). Administrasi dan Logistik.

(1) Administrasi.

(a) Dandim/Danrem harus melengkapi surat perintah penugasan kepada satuan TNI yang di-BKO-kan sebagai pertanggungjawaban.

(b) Komandan pasukan TNI semaksimal mungkin dapat menyiapkan alat peralatan organiknya yang akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas.

(2) Logistik.

(a) Dukungan logistik satuan TNI yang tergabung dalam susunan satuan tugas PRC PB TNI daerah dan satuan tugas PRC PB TNI pusat didukung oleh pemerintah.

(b) Satuan tugas PRC PB daerah yang menangani bencana dalam skala tingkat Kab/Kota, logistik didukung oleh pemerintah Kab/Kota.

- (c) Satuan tugas PRC PB daerah yang menangani bencana dalam skala tingkat Propinsi, logistik didukung oleh pemerintah propinsi
 - (d) Satuan tugas PRC PB pusat yang menangani bencana dalam skala tingkat nasional, logistik didukung oleh pemerintah pusat.
- f) Komando, Kendali dan Komunikasi.
- (1) Komando.
 - (a) Komando operasional bantuan TNI kepada pemerintah daerah secara terpusat berada pada Panglima TNI.
 - (b) Komando operasional bantuan TNI kepada pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana skala nasional di daerah berada pada Dan PRC PB TNI.
 - (c) Komando operasional bantuan TNI kepada pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana skala daerah berada pada Pangdam.
 - (d) Komando operasional yang bersifat taktis.
 - (1) Bantuan TNI kepada pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana skala nasional berada pada masing- masing Dansatgas.
 - (2) Bantuan TNI kepada pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana skala daerah berada pada Danrem/Dandim.
 - (2) Kendali.
 - (a) Kendali operasional bantuan TNI kepada pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana nasional skala nasional tanggung jawab Dan PRC PB TNI.

(b) Kendali operasional bantuan TNI kepada pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana nasional skala daerah tanggung jawab Pangdam.

(3). Komunikasi.

(a) Menggunakan Instaf dan Instop komunikasi yang berlaku.

(b) Penggunaan sarana komunikasi lain seperti telepon genggam sesuai dengan kemampuan satuan.

4.3.3 Peran Korem 032/Wirabraja Dalam Membantu Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi 30 September 2009.

Meskipun pemerintah telah membentuk BNPB, BPBD Propinsi dan Kabupaten / Kota berdasarkan UU 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, namun karena adanya berbagai kendala, badan ini masih mengalami keterbatasan dalam menanggulangi dampak gempa bumi, khususnya pada tahap tanggap darurat, yang tentunya diperlukan tindakan yang cepat dengan personil terlatih dan organisasi yang solid, dimana dalam kondisi dan suasana yang serba terdadak, serba terbatas, serba mencekam, dan serba kritis dituntut mampu merspon ancaman bencana gempa bumi yang terjadi . Oleh karena itu, peran serta dan keterlibatan TNI, khususnya TNI AD, terutama Korem 032 / Wirabraja sangat penting sekali dalam membantu menanggulangi dampak gempa bumi yang terjadi di Sumatera Barat pada tanggal 30 September 2009 yang lalu. Menurut keterangan *Danrem 032/ Wirabraja Kolonel Inf. Mulyono* yang penulis wawancarai pada tanggal 27 Agustus 2010; tanpa mengecilkkan arti keberadaan BNPB dan Pemda dengan BPBD nya, Korem 032/ Wirabraja dan jajarannya bergerak cepat membantu para korban gempa pada kesempatan pertama, yang tentunya selalu dikoordinasikan dengan intitusi terkait. Peran Korem 032 / Wirabraja dalam membantu mengatasi berbagai dampak gempa bumi yang terjadi di Sumatera Barat beberapa waktu itu, khususnya pada masa tanggap darurat selama 30 hari sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah, melalui BNPB, secara khusus akan

menjawab pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana peran Korem 032 / Wirabraja dalam membantu mengatasi gempa bumi di wilayah Sumatera Barat, khususnya pada tahapan tanggap darurat?

a. Kejadian Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009.

Peistiwa gempa bumi di Propinsi Sumatera Barat terjadi pada tanggal 30 September 2009 dengan kekuatan 7,9 Skala Richter di lepas pantai Sumatera Barat pada pukul 17:16:09 WIB. Gempa bumi terjadi di lepas pantai Sumatera, sekitar 50 km barat laut Kota Padang sehingga menyebabkan kerusakan parah di beberapa wilayah di Sumatera Barat seperti Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Padangpanjang, Kabupaten Agam, Kota Solok, dan Kabupaten Pasaman Barat.⁹⁵ Provinsi Sumatera Barat rawan terjadi gempa bumi karena berada di antara pertemuan dua lempeng benua besar (lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia) dan patahan (sesar) Semangko serta didekat pertemuan lempeng terdapat patahan Mentawai yang mana ketiganya merupakan daerah seismik aktif. Menurut catatan ahli gempa wilayah Sumatera Barat memiliki siklus 200 tahunan gempa besar yang pada awal abad ke-21 telah memasuki masa berulangnya siklus⁹⁶.

Jumlah korban tewas yang telah ditemukan akibat gempa di Sumatra Barat terus bertambah dan i jumlahnya telah mencapai 1.195 orang. Korban tewas terbanyak yang telah terdata ditemukan Kabupaten Padang Pariaman berjumlah 666 orang dan Kota Padang berjumlah 383 orang. Berikut rincian korban dan kerusakan yang telah terdata oleh Satkorlak PB Sumbar :⁹⁷

- 1) Korban tewas : 1.195 orang
- 2) Korban luka berat : 619 orang
- 3) Korban luka ringan : 1.179 orang
- 4) Warga hilang : 2 orang
- 5) Warga yang mengungsi: 6.554 orang

⁹⁵ Dikutip dari situs internet http://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi_Sumatera_Barat_2009

⁹⁶ Dikutip dari situs internet http://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi_Sumatera_Barat_2009

⁹⁷ Data terakhir Satkorlak PB Sumbar tanggal 30 Oktober 2009

- 6) Rumah rusak berat : 119.005 unit
- 7) Rumah rusak sedang : 73.733 unit
- 8) Rumah rusak ringan : 78.802 uni

Lebih detail lagi, jumlah korban yang tewas yang telah terdata dapat dirinci berdasarkan wilayah kota / kabupaten, sebagai berikut :⁹⁸

- 1) Kota Padang : 383 orang
- 2) Kabupaten Padang Pariaman : 666 orang
- 3) Kota Pariaman : 48 orang
- 4) Kabupaten Pesisir Selatan : 9 orang
- 5) Kota Solok : 3 orang
- 6) Kabupaten Agam : 81 orang
- 7) Kabupaten Pasaman Barat : 5 orang

Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI mengamankan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) diantaranya membantu penanggulangan bencana alam. Berbagai aneka ragam bencana yang terjadi di wilayah Indonesia telah mendorong seluruh personil TNI satuan manapun untuk membantu melakukan langkah-langkah penanganan dan penanggulangan bencana, mulai dari tahapan tanggap darurat, rekonstruksi, dan rehabilitasi. Personil TNI yang terdidik, terlatih, dan didesain untuk bekerja dan bertugas dalam situasi dan kondisi yang serba darurat, serba kritis, serba terbatas, dinilai oleh berbagai pihak akan mampu mengatasi dampak bencana, khususnya pada masa tanggap darurat.

Hal ini juga terjadi di wilayah Sumatera Barat, ketika terjadi gempa bumi yang meluluhlantakkan sendi-sendi dasar kehidupan masyarakatnya. Sebagai satuan kewilayahan TNI AD yang berada di wilayah Sumatera Barat; Korem 032 / Wirabraja dan jajarannya berkewajiban untuk membantu mengatasi gempa bumi yang telah menyebabkan ribuan orang meninggal, ratusan luka berat dan ringan, serta hancurnya berbagai sarana perkantoran,

⁹⁸ Data terakhir Satkorlak PB Sumbar tanggal 30 Oktober 2009

sarana pemerintahan, sarana perekonomian, dan fasilitas sosial / fasilitas umum lainnya. Pada saat terjadi bencana gempa bumi, Korem 032 / Wirabraja secara refleks, responsive, dan tanpa diminta oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah ataupun BNPB dan BPBD, melakukan langkah-langkah evakuasi terhadap korban yang masih hidup, luka, maupun meninggal dunia. Hal ini semata-mata dilakukan sebagai bentuk panggilan tugas membantu pemerintah, melindungi masyarakat, dan mengamankan berbagai obyek vital, demi kedaulatan NKRI, keutuhan wilayah, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan nasional dari berbagai ancaman.

Pada beberapa saat setelah kejadian gempa bumi di Sumatera Barat; Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengatakan, TNI mengerahkan pasukan reaksi cepat untuk menanggulangi penderitaan akibat gempa bumi berkekuatan 7,6 pada Skala Richter, yang melanda masyarakat di Padang, Sumatera Barat, 30 September lalu. Kesiapan pengerahan pasukan reaksi cepat itu disampaikan Panglima TNI kepada wartawan media cetak dan elektronik di Balai Wartawan Puspen TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (3/10/09) pagi. Panglima TNI yang didampingi Wakasad Letjen TNI Johannes Suryo Pabowo, Wakasal Laksdya TNI Moekhlis Sidik, MPA dan Wakasau Marsdya TNI Wardjoko menguraikan, pada tahap tanggap darurat, jajarannya di Kodam I/Bukit Barisan sejak 1 Oktober telah berangkat ke Padang. Satuan yang berangkat ke lokasi terdiri dari Korem 032/Wirabraja Padang, Yonif 131/Braja Sakti Payakumbuh, Yonif 133/ Yudha Sakti Padang dan Detasemen Zeni Tempur 2 Payakumbuh.⁹⁹ Satuan-satuan ini merupakan gelar kekuatan TNI yang secara dislokasi memang berada di wilayah Sumatera Barat dan

⁹⁹ <http://www.tandef.net/tni-kerahkan-pasukan-reaksi-cepat-tanggulangi-bencana-sumbar>. TNI Kerahkan Pasukan Reaksi Cepat Tanggulangi Bencana Sumbar, Submitted by root on Mon, 10/05/2009 - 03:19.

dibawah kendali operasi Korem 032/Wirabraja. Pada kesempatan pertama terjadinya gempa bumi 30 September 2009 lalu, kekuatan TNI jajaran Korem 032/Wirabraja lah yang terjun langsung ke lokasi- lokasi kritis yang banyak menelan korban jiwa dan harta benda.

Baru setelah gempa yang terjadi sore hari , pagi esoknya pada pukul 07.00 WIB TNI langsung mengirimkan satu tim kesehatan dari Puskes TNI, satu batalyon kesehatan dari Kesehatan Kostrad berikut tenda, obat-obatan dan makanan. Pasukan ini diberangkatkan dengan tiga Hercules, pesawat angkut militer dari jenis C-130. Siangnya, pada pukul 12.00 WIB, satu pesawat Hercules VIP dari jenis yang sama yang membawa rombongan Panglima TNI, juga berangkat menuju lokasi. Mendahului Satuan-satuan itu, rombongan tim aju telah berada di lokasi, dipimpin Asisten Operasi Panglima TNI Mayjen TNI Supiadin AS. Selain itu, TNI AD dan TNI AL, masing-masing telah mengirimkan satu pesawat helikopter dari jenis Bell. TNI AD mengirimkan pesawat itu dari Medan, dan TNI AL dari Jakarta. Pasukan dari TNI tersebut telah mengaktifkan pos komando utama (Poskout) di Mabes TNI, Jakarta dan pos komando taktis (Poskotis) di Korem 032/Wirabraja, Padang. Selain itu, Posko Satuan Tugas Laut (Satgasla) diaktifkan di Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta dan Posko Satuan Tugas Udara (Satgasud) di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.¹⁰⁰

Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) yang disiapkan itu terdiri dari unsur TNI dari ketiga Angkatan. Dari Angkatan Darat, PRCPB terdiri dari dua kompi Zeni Konstruksi (Zikon) 13, dua unit excavator, 10 unit dump truck dan enam unit dozer. Selain itu helikopter, dreader dan loader masing-masing satu unit. Dari unsur TNI Angkatan Laut, Satuan yang dikerahkan meliputi empat KRI jenis landing ship tank (LST), satu KRI jenis landing platform dock (LPD), satu KRI jenis kargo, satu KRI jenis rumah sakit (KRI Dr. Suharso) dengan satu helikopter onboard.

¹⁰⁰ibid

Sementara itu, dari unsur TNI Angkatan Udara, Satuan yang dikerahkan adalah empat pesawat angkut Hercules C-130 termasuk satu VIP di dalamnya, satu pesawat Fokker F-28 dan satu helikopter.¹⁰¹ Semua kekuatan yang dikerahkan oleh Mabes TNI tersebut diatas tentunya sudah difasilitasi oleh Korem 032/ Wirabraja selaku Komando Bawahan yang berada langsung dilokasi bencana. Selaku Komando Kewilayahan yang sekaligus sebagai Komando Taktis dari institusi TNI, Korem 032/Wirabraja memegang peranan yang sangat vital, karena sudah memiliki jaringan Komando sampai ketingkat desa/ Nagari dengan Babinsanya. Memang kalau dilihat dari kekuatan personil dan peralatan yang dimiliki Korem 032/ Wirabraja masih sangat terbatas untuk membantu korban dan kerusakan harta benda yang begitu besar jumlahnya. Namun, dengan bekal semangat kejuangan yang tinggi mereka berupaya bahu membahu dengan segenap komponen dan institusi lainnya bergerak cepat membantu upaya pertolongan pertama (immediate response) pada masa tanggap darurat.

Dalam membantu mengatasi gempa bumi di Sumatera barat, Korem 032 / Wirabraja berpegang teguh pada aturan hukum yang tertuang dalam UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, khususnya pada pasal 48, dimana penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- 1) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- 2) Penentuan status keadaan darurat bencana;
- 3) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- 4) Pemenuhan kebutuhan dasar;
- 5) Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- 6) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

¹⁰¹ Ibid

Berikut ini akan diuraikan peran Korem 032 / Wirabraja di masing-masing tahapan pada masa tanggap darurat gempa bumi di Sumatera Barat:

a) Pengkajian Secara Cepat Dan Tepat Terhadap Lokasi, Kerusakan, Dan Sumber Daya. Dalam tahapan ini, Korem 032 / Wirabraja setelah gempa bumi terjadi, menurut *Danrem 032/Wirabraja (Kolonel Inf Mulyono)* yang peneliti wawancarai pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010 yang lalu¹⁰², langsung melakukan apel luar biasa di Makorem guna mendapatkan pengarah dan perintah dari Danrem. Tepat pukul 23.00 malam personil Korem, Kodim, dan Batalyon serta Dinas jawatan jajaran Korem/032 Wirabraja sudah tergelar di titik-titik lokasi terparah yang membutuhkan bantuan secara cepat. Pada kesempatan pertama terjadi gempa yang meluluhlantakkan wilayah Sumatera Barat ini, personel TNI jajaran Korem 032/Wirabraja sesuai protap berusaha menyelamatkan diri dan keluarga, setelah itu baru melakukan apel luar biasa untuk menerima perintah guna memberikan bantuan dan pertolongan untuk mengetahui lokasi dan titik-titik mana saja di Kota Padang dan sekitarnya yang terkena gempa bumi, misalnya hotel yang ambruk, gedung perkantoran yang rusak, Mall yang hancur, dan rumah-rumah warga yang ambruk. Korem 032 / Wirabraja juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di tengah masyarakat untuk mengetahui jumlah korban yang meninggal, luka berat, luka ringan, dan yang masih tertimbun di reruntuhan bangunan.

Korem 032 / Wirabraja selanjutnya mendirikan posko-posko di setiap Kodim dan Koramil sebagai pusat informasi dan komunikasi bagi para keluarga korban yang ingin mengetahui nasib sanak keluarganya yang belum tahu nasibnya ada dimana. Korem 032 / Wirabraja juga melakukan identifikasi secara cepat dan tepat terhadap fungsi pelayanan umum yang terganggu akibat gempa bumi, sebagai

¹⁰² Hasil Wawancara

contoh berkoordinasi dengan PLN untuk pemulihan aliran listrik yang mati maupun komunikasi dengan PDAM untuk memulihkan aliran air yang sangat penting bagi warga masyarakat. Di samping itu, Korem 032 / Wirabraja juga melakukan menginventarisir kekuatan yang dimiliki oleh Korem dan jajarannya, baik sumber daya personil maupun sumber daya lainnya, sehingga dapat dikerahkan ke wilayah yang terkena gempa bumi. Personil yang disiapkan diberi pengarahan singkat untuk selanjutnya diterjunkan kelapangan untuk membantu evakuasi korban, dan dengan bekal sumber daya manusia prajurit, serta sarana prasarana yang dimiliki, seperti alat berat berupa eskavator; jajaran Korem 032/Wirabraja berupaya untuk meolong korban dengan cara membongkar bangunan yang roboh menimbun warga.

b) Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana. Dalam tahapan ini, Korem 032 / Wirabraja melakukan koordinasi dengan BPBD di tingkat Propinsi dan Kabupaten / Kota untuk memberikan gambaran umum situasi dan kondisi terkini dampak-dampak gempa sehingga akan membantu BPBD dalam mengambil kebijakan/ keputusan terkait status bencana gempa bumi yang dalam perkembangannya oleh pemerintah / BNPB ditetapkan sebagai bencana berskala nasional. Penetapan skala bencana nasional di wilayah Sumatera Barat ini tidak terlepas dari informasi dampak bencana gempa bumi yang diberikan oleh Korem 032 / Wirabraja dengan jaringan komandonya sampai ketinggian Babinsa yang ada di Nagari- nagari terpelosok yang terkena bencana.

c) Penyelamatan Dan Evakuasi Masyarakat Terkena Bencana. Dalam tahapan ini, Korem 032 / Wirabraja melakukan langkah penyelamatan dan evakuasi korban dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya pencarian dan penyelamatan korban. Hal ini

dilakukan dengan membagi personil jajaran Korem 032/Wbr ke dalam berbagai kelompok menuju lokasi berdasarkan skala prioritas, diutamakan pada titik-titik yang terkena dampak gempa bumi paling parah. Para personil TNI AD jajaran Korem 032/Wbr melakukan penyisiran di setiap jalan untuk mengetahui korban yang masih hidup namun masih tertimbun di reruntuhan bangunan yang ambruk, disamping itu evakuasi secara cepat juga dilakukan terhadap korban meninggal dunia yang ada di dalam bangunan yang ambruk. Sebagai contoh adalah evakuasi terhadap para korban di Hotel Ambacang dan Gedung Sekolah Bimbingan Belajar "Primagama" yang berhasil mengevakuasi korban keluar dari bangunan yang runtuh dengan dukungan alat berat. Korem 032 / Wirabraja juga melakukan pertolongan darurat terhadap para korban yang masih hidup, namun mengalami luka, baik luka berat maupun luka ringan. Personil Korem mengambil tindakan klinis / medis pertama terhadap korban yang mengalami patah kaki, patah tangan, lemas karena kekurangan oksigen, dan sakit karena bertahan dalam reruntuhan selama beberapa hari. Pertolongan medis pertama dilakukan oleh para personil TNI dari kecabangan kesehatan sehingga para korban yang berhasil dievakuasi dalam keadaan hidup mendapatkan tindakan medis sebelum di bawa ke rumah sakit memakai ambulance sehingga nyawanya dapat tertolong.

d) Pemenuhan Kebutuhan Dasar. Dalam tahapan ini Korem 032 / Wirabraja melakukan pemenuhan kebutuhan dasar para korban bencana gempa bumi, melalui bantuan distribusi sembako kepada masyarakat terpencil / terisolir via darat dan heli. Bahkan menurut Danrem 032/Wirabraja Kolonel Infanteri Mulyono yang penulis wawancarai pada tanggal 27 Agustus 2010 mengatakan bahwa distribusi bantuan bagi korban bencana gempa bumi 30 September 2009 di wilayah Sumbar yang didistribusikan oleh Korem

032/Wirabraja dan jajarannya sampai ketingkat Babinsa yang berada di Desa/ Nagari relatif lebih lancar, cepat dan tepat sasaran, karena bantuan tersebut betul- betul sampai kemasyarakat yang membutuhkan dengan cepat tanpa melalui birokrasi yang berbelit. Kenapa ini bisa berjalan lancar; menurut Danrem karena komunikasi dan koordinasi atasan- bawahan yang sangat intens pada saat itu. Apabila ada laporan/ komunikasi yang disampaikan Babinsa yang berada ditengah- tengah korban bencana kepada Danrem, langsung direspon, karena di pos Komando Taktis yang berada di Makorem 032/Wbr sudah stand by kendaraan angkut yang di koordinir langsung oleh Danrem bekerja sama dengan IOF, sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh korban yang membutuhkan.¹⁰³ Sejalan dengan keterangan Danrem diatas, menurut Syafrudin, SE tokoh masyarakat Padang Pariaman yang penulis wawancarai, mengatakan bahwa beliau juga membentuk posko penyaluran bantuan dengan melibatkan personil Koramil dan Babinsa yang ada di Desa/ Nagari yang ditimpa bencana, karena lebih cepat, efektif dan tepat sasaran.¹⁰⁴ Disamping itu Korem dan jajarannya juga mendirikan tenda darurat untuk pengungsi, membangun dapur lapangan, membantu upaya pendistribusian air bersih yang dikoordinasikan dengan PDAM, melakukan upaya pemulihan fasilitas umum lainnya.

e) Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan. Dalam tahapan ini, Korem 032 / Wirabraja melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan yang dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial. Kelompok rentan tersebut meliputi : bayi, balita, dan anak-anak; ibu yang sedang mengandung atau menyusui; penyandang cacat; dan orang lanjut usia. Korem 032 / Wirabraja

¹⁰³ Hasil Wawancara. 27 Agustus 2010

¹⁰⁴ Hasil Wawancara 30 Oktober 2010

memberikan mendirikan tempat pengungsian yang layak bagi para ibu, balita, dan anak dimana kebutuhan dasar dipenuhi dan diberikan pula terapi semacam “trauma healing” sehingga para kelompok rentan tersebut dapat cepat pulih dari kondisi kejiwaan yang sedang depresi dan trauma akibat gempa bumi. Para lansia dan penyandang cacat juga mendapatkan pengaman yang layak, dimana personil TNI AD memberikan fasilitasi dengan mendatangkan para relawan yang datang untuk mengurus para kelompok rentan tersebut di tenda-tenda pengungsian sehingga mereka akan merasa aman dan nyaman.

f) Pemulihan Dengan Segera Prasarana Dan Sarana Vital. Dalam tahapan ini, Korem 032 / Wirabraja melakukan pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital yang dilakukan dengan memperbaiki kerusakan akibat bencana. Korem 032 / Wirabraja melakukan pengerahan alat berat untuk menyingkirkan pohon dan bangunan yang rusak sehingga menutupi jalan raya, melakukan pengerukan terhadap badan jalan yang tertutup reruntuhan tanah yang longsor, memperbaiki secara darurat / sementara terhadap pasar yang rusak, memulihkan bangunan kantor, bank, sekolah dan fasilitas umum lainnya agar dapat segera difungsikan untuk memberikan aktivitas pelayanan kepada masyarakat.

4.3.4 Peran Korem 032/Wirabraja Dalam Membantu Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Tsunami Mentawai 25 Oktober 2010.

Kodim 0319/Kepulauan Mentawai secara resmi dipimpin oleh seorang Komandan Kodim defenitif terhitung mulai tanggal 26- 06 2008. Wilayahnya cukup luas, dengan sarana komunikasi dan transportasi yang terbatas tentu akan mengalami berbagai hambatan dan tantangan dalam melaksanakan tugas bagi setiap aparat yang bertugas disana. Kodim 0319/Kepulauan Mentawai yang berada di pantai barat Pulau Sumatera berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, merupakan daerah yang sangat rawan bila ditinjau dari

aspek pertahanan negara, kerawanan tersebut dapat berupa infiltrasi, subversi, terror, sabotase dan kejahatan wilayah laut, serta ancaman gempa bumi dan gelombang tsunami

Gempa dan tsunami yang menimpa Mentawai dan sekitarnya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 malam, telah menyebabkan lebih dari 450 orang tewas, 502 orang lainnya dinyatakan hilang. Menurut Kepala Badan Provinsi Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Sumbar Harmensyah, data korban tewas itu berasal dari 10 desa di Mentawai.¹⁰⁵ Bencana di Mentawai ini mendapat respon luar biasa dari pejabat pemerintah, yang ditandai dengan kehadiran Wapres satu hari pasca gempa, diikuti oleh kehadiran Presiden SBY yang langsung terbang dari Hanoi menuju Sumatera Barat. Mereka berupaya untuk mencapai Mentawai dengan berbagai macam upaya.

Komandan Korem 032/Wirabraja, Kol Inf Mulyono bersama Bupati Kepulauan Mentawai Edison Saleleubaja, pada hari selasa pagi tanggal 26 Oktober 2010 berangkat bersama-sama dari Padang menggunakan speed boat menuju Mentawai, dan setelah berada di tengah laut menuju lokasi bencana gempa dan tsunami di Pagai Selatan, terpaksa kembali akibat ombak empat hingga lima meter di perairan pantai barat Sumbar. Danrem dan Bupati Mentawai hendak menuju Pagai Selatan dari Pantai Padang, menggunakan speed boat setelah di tengah laut terpaksa balik karena ombak besar," kata Kapenrem Sumbar, Mayor Inf Delfi Delijun.¹⁰⁶ Kondisi ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan Mayor Inf Zulfansas mantan Kasdim 0319/Mentawai pada tanggal 27 September 2010 yang lalu, yang menyatakan bahwa faktor alam menjadi kendala utama bagi aparat TNI yang bertugas disana. Seorang Babinsa bisa menempuh perjalanan berjam-jam menuju desa tanggung jawab tugasnya ditengah keterbatasan sarana transportasi yang

¹⁰⁵ Hasil Wawancara 5 Nopember 2010.

¹⁰⁶ Hasil Wawancara 27 Oktober 2010.

dimiliki dan tantangan alam yang tidak bersahabat. Upaya pengiriman bantuan ke lokasi tsunami terkendala gelombang tinggi. Danrem 032 Wirabraja Kolonel Inf Mulyono yang Selasa 26-11-2010 sekitar pukul 08.00 berangkat ke lokasi dengan kapal milik Pemkab Mentawai terpaksa kembali ke Padang."Kami tidak bisa menembus gelombang laut yang mencapai ketinggian 3,5 meter. Jadi, kami putuskan kembali ke Padang. Selain itu, alur gelombang tidak beraturan dan datang secara tiba-tiba," ujar Mulyono. Danrem dan rombongan berhasil menembus Pulau Mentawai hari Rabu (27/10) dengan kapal yang sama. "Walaupun tidak dapat masuk, anggota saya di Mentawai telah membantu warga. Saat ini kami fokus mencari warga yang dinyatakan hilang," papar Mulyono.¹⁰⁷ Masa tanggap darurat bencana tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, berakhir hari Senin (22/11/2010). Artinya, semua personel dari instansi terkait di luar pemerintah daerah setempat akan ditarik. Salah satunya adalah personel TNI yang selama ini perannya sangat vital dalam menjalankan tugas-tugas lapangan. Menurut Komandan Korem 032/Padang Kolonel Infanteri Mulyono, seluruh pasukan paling lambat sudah akan ditarik Selasa (23/11/2010) sore. Di antaranya adalah Batalyon 131/Payakumbuh yang selama ini banyak membantu distribusi logistik. Personel TNI lainnya, sebagian sudah ditarik secara bertahap, ini dilakukan terhadap batalyon yang telah menyelesaikan tugasnya dan tidak lagi diperlukan sampai masa berakhir tanggap darurat, misalnya Batalyon Kesehatan dari Kostrad. Meski demikian, personel TNI dari Kodim Kabupaten Kepulauan Mentawai, menurut Mulyono, tetap akan membantu pemerintah daerah. Masa tanggap darurat, sebagaimana prosedur penanganan bencana, berlangsung dua minggu. Itu artinya tanggap darurat berakhir pada 8 November, namun atas permintaan pemerintah daerah setempat, pemerintah pusat memperpanjang masa tanggap

¹⁰⁷ Hasil Wawancara 27 Oktober 2010

darurat dua minggu lagi. Dengan demikian, masa tanggap darurat perpanjangan berlangsung 9-22 November.¹⁰⁸

Melihat begitu besarnya tanggung jawab yang diemban oleh Korem 032/Wirabraja dan jajarannya, menurut Kapten Caj (K) Tuti Handayani, sampai saat ini Sertijab Danrem 032/Wirabraja dari Kolonel Inf Mulyono kepada Kolonel Inf Bambang Taufik belum dilaksanakan, padahal Skep Kasadnya sudah turun TMT 29 September 2010 dan Sprin Pangdamnya 30 September 2010. Kondisi ini terjadi karena Danrem masih dilibatkan dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bentuk pembangunan hunian sementara (HUNTARA).¹⁰⁹ Proyek ini berjumlah 512 unit di Pagai Utara dan Sipora Selatan yang akan dibangun oleh BNPB melalui PT.Waskita Karya dan TNI Den Zeni Tempur-2 Korem 032/Wirabraja, Sumatera Barat.¹¹⁰

a. Kegiatan yang dilaksanakan Korem 032/Wbr dan jajarannya sesuai mekanisme pada tanggap darurat adalah sebagai berikut:

1) Penyelamatan dan evakuasi korban.

a) Pengerahan Yonif 131/BRS dan Kodim 0319/Mentawai untuk melaksanakan penyelamatan dan evakuasi di Kec Sipora Selatan, Kec Sikakap, Kec Pagai Utara dan Kec Pagai Selatan.

b) Yonkes Div I Kostrad dan Denkesyah01.04.04 Padang melaksanakan pengobatan dan perawatan korban yang mengalami luka berat dan luka ringan di Kec Sipora Selatan, Kec Sikakap, Kec Pagai Utara dan Kec Pagai Selatan.

¹⁰⁸ Laporan wartawan KOMPAS FX. Laksana Agung S, Senin, 22 November 2010 | 09:32 WIB.

¹⁰⁹ Hasil Wawancara 8 Desember 2010.

¹¹⁰ Lihat Majalah Tempo Edisi 6-12 Desember 2010, hal 44.

- c) Denbeking 01.04.05B melaksanakan mendirikan tenda dan membuat dapur umum untuk pengungsi korban gempa bumi dan tsunami
- 2) Membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
 - a) Melaksanakan pengawalan dan pengamanan distribusi bantuan Logistik dari Provinsi/Daerah ke Kecamatan dan dusun di wilayah yang terkena gempa bumi dan tsunami
 - b) Melaksanakan penyaluran bantuan Logistik ke daerah terpencil/terisolir dengan pesawat Helly Kopter.
 - c) Membantu pendistribusian dan pembagian bantuan logistik di tingkat Desa sampai ke Dusun-dusun dan kemasyarakatan.
 - d) Membantu instansi terkait dalam perbaikan sarana vital yang menyangkut dengan kebutuhan dasar (air dan listrik).
 - e) Pendirian tenda-tenda darurat untuk tempat pengungsian.
- 3) Membantu pemulihan sarana dan prasarana umum.
 - a) Mengerahkan Personil Denzipur 2/PS dan Yonif 131/Brs untuk menangani Pembangunan Hunian Sementara (Huntara).
 - b) Membuka kembali jalur yang rusak akibat Gempa bumi dan tsunami di kec Sipora Selatan, kec Sikakap, kec Pagai Utara dan kec Pagai Selatan.
- 4) Perlindungan terhadap kelompok rentan.
 - a) Melakukan pengobatan kepada kelompok lansia dan anak-anak.
 - b) Bekerja sama dengan LSM mendistribusikan Logistik dan kebutuhan bagi bayi/anak-anak.
 - c) Bekerja sama dengan LSM melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Psikologi bagi anak-anak.

- 5) Kegiatan lain.
- a) Pengawasan, pengamanan dan pengendalian kegiatan NGO Asing.
 - b) Mengkoordinasikan kegiatan NGO Asing dengan instansi terkait
 - c) Melaksanakan kerja sama dalam kegiatan penanggulangan bencana dan Karya Bhakti (TNI AD- PERTAMINA)
 - d) Melaksanakan kegiatan protokoler Pam VVIP RI 1.
 - e) Melaksanakan koordinasi dengan media cetak/elektronik
 - f) Menggelar sistim komunikasi Satuan tugas dari Posko Utama Makorem 032/Wbr ke Pos kotis BIM dan Poskotis Sikakap.
 - g) Mengamankan rombongan VVIP RI 1 dan RI 2 yang berkunjung ke Padang dan Kab Kep Mentawai.
 - h) Membantu BPBD Prov. Sumbar dalam pengawasan, pengendalian dan memberikan bantuan dalam rangka melancarkan kegiatan bantuan dari NGO/LSM Asing maupun dalam Negeri pada tahap tanggap darurat.
 - i) Melaksanakan koordinasi dengan TNI AU (Lanud Tabing) tentang penggunaan Helly Copter.
 - j) Melaksanakan koordinasi dengan TNI AL (Lantamal II Padang) tentang penggunaan kapal laut.
 - k) Membantu pelaksanaan bongkar muat barang-barang bantuan di dermaga Sikakap dan ikut membantu pendistribusian logistik-logistik ke Desa dan dusun yang terkena dampak bencana alam gempa bumi dan tsunami.

Sejalan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Korem 032/ Wirabraja tersebut diatas, menurut *Setri Yasra wartawan majalah Tempo* yang melakukan liputan khusus ke Mentawai mengatakan bahwa ; “peran TNI sangat terasa saat penanggulangan bencana di Mentawai pada 25 Oktober 2010 lalu. Anggota TNI adalah tim yang pertama kali datang memberikan bantuan kesehatan kepada para korban tsunami yang berada di daerah-daerah terparah seperti *Maonai dan Muntei Baru-baru, Kepulauan Pagai*. Namun demikian masih sulit mengukur apakah peran TNI sudah memenuhi prinsip penanggulangan bencana secara profesional, karena kegiatan yang dilakukan itu masih sporadis dan dilakukan karena terjadi kelambatan oleh lembaga-lembaga lain. Peran Korem 032 Wirabraja sangat bagus dalam penanggulangan pertama bencana yang terjadi di Mentawai. Anggota Korem 032, adalah tim pertama kali datang bersama tim kesehatan memberikan bantuan untuk daerah-daerah yang paling parah terkena bencana, walaupun dengan dukungan sarana, sumber daya prajurit dan anggaran masih sangat minim dalam mengemban tugas penanggulangan bencana. Kondisi ini tentunya tidak kondusif bagi anggota TNI dalam melaksanakan tugas tersebut.¹¹¹

4.4. Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Menghadapi Ancaman Bencana Alam.

Bentuk ancaman nonmiliter sangat bervariasi dan kompleks, baik yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, hukum maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, pemberdayaan pertahanan nirmiliter harus mempertimbangkan karakteristik ancaman nonmiliter dan kompetensi fungsional lembaga yang menanganinya. Kementerian/LPNK yang terkait agar segera mengambil langkah-langkah strategis guna mengantisipasi ancaman nonmiliter, termasuk menyiapkan kemampuan yang diperlukan untuk mengatasinya. Dengan mengingat kompleksitas ancaman nonmiliter yang tidak selalu dapat diatasi oleh satu sektor atau fungsi, maka koordinasi lintas sektoral harus diintensifkan, termasuk mengefektifkan keberadaan badan-badan koordinasi lintas sektoral yang sudah ada,

¹¹¹ Hasil Wawancara 20 Desember 2010.

antara lain Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam (BNPB), Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Agar koordinasi lintas sektoral tersebut lebih efektif, dalam penyusunan rencana strategis pertahanan nirmiliter berkoordinasi dengan Kementerian/LPNK.¹¹² Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan adalah terciptanya ketahanan daerah yang semakin kuat, sehingga dapat mewujudkan daya tangkal (*deterrence function*) daerah terhadap berbagai bentuk ancaman. Dalam Sistem Pertahanan yang bersifat semesta harus melibatkan semua potensi nasional, dimana semua potensi nasional tersebut oleh Komando Kewilayahan TNI AD dilaksanakan dengan Pembinaan Teritorial yang diarahkan untuk menumbuhkan semangat perlawanan rakyat guna menghadapi berbagai hakekat ancaman yang dapat mengganggu keutuhan dan kedaulatan NKRI, baik dalam perspektif ancaman peperangan maupun ancaman non perang dalam kondisi damai, seperti *ancaman bencana alam* yang tiada henti menimpa beberapa wilayah nusantara ini.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, *Prof.Dr.Burhan D Magenda* mengatakan bahwa; 'dengan adanya perkembangan global, maka Strategi Ketahanan Nasional haruslah dengan memperkuat lembaga- lembaga yang ada serta mengatasi persoalan pangan dan energi. Dalam konteks ini pulalah pertahanan negara umumnya dan kegiatan Binter harus diarahkan untuk mendukung menguatnya Ketahanan Nasional. Dihadapkan dengan kondisi wilayah, maka bentuk- bentuk apa dari Binter untuk tiap wilayah dapat disesuaikan menurut keperluan geografinya, kepadatan penduduk serta pertimbangan lainnya. Selanjutnya menurut *Burhan D Magenda* bahwa jika dalam masa awal reformasi fungsi Binter telah disalah artikan dan dideskreditkan sehingga dikesankan sama dengan Dwi Fungsi ABRI, maka hal ini adalah suatu kekeliruan karena fungsi Binter adalah bagian dari Sistem Pertahanan Semesta yang merupakan keunggulan dari Negara- Negara yang pernah bergerilya seperti China, Indonesia, Vietnam dan Aljazair. *Bahkan dalam situasi sekarang Binter banyak membantu masyarakat dalam situasi non perang seperti bencana alam, kurang gizi dan*

¹¹² Lihat; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014

kelaparan, pendidikan anti buta huruf serta pemberantasan penyakit menular seperti HIV/AIDS, flu burung, demam berdarah dan lain- lain. Berkaitan dengan itu saat ini diperlukan suatu “trust building” terutama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan generasi muda, yang banyak salah mengerti baik karena kurangnya penjelasan dan komunikasi sosial maupun karena “generation gap”. Kemudian juga diperlukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi lain seperti pemerintah daerah dan Polri, sehingga bisa dicegah adanya kompetisi yang tidak sehat. Untuk itu perlu diaktifkan kembali peran koordinasi Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) disemua tingkat, dari Bupati sampai Kepala Desa. Dengan demikian Binter bisa ditingkatkan koordinasinya dari “trust building” menjadi “capacity building”.¹¹³ Bahkan sejalan dengan sistem pertahanan semesta tersebut diatas, *Arifin dari forumzakat.net* menawarkan alternative lain misalnya berupa sistem yang mirip konsep **HANKAMRATA** (pertahanan keamana rakyat semesta) yang berarti sistem yang melibatkan publik dalam kondisi penanganan darurat. Itu sebagai contoh. Belum lagi mengenai kebijakan dan penyediaan dana penanggulangan bencana, isu koordinasi dsb. Kita memerlukan sistem tanggap bencana baru yang paradigmatic”, maksud dari gagasan ini sebagai cara pandang ketanggap-bencana dengan cara baru yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Konsep ini memandang seluruh dimensi yang mungkin terkait seperti manusia, waktu, sumberdaya, budaya, ekonomi, geososial, teknologi, dsb, dalam penanganan kebencanaan untuk pencegahan dan kesiagaan bencana: kita perlu memperkuat konsep *early warning system* yang modern, penguatan budaya dan cerita rakyat yang tanggap bencana, planologi dan tata ruang yang mencegah korban dan pembuatan sarana darurat jika diperlukan, arsitektur bangunan yang melindungi, pranata sosial, konsep pendidikan bahkan konsep ekonomi sosial yang peduli dan tanggap bencana hingga akan akan mencegah atau mengurangi akibat bencana. “Gagasan ini bisa diuji dan ditetilkkan menjadi suatu sistem tanggap bencana alternatif, memang perlu tim yang berisi beberapa teman

¹¹³ Burhan D. Magenda, *Penyiapan Pertahanan Negara Ditinjau dari Strategi Ketahanan Nasional*, Makalah Seminar Nasional “Menyiapkan Pertahanan Negara Melalui Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Dalam Rangka Mengamankan Kepentingan Nasional Bersama Komponen Bangsa Lainnya”, Jakarta, Auditorium FKUI Salemba, 23 April 2008.

yang ahli di bidangnya dan mau peduli".¹¹⁴ Pendapat tersebut diatas sejalan dengan Rohnya Pembinaan Teritorial itu sendiri yakni; kemandirian TNI- rakyat, sehingga upaya yang berkaitan dengan pemberdayaan potensi wilayah yang meliputi aspek geografi, demografi dan kondisi sosial yang dikelola dan diberdayakan menjadi kekuatan kewilayahan dalam bentuk Ruang, Alat dan Kondisi Juang yang tangguh dapat diwujudkan, kekuatan ini dalam kondisi damai akan sangat bermanfaat apabila didayagunakan untuk kepentingan penanggulangan bencana alam, seperti yang telah diimplementasikan oleh Korem 032/Wirabaja dan jajarannya di wilayah Sumbar.

Menurut *DR. Yuddy Chrisnandi*; "semula ia sependapat dengan keinginan pembubaran Koter/Kowil, karena dengan organisasi dan beban birokrasinya sangat membebani anggaran negara, tetapi setelah melihat kondisi riil dilapangan dengan wilayah Indonesia yang cukup luas dan berpulau- pulau, ditambah lagi dengan keterbatasan alat sista yang dimiliki TNI, maka kehadiran Babinsa, Koramil, Kodim/Korem dan seterusnya merupakan suatu jawaban kebutuhan akan kehadiran TNI, apalagi beberapa tahun terakhir ini kita sering dilanda masalah sengketa perbatasan, pulau- pulau terluar yang harus selalu dijaga demi kedaulatan Negara, illegal logging, illegal fishing serta *ancaman bencana alam* yang sering terjadi beberapa tahun terakhir ini.¹¹⁵ Bahkan menurut *Setri Yasra seorang Wartawan Majalah Tempo* yang melakukan liputan khusus ke Sumbar, mengakui dan setuju sekali dengan ide pemberdayaan wilayah pertahanan (yang dikenal dengan istilah Binter) yang dilakukan oleh Korem 032 dalam kondisi damai lebih difokuskan sebagai lembaga yang menjadi *pusat komando penanggulangan bencana*. Menurut beliau ini penting, karena hampir seluruh wilayah rawan bencana di Sumbar, sudah terdapat personel Korem 032/Wirabaraja. Dengan kondisi geografis Indonesia seperti sekarang ini dan dikaitkan dengan bencana alam yang masih sering terjadi, ide pembubaran Korem belum tepat. Keberadaan lembaga ini masih diperlukan.¹¹⁶

¹¹⁴<http://www.bencana.net/sosok/sistem-tanggap-bencana-yang-paradigmatik.html>

¹¹⁵ Hasil Wawancara, Jakarta, 25 Oktober 2010.

¹¹⁶ Hasil Wawancara, Jakarta 20 Desember 2010.

Hal senada juga diungkapkan oleh *Dasrial Kepala Staf Resimen Maharuyung* Sumbar bahwa pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan yang dikenal dengan Binter itu dalam kondisi damai lebih disinergikan untuk menghadapi ancaman bencana, dan dia tidak sependapat dengan ide pembubaran Kowil/ Koter sebagaimana yang diinginkan oleh segelintir kalangan, karena kenyataannya dilapangan masih sangat dibutuhkan, bahkan yang bersangkutan setiap terjadi bencana selalu berkoordinasi dengan aparat TNI diwilayah seperti Danramil dan Babinsa.¹¹⁷

4.5 Pendapat Para Narasumber tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan Bencana dan Keterlibatan TNI serta Pemberdayaan Wilhan dalam Penanggulangan Bencana.

a. Menurut Kolonel Inf. Mulyono (Danrem 032/Wirabraja);¹¹⁸

Tanpa mengecilkkan arti keberadaan dan peran Pemda, BNPB/BPBD, TNI (Khususnya Korem 032/ Wirabraja & jajarannya) pada saat terjadi gempa bumi 30 September 2009 banyak berbuat dan bergerak cepat membantu masyarakat yang menjadi korban. Assesment yang kita ambil ternyata lebih efektif, untuk distribusi logistik khususnya pada tanggap darurat bekerja sama dengan IOF, 80 truk dan 4 helly stand by. Apabila ada laporan dari Babinsa yang berada diwilayah terparah kena dampak bencana langsung kita respon. Pemberdayaan Babinsa dalam konteks memantau kerusakan dan kebutuhan logistik diwilayah pada tahap tanggap darurat sangat efektif, dan menjadi ujung tombak lewat sarana komunikasi yang dimiliki seperti HT maupun Handphone. Saya mohon maaf, saya tidak mengambil alih tugas Pemda dan BNPB/BPBD pada saat bencana terjadi, tetapi semua yang dilakukan demi kepentingan masyarakat, yang kita hadapi ini bencana, dan masyarakat banyak yang jadi korban, dalam situasi darurat birokrasinya jangan terlalu berbelit- belit. Saat gempa terjadi pukul 17.00 sore; pukul 23.00 malamnya di 8 titik terparah sudah tergelar anggota saya baik dari Yonif 131/Braja Sakti Payakumbuh dan Yonif 133/Yudha Sakti Padang, padahal mereka juga merupakan bagian dari korban bencana. Kita sudah punya protap baku penanggulangan bencana; saat terjadi bencana selamatkan diri dan keluargamu, setelah itu apel luar biasa dan siap dikerahkan untuk membantu masyarakat yang menjadi korban bencana.

¹¹⁷ Hasil Wawancara, 6 Januari 2011.

¹¹⁸ Wawancara dilaksanakan tanggal 27 Agustus 2010 di Makorem 032/Wirabraja Jalan Jend.Sudirman No.29 Padang.

b. Menurut Setri Yasra Wartawan/Redaktur Majalah Tempo yang meliput langsung selama seminggu Gempa Bumi & tsunami Mentawai 25 Oktober 2010.¹¹⁹

Kebijakan nasional penanggulangan bencana alam sejatinya sudah cukup memadai. Aturan-aturan yang ada di Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sudah cukup baik. Namun, undang-undang yang baik itu menghadapi kendala dalam implementasi di lapangan. Kebijakan nasional penanggulangan bencana belum berjalan secara baik di lapangan. Implementasi aturan tersebut masih belum berjalan secara optimal karena ketidaksiapan infrastruktur maupun sumber daya mana manusia. Seluruh komponen bangsa, pemerintah maupun masyarakat harus bersatu padu dalam menanggulangi kondisi buruk yang muncul akibat bencana alam. Indonesia sebagai negara yang sangat rawan terjadi bencana alam, harusnya menjadi sebuah dasar bagi pemerintah untuk menyiapkan sebuah sistem penanggulangan bencana nasional terpadu yang melibatkan peran serta masyarakat luas.

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Nasional dalam kenyataannya saat ini belum mampu merespons bencana alam yang datang tiba-tiba dengan medan yang begitu berat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pusat maupun daerah belum mampu mengorganisasi kegiatan penyelamatan korban bencana, maupun dalam penyaluran bantuan. Salah satu persoalan mendasar dari aturan itu adalah belum adanya sosialisasi yang baik dan merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Alhasil, ketika bencana datang, semua komponen penanggulangan bencana seperti BNPB, Basarnas, pemerintah daerah, PMI dan lembaga-lembaga lain seperti bergerak sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi yang baik.

BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai saat ini sudah hadir hampir di seluruh provinsi dan kabupaten Indonesia. Lembaga ini merupakan amanat-amanat undang-undang. Keberadaan BNPB dan BPBD saat ini dirasakan belum mampu merespons dan menanggulangi bencana alam yang terjadi di Indonesia. Seperti yang terjadi saat bencana gempa dari tsunami menerjang Kabupaten Mentawai pada 26 Oktober 2010 lalu. Lembaga penanggulangan bencana yang ada sangat lamban dalam memberikan respons pertama terhadap korban yang berada di medan-medan yang sangat berat. Mungkin saja, tidak adanya personel tetap membuat koordinasi di BNPB dan BPBD sangat sulit dan lambat. Belum terpenuhi unsur-unsur dan prinsip cepat dan tepat dalam penanggulangan bencana yang dilakukan BNPB dan BPBD.

Peran TNI sangat terasa saat penanggulangan bencana di Mentawai pada 26 Oktober 2010 lalu. Anggota TNI adalah tim yang pertama kali datang

¹¹⁹ Wawancara dilaksanakan tanggal 06 Desember 2010 di Perum Bumi Bekasi Baru Jl. Blue Safir 5 No.168 Rawalumbu Bekasi Timur.

memberikan bantuan kesehatan kepada para korban tsunami yang berada di daerah-daerah terparah seperti Maonai dan Muntei Baru-baru, Kepulauan Pagai Masih sulit mengukur apakah peran TNI sudah memenuhi prinsip penanggulangan bencana secara profesional. Karena kegiatan yang dilakukan itu masih sporadic dan dilakukan karena terjadi kelambatan oleh lembaga-lembaga lain. Peran Korem 032 Wirabuana sangat bagus dalam penanggulangan pertama bencana yang terjadi di Mentawai. Anggota Korem 032, adalah tim pertama kali datang bersama tim kesehatan memberikan bantuan untuk daerah-daerah yang paling parah terkena bencana. Setuju sekali, untuk-daerah rawan bencana, keberadaan Korem 032 lebih difokuskan sebagai lembaga yang menjadi pusat komando penanggulangan bencana. Ini penting karena hampir seluruh wilayah rawan bencana, sudah terdapat personel Korem 032. Belum adanya Dukungan sarana, sumber daya prajurit dan anggaran masih sangat minim dalam mengemban tugas penanggulangan bencana. Kondisi ini tentunya tidak kondusif bagi anggota TNI dalam melaksanakan tugas tersebut. Dengan kondisi geografis Indonesia seperti sekarang ini dan dikaitkan dengan bencana alam yang masih sering terjadi, pembubaran Korem belum tepat. Keberadaan lembaga ini masih sangat diperlukan.

c. Menurut Mayor Inf Zulfansaz Kasdim 0319/Mentawai;¹²⁰

Kebijakan nasional penanggulangan bencana alam saat ini sudah cukup baik sebagai rambu-rambu bagi pelaksana dan pelaksanaan penanggulangan bencana alam. Kebijakan tersebut sudah berjalan, namun belum efektif dan belum terimplementasikan dengan baik sampai kedaerah, terkesan ada yang ditutup-tutupi, terutama berkaitan dengan dana, akibat regulasi yang berbelit-belit. Dalam penanggulangan bencana alam tidaklah sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah, tetapi seluruh komponen bangsa bertanggung jawab dan berpartisipasi untuk itu. Namun dalam mengantisipasi ancaman bencana alam sebaiknya diberikan kepada instansi pemerintah/aparat pemerintah. UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam sudah mampu merespon ancaman bencana yang terjadi. UU tersebut sudah tersosialisasi sampai kedaerah namun implementasinya perlu ditingkatkan, hal tersebut dikarenakan beberapa faktor antara lain; 1) Sumber daya manusia (SDM) yang membidangi bencana alam; 2) kondisi geografi, terutama daerah/wilayah yang sama sekali belum pernah ditimpa/ terkena bencana alam; 3) sarana dan prasarana pendukung; 4) motivasi. BPBD sudah terbentuk diseluruh wilayah provinsi/ Kabupaten/ Kota, minimal kerangka organisasinya. Dihadapkan dengan bencana alam yang pernah dialami badan ini sudah mampu dengan catatan perlu ditingkatkan dan selama unsure

¹²⁰Wawancara dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2010 di Mako Secata B Padang Panjang Sumatera Barat.

pelaksana benar- benar bekerja untuk kemanusiaan, tentu sudah efektif berjalan dibawah satu komando dengan prinsip cepat, tepat dan prioritas.

Peran TNI membantu Pemda dalam penanggulangan bencana alam saat ini; TNI sebagai alat Negara bekerja sesuai regulasi yang memandunya, artinya TNI dapat berbuat, bekerja dan bertindak peraturan dan per undang-undangan yang berlaku. Secara umum peran yang dimainkan TNI sudah memenuhi prinsip- prinsip OMSP, namun perlu didukung peralatan yang cukup. Peran Kowil (Korem 032/ Wirabraja) dalam membantu Pemda untuk menanggulangi bencana gempa bumi di Sumbar cukup maksimal/ baik walaupun mereka sendiri (institusi TNI) merasakan, mengalami bencana secara langsung. Pemberdayaan Wilhan sebenarnya sudah dan sedang dilakukan oleh Korem 032/Wbr, namun karena diwilayah Sumbar terutama Pemprov/Pemkab/Pemko tidak/ belum memahami konsep- konsep yang ada pada TNI (Korem 032/Wbr), sehingga perlu waktu menyampaikan konsep- konsep pemberdayaan wilhan. Institusi TNI belum didukung untuk siap pakai dalam penanggulangan bencana, yang ada selama ini adalah pengalih fungsian sarana dan prasarana. Tentang ide pembubaran Koter/Kowil kita harus tahu latar belakang segelintir kalangan masyarakat, kalau dasar pemikiran/ referensi/ sudut pandang yang digunakan tumbuh dari budaya bangsa serta tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa Indonesia; Kowil tidak perlu dibubarkan (masih relevan).

a. **Prof DR Burhan D Magenda;**¹²¹ mengatakan bahwa dengan adanya perkembangan global, maka strategi ketahanan nasional haruslah dengan memperkuat lembaga- lembaga yang ada serta mengatasi persoalan pangan dan energy. Dalam konteks ini pulalah pertahana Negara umumnya dan kegiatan Binter harus diarahkan untuk mendukung menguatnya Ketahanan Nasional. Dihadapkan dengan kondisi wilayah, maka bentuk bentuk apa dari Binter untuk tiap wilayah dapat disesuaikan menurut keperluan geografinya, kepadatan penduduk serta pertimbangan lainnya. Jika dalam masa awal reformasi, fungsi Binter telah disalah artikan dan dideskreditkan sehingga terkesan sama dengan Dwi Fungsi ABRI, maka hal ini adalah suatu kekeliruan karena fungsi Binter adalah bagian dari Sistem Pertahanan Semesta, yang merupakan keunggulan dari Negara- Negara yang pernah bergerilya seperti China, Indonesia, Vietnam dan Aljazair. Bahkan dalam situasi sekarang, Binter banyak membantu masyarakat dalam situasi non perang seperti bencana alam, kurang gizi dan kelaparan, pendidikan anti buta huruf serta pemeberantasan penyakit menular seperti HIV/AIDS, flu burung, demam berdarah dan lain- lain.

¹²¹ Burhan D. Magenda, *Penyiapan Pertahanan Negara di Tinjau dari Stategi Ketahanan Nasional*, Makalah Seminar Nasional “ Menyiapkan Pertahanan Negara Melalui Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Dalam Rangka Mengamankan Kepentingan Nasional Bersama Komponen Bangsa Lainnya” Pada Tanggal 23 April 2008, di Auditorium FKUI Salemba Jakarta.

Berkaitan dengan itu saat ini diperlukan “trust building” terutama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan generasi muda, yang banyak salah mengerti baik karena kurangnya penjelasan dan komunikasi sosial maupun karena “generation gap”. Kemudian juga diperlukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi lain seperti Pemda dan Polri, sehingga bisa dicegah kompetisi yang tidak sehat. Untuk itu perlu diaktifkan kembali peran koordinasi Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) disemua tingkat, dari Bupati sampai Kepala Desa. Dengan demikian Binter bisa ditingkatkan koordinasinya dari “trust building” menjadi “capacity building”. Koordinasi ini juga diperlukan untuk mengontrol satuan tugas dan milisi yang dimiliki partai dan organisasi massa, sehingga TNI menjadi koordinator semua milisi, paramiliter dan satgas.

e. **Menurut Yudha Luqianto Ketua Tahnas Konas Resimen Mahasiswa Jakarta** yang selalu terlibat dalam relawan BNPB diberbagai daerah mengatakan bahwa; sebagai organisasi baru, pengisian personel BNPB kebanyakan diambil/ diminta dari berbagi Kementerian Negara/LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen). Seyogyanya yang diberikan para personel terbaik, akan tetapi kenyataannya malah sebaliknya.¹²²

f. **Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengusulkan agar TNI menjadi bagian dari BNPB. Ini dilihat atas pantauan penanganan bencana di Wasior, Papua Barat, tsunami Mentawai, dan erupsi gunung Merapi. Menurut beliau :**

“BNPB selama ini belum bisa bekerja secara efektif, terlihat belum bakunya Standar Operasional Prosedur dan tidak memadainya sumber daya manusia dilapangan hingga birokrasi yang masih ruwet. Sementara relawan dari organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat lebih mampu bersikap termasuk dalam penggalangan dana. TNI lebih menonjol perannya dari pada aparat BNPB. Perlu dipertimbangkan TNI sebagai unsur utama BNPB, ujar Mahfudz. Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini melanjutkan, UU TNI memungkinkan alat Negara bertugas dengan fungsi operasi militer nonperang. Karena itu, perlu penguatan peran TNI di BNPB. Caranya, para pejabat TNI direkrut permanen, misalnya sebagai deputy operasi. TNI punya kesiapan dan kemampuan dalam tahap aksi tanggap darurat melalui unit disaster quick response dan dalam tahap rehabilitasi serta rekonstruksi melalui korps Zeni. Hambatan pembentukan BNPB daerah bisa diatasi karena SDM TNI tersedia dengan jumlah memadai di setiap Kodam, Korem dan Kodim.

¹²² Hasil Wawancara 27 Oktober 2010 Di Perpustakaan Pasca Sarjana UI Jl.Salemba Raya No 4 Jakarta

korps Zeni. Hambatan pembentukan BNPB daerah bisa diatasi karena SDM TNI tersedia dengan jumlah memadai di setiap Kodam, Korem dan Kodim.¹²³

g. Menurut Laksda (Purn) Wahyono SK, Phd, persiapan penanggulangan bencana meliputi kegiatan antara lain; “menyiapkan jaringan organisasi penanggulangan bencana dari pusat sampai daerah yang bersifat tetap dan yang mobilisasi, menyiapkan depo- depo penanggulangan bencana ditiap propinsi dan daerah rawan bencana. serta menyiapkan petunjuk pelaksanaan yang segera dapat dilaksanakan didaerah bencana.¹²⁴

h. Sedangkan kondisi riil dilapangan menurut Dasrial Kasmen Maharuyung Sumbar yang setiap kali terjadi bencana didaerah ini selalu menjadi relawan;

Kebijakan penanggulngan bencana dibawah kendali BNPB/ BPBD didaerah Sumbar ini terkesan lamban dalam mengambil sikap dan tindakan yang diperlukan terutama pada masa tanggap darurat. Banyak tindakan yang diambil terkesan tidak efektif dan tidak terencana dengan baik. Sedangkan pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan yang dikenal dengan Binter itu dalam kondisi damai menurut saya sebaiknya lebih disinergikan untuk menghadapi ancaman bencana, dan saya tidak sependapat dengan ide pembubaran Kowil/ Koter sebagaimana yang diinginkan oleh segelintir kalangan, karena kenyataannya dilapangan masih sangat dibutuhkan, bahkan setiap terjadi bencana diwilayah Sumatera Barat ini, saya selalu berkoordinasi dengan aparat TNI diwilayah seperti Danramil dan Babinsa.¹²⁵

i. Menurut anggota Komisi I DPR RI Nurhayati Ali Assegaf dari pemantauan beliau secara langsung dilapangan;

TNI patut diberikan apresiasi, karena kerja TNI sangat cepat dan bagus, koordinasi yang terukur. BNPB bisa meningkatkan kerja sama dengan TNI dalam menanggulangi bencana karena TNI terlatih dan mampu menghadapi persoalan dengan cepat. Ia bahkan memimpikan BNPB seperti TNI, bekerja cepat, terlatih dan bisa bekerja sama dengan banyak pihak. Politisi perempuan dari partai Demokrat itu menambahkan, berdasarkan kemampuannya penanggulangan bencana, maka sudah saatnya Alutsista yang dimiliki TNI kedepan harus multifungsi. Bisa sebagai alat perang dan bisa juga sebagai alat untuk misi kemanusiaan, membawa bantuan bagi korban

¹²³ Patriot, *Kesiapan TNI Dalam Penanggulangan Bencana*. Laporan Utama. Edisi No.71.Tahun XII, Januari 2011; hal :10.

¹²⁴ Wahyono, SaK Laksda TNI (Purn), diberikan saat Kuliah Manajemen Pertahanan PKN-UI Angkatan 27, Semester Genap Tahun 2010.

¹²⁵ Hasil Wawancara 06 Januari 2011 Via Telpon dari Jakarta dengan Beliau yang Berada Di Padang.

bencana seperti pembelian pesawat Hercules dan kapal angkut mengingat Indonesia merupakan Negara kepulauan.¹²⁶

j. Menurut *DR. Yuddy Chrisnandi*; “semula saya sependapat dengan keinginan pembubaran Koter/Kowil, karena dengan organisasi dan beban birokrasinya sangat membebani anggaran negara, tetapi setelah melihat kondisi riil dilapangan dengan wilayah Indonesia yang cukup luas dan berpulau-pulau, ditambah lagi dengan keterbatasan alat sista yang dimiliki TNI, maka kehadiran Babinsa, Koramil, Kodim/Korem dan seterusnya merupakan suatu jawaban kebutuhan akan kehadiran TNI, apalagi beberapa tahun terakhir ini kita sering dilanda masalah sengketa perbatasan, pulau-pulau terluar yang harus selalu dijaga demi kedaulatan Negara, illegal logging, illegal fishing serta *ancaman bencana alam* yang sering terjadi beberapa tahun terakhir ini.¹²⁷

4.6 Tabel; Rangkuman Pendapat tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan Bencana, Peran TNI (Kowil) dan Pemberdayaan Wilhan dalam Menghadapi Bencana.

No.	Informan/Narasumber	Rangkuman Pendapat
1	Kolonel Inf. Mulyono	Tanpa mengecilkan arti keberadaan dan peran Pemda, BNPB/BPBD, TNI (Khususnya Korem 032/ Wirabraja & jajarannya) pada saat terjadi bencana telah berbuat dan bergerak cepat membantu masyarakat yang menjadi korban. Semua yang dilakukan demi kepentingan masyarakat, yang kita hadapi ini bencana, dan masyarakat banyak yang jadi korban, dalam situasi darurat birokrasinya jangan terlalu berbelit-belit.
2	Setri Yasra	Kebijakan nasional penanggulangan bencana menghadapi kendala dalam implementasi di lapangan, aturan tersebut masih belum berjalan secara optimal. Peran TNI sangat terasa saat penanggulangan bencana di Mentawai. Keberadaan Kowil lebih difokuskan sebagai lembaga yang menjadi pusat komando penanggulangan bencana.
3	Prof DR Burhan D Magenda	Dalam situasi sekarang, Binter banyak membantu masyarakat dalam situasi non perang seperti bencana alam,

¹²⁶ Patriot, *Kesiapan TNI Dalam Penanggulangan Bencana*, Laporan Utama, Edisi No.71, Tahun XII, Januari 2011; hal :10.

¹²⁷ Hasil Wawancara, 25 Oktober 2010. Di Tebet Barat Jakarta.

4	DR. Yuddy Chrisnandi	Kehadiran Babinsa, Koramil, Kodim/Korem dan seterusnya merupakan suatu jawaban kebutuhan akan kehadiran TNI, apalagi beberapa tahun terakhir ini kita sering dilanda masalah sengketa perbatasan, pulau-pulau terluar yang harus selalu dijaga demi kedaulatan Negara, illegal logging, illegal fishing serta <i>ancaman bencana alam</i>
5	Mahfudz Siddiq	TNI lebih menonjol perannya dari pada aparat BNPB. Perlu dipertimbangkan TNI sebagai unsur utama BNPB,
6	Nurhayati Ali Assegaf	TNI patut diberikan apresiasi, karena kerja TNI sangat cepat dan bagus, koordinasi yang terukur. BNPB bisa meningkatkan kerja sama dengan TNI. sudah saatnya Alutsista yang dimiliki TNI kedepan harus multifungsi.
7	Laksda (Purn) Wahyono SK, Phd	persiapan penanggulangan bencana meliputi kegiatan antara lain; “menyiapkan jaringan organisasi penanggulangan bencana dari pusat sampai daerah yang bersifat tetap dan yang mobilisasi, menyiapkan depo- depo penanggulangan bencana di tiap propinsi dan daerah rawan bencana. serta menyiapkan petunjuk pelaksanaan yang segera dapat dilaksanakan di daerah bencana
8	Dasrial Kasmen Maharuyung Sumbar	Kebijakan penanggulagn bencana dibawah kendali BNPB/ BPBD di daerah Sumbar ini terkesan lamban dalam mengambil sikap dari tindakan. Koter/Kowil sangat dibutuhkan, bahkan setiap terjadi bencana di wilayah Sumbar relawan selalu berkoordinasi dengan aparat TNI di wilayah seperti Danramil dan Babinsa.
9	Mayor Inf Zulfansaz Kasdim 0319/Mentawai	Kebijakan Nasional Penanggulangan bencana sudah berjalan, namun belum efektif, Secara umum peran yang dimainkan TNI sudah memenuhi prinsip-prinsip OMSP, namun perlu didukung peralatan yang cukup. Peran Kowil (Korem 032/ Wirabraja) dalam membantu Pemda untuk menanggulangi bencana gempa bumi di Sumbar cukup maksimal. Belum dipahaminya konsep pemberdayaan wilhan oleh Pemprov/Pemkab/Pemko.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan :

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil sebagai Pelajaran berharga bagi pemerintah baik pusat maupun daerah pada umumnya, dan Institusi TNI pada khususnya dari hasil penelitian pada tesis ini adalah sebagai berikut :

5.1.1 Sejak tahun 2007, Kebijakan Nasional Penanggulangan Bencana berpedoman kepada Undang- undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang mengamanatkan tanggung jawab penanggulangan bencana kepada BNPB dan BPBD , dimana didalam organisasinya terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Didalam unsur pengarah salah satunya melibatkan Organisasi TNI. Dalam implementasi dilapangan dari hasil penelitian ini, BNPB/BPBD masih menghadapi berbagai kendala dalam upaya penanggulangan bencana.

5.1.2 Melihat potensi ancaman bencana yang cenderung meningkat dan mengacu kepada salah satu tugas dalam konteks OMSP yang diemban TNI, Korem 032 / Wirabraja telah melakukan langkah-langkah strategis, teknis, dan implementatif dalam membantu penanggulangan ancaman bencana di wilayah Sumatera Barat, terutama disaat tanggap darurat. Keterlibatan dan peran TNI khususnya Korem 032/ Wirabraja terlihat pada saat gempa bumi Sumbar 30 September 2009 dan Gempa bumi yang didikuti gelombang tsunami Mentawai 25 Oktober 2010.

5.1.3 Dari hasil penelitian lapangan yang disertai wawancara dari berbagai narasumber, Pemberdayaan Wilayah Pertahanan yang dilakukan Korem 032/ Wirabraja pada masa damai, ternyata bermanfaat signifikan apabila didayagunakan untuk mengantisipasi ancaman bencana dalam perspektif Ketahanan Wilayah demi mewujudkan Ketahanan Nasional.

5.2 Saran.

Ada beberapa saran dari hasil penelitian dalam tesis ini, yang diharapkan untuk masa mendatang dapat menjadi perhatian bagi segenap stake holder dan masyarakat yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana di Indonesia pada umumnya, dan wilayah Sumatera Barat pada khususnya; antara lain adalah sebagai berikut :

5.2.1 Perlunya sinkronisasi regulasi kebijakan penanggulangan bencana yang melibatkan segenap institusi Pemerintah baik dipusat maupun di daerah, termasuk implementasi keterlibatan TNI serta partisipasi aktif masyarakat, sehingga kecepatan dan ketepatan bertindak dapat dipertanggung jawabkan.

5.2.2 Perlunya Pemda Kabupaten / Kota di wilayah Sumatera Barat ataupun BPBD di kabupaten / Kota se wilayah Sumatera Barat melakukan simulasi teknis, atau dalam istilah militer gladi posko dan gladi lapangan, guna mengantisipasi gempa bumi dan bahkan simulasi penyelamatan diri apabila gelombang tsunami melanda. Masyarakat harus memahami pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menghadapi gempa bumi sehingga mereka akan lebih siap secara mental dan fisik menghadapi gempa bumi setiap saat.

5.2.3 Perlunya Pemerintah Pusat, Propinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Kabupaten / Kota di Sumatera Barat melengkapi sarana prasarana / fasilitas pendukung bagi BPBD Propinsi dan Kabupaten / Kota, seperti alat berat berupa eskavator dan lain-lain, yang sangat penting dalam evakuasi korban bencana dari reruntuhan bangunan. Pengalaman gempa bumi di Sumatera Barat menunjukkan bahwa alat berat yang tidak dimiliki oleh BPBD telah menyulitkan evakuasi korban dari dalam bangunan yang runtuh, sehingga Korem 032/ Wirabraja berupaya mengerahkan alat berat TNI AD (Yon Zikon) yang didatangkan dari Payakumbuh.

5.2.4 Perlu adanya alat Komunikasi wilayah berupa radio untuk sarana informasi dari lokasi bencana ke pusat pengendalian operasi bagi masing-masing Instansi terkait yang dipergunakan untuk penanganan bencana.

5.2.5 Diperlukan pembangunan infrastruktur berupa jalan evakuasi menuju tempat pengungsian yang memadai.

5.2.6 Perlu adanya pendataan dan pengorganisasian potensi kewilayahan seperti angkutan umum, darat, laut, sungai, dan udara, baik yang dimiliki institusi pemerintah, swasta, maupun masyarakat pada umumnya yang setiap saat siap dimobilisasi sebagai sarana bantuan yang dapat digunakan dalam penanganan bencana alam pada masa tanggap darurat.

5.2.6 Perlu dirumuskan Strategi dalam penanggulangan bencana yang terdiri dari 3 tahapan; yakni: *pertama* merumuskan legislasi konsep staf gabungan militer-sipil dalam Tim Pengarah BPBD; *kedua* merumuskan RO dan Protap Penanggulangan Bencana bersama antara Korem dan Pemda; dan yang *ketiga* merumuskan peran dan tugas Komando Kewilayahan untuk menciptakan kesiapsiagaan seluruh komponen masyarakat sebagai bagian dari usaha mitigasi bencana dalam konteks pemberdayaan wilayah pertahanan menghadapi ancaman non militer.

DAFTAR PUSTAKA

- Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Barnest MC, *Company Organization : Theory and Practice*, London, George Allen & Unwin Ltd, 1969, p.118.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar- Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Bodley, John H, *Anthropology and Contemporary Human Problems*, California, Cummings Publishing Company, 1976.
- B.Djohan, Eniarti, *Mengapa Kajian Bencana*, Masyarakat Indonesia, Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia, Jilid XXXIII, No.2, 2007, Jakarta, LIPI Press, 2007
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002.
- Diamond, Larry dan Plattner Marc F, *Hubungan Sipil- Militer dan Konsolidasi Demokrasi*, Penerjemah Tri Wibowi Budi Santoso, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ermaya Suradinata, Alex Dinuth, *Geopolitik dan Konsepsi Ketahanan Nasional*, Jakarta, PT Paradigma Cipta Yatsigama, 2001.
- Edy Prasetyono dkk, *Sistem Keamanan Nasional dalam Penanggulangan Kasus Bencana Alam*, Jakarta, Pacivis UI, 2008
- Hari Murti Krida Laksana, *Kamus Linguistik*, Jakarta, PT.Gramedia, 1993.
- J. Moleong, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT. Remaja Rosda Karya, 2002.
- Jamal A. Rahman & Nurbaity, *Memperkuat Tentara Nasional Indonesia, Implementasi Peran TNI dalam Sejarah Bangsa*, Jakarta, Yayasan Karya Pemuda Indonesia, 2006.
- Ikawati. Yuni. *Gempa Aceh. Bumi Aceh Masih Berkonsolidasi*, Jakarta, KOMPAS, Senin 17 Mei 2010,

- Korem 032/Wbr, *Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi dan Tanah Longsor Di Wil Rem/032Wbr Prov Sumbar*, Padang, Oktober 2009.
- Korem 032/Wbr, *Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di Kab.Kep. Mentawai Wilayah Korem 032/Wirabraja*. Padang, Nopember 2010.
- Maarif, Syamsul, *Militer Dalam Masyarakat, Menuju TNI Profesional di Era Reformasi*, Disertasi, Jakarta, 2007.
- Mabesad, STERAD, *Vademikum Teritorial Angkatan Darat*, Cetakan Pertama, Edisi Tahun 2009, Jakarta Desember 2009.
- Markas Besar TNI, *TNI abad 21, Redefenisi, Reposisi, dan Reaktualisasi Peran TNI Dalam Kehidupan Bangsa*, Jakarta, CV.Jasa Buma, 1999.
- M. Bambang Pranowo, *Multidimensi Ketahanan Nasional*. Jakarta, Pustaka Alvabet, 2010.
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan kuantitatif*, Yogyakarta, 2007.
- Nusa Bhakti, Ikrar, *Xenofobia, dalam buku Bencana Gempa dan Tsunami, Nanggroe Aceh Daraussalam & Sumatera Utara*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, PT.Kompas Media Nusantara, 2005.
- Pohan, Ramadhan & TIM, *Sisi Lain Hankam Kita*, Jakarta, GARASI, , 2010
- Riant Nugroho, *Public Policy*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, 2008.
- Roger F.Soltau, *An Introduction to Politic* (London; Longmans, 1961).
- Salim,Peter& Salim,Yenny, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*, Jakarta, Modern English Press, 1995.
- Simangunsong, *Mangasi Peranan TNI dalam Menanggulangi Terorisme*, Tesis 2006
- Soedarsono, Sumarsono, *Ketahanan Pribadi dan Ketahanan Keluarga Sebagai Tumpuan Ketahanan Nasional*, Jakarta, Intermasa, Cetakan II, 1997.

- Soetomo Sakijo Admodjo, *Optimalisasi Strategi Kompartemensi Wilayah Pertahanan Pada Korem 121/ABW, Kalimantan Barat*, Jurnal Ketahanan Nasional, Program Studi Ketahanan Nasional Sekolah Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta, Desember 2009
- Staf Umum Teritorial Mabesad, *Vademikum Teritorial Angkatan Darat*, Jakarta, Desember 2009, Cetakan Pertama, Edisi Tahun 2009
- Sunardi,R.M, *Pembinaan Ketahanan Bangsa, Dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan NKRI*, Jakarta, PT Kuartemita Adidarma, 2004.
- Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/ 142 / 2002 tanggal 4 Juni 2002, tentang Penyebutan Gelar Komando Kewilayahan.
- Teguh Santosa dkk, KOMISI I, *Senjata-Satelit-Diplomasi*, Jakarta, PT Suara Harapan Bangsa, Sept 2009, hal 73.
- Theodorson, George A. dan Archiles G.Theodorson, *A Modern Dictionary of Sociology*, New York, A Barnes & Noble Books, 1969.
- Wahyono, SK Laksda TNI (Purn), *Manajemen Pertahanan PKN-UI Angkatan 27, Semester Genap Tahun 2010*.
- Wan Usman, *Daya Tahan Bangsa*, Jakarta, Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003.

Makalah/ Paper

- Burhan D. Magenda, *Penyiapan Pertahanan Negara Ditinjau dari Strategi Ketahanan Nasional*, Makalah Seminar Nasional “Menyiapkan Pertahanan Negara Melalui Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Dalam Rangka Mengamankan Kepentingan Nasional Bersama Komponen Bangsa Lainnya”, Jakarta, 23 April 2008.
- Wardaya,Sulistya, *Potret Bencana Sosial di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam sosialisasi& sarasehan bencana sosial di Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014

Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/35/XI/2007 Tanggal 21 Nopember 2007 tentang PRCPB TNI.

Peraturan KASAD; *Nomor Perkasad/17/IV/2008* Tanggal 8 April 2008 Tentang Organisasi dan Tugas Komando Resort Militer (Orgas Korem).

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 *Tentang Pertahanan Negara*

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 *Tentang Tentara Nasional Indonesia*

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 *Tentang Penanggulangan Bencana Alam.*

Media Cetak/ Majalah/ Buletin

Kompas, Perubahan Iklim, *Kesehatan Masyarakat juga Terkena Dampak*, Jakarta, Kamis 22 Juli 2010.

Kompas, *Opini, Tajuk Rencana, Menyelamatkan Bumi Kita*, Jakarta, Rabu 21 Juli 2010.

Kompas, *Ilmu pengetahuan& Teknologi, Gempa Besar Masih Mengancam*, Jakarta, Rabu 27 Oktober 2010.

Media Indonesia, Senin 1 November 2010. Eko Yulianto, Peneliti Paleotsunami LIPI, *Letusan Gunung dan Tsunami Menghantui*, Jakarta, Nopember 2010.

Media Indonesia, Editorial, *Tsunami Mentawai Bencana Kebijakan*, Jakarta, , Sabtu 30 Oktober 2010.

Media Indonesia, *Mandul, Badan Nasional Penanggulangan Bencana*, Jakarta, Koran Harian Media Indonesia; Senin 1 Nopember 2010.

Media Indonesia, *Masih Ada Potensi Gempa 9,0 SR*, Jakarta, Senin 26 Juli 2010.

Patriot, Majalah Tentara Nasional Indonesia, Suprpto, *Pemberdayaan Wilayah Pertahanan, Laporan Utama*, Jakarta, CV.Satya Geminastiti, edisi 47, 2008.

Patriot, Edisi No 53, 2009. Majalah Tentara Nasional Indonesia, Supriyadi, Brigjen TNI, *TNI Dalam Penanggulangan Bencana*,

Patriot, Media Komunikasi Prajurit TNI, Laporan Utama, *Sapta Tunggal Kebijakan Panglima TNI 2010*, Majalah Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, CV.Satya Geminastiti, 2010.

Patriot, *Kesiapan TNI Dalam Penanggulangan Bencana*, Laporan Utama, Edisi No.71, Tahun XII, Januari 2011.

Republika, Opini, Rahardi Ramelan Guru Besar ITS Surabaya, *Tsunami dan Perang*, Jakarta, Republika, Rabu 3 Nopember 2010

Tempo, Majalah Berita Mingguan, *Terkatung di Kilometer 37*, Edisi 6-12 Desember 2010.

Yudhagama, No.85 Tahun XXIX Edisi Desember 2009. Media Informasi dan Komunikasi TNI AD, George Toisutta, *Peran TNI Angkatan Darat Dalam Penanggulangan Bencana*,

Situs Internet

<http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=1255>.

<http://dutamasyarakat.com/artikel-23950-atasi-bencana-butuh-peran-tni.html>.

<http://dendiagusti.blogspot.com/2010/12/budaya-gotong-royong-dalam-pembangunan.html>

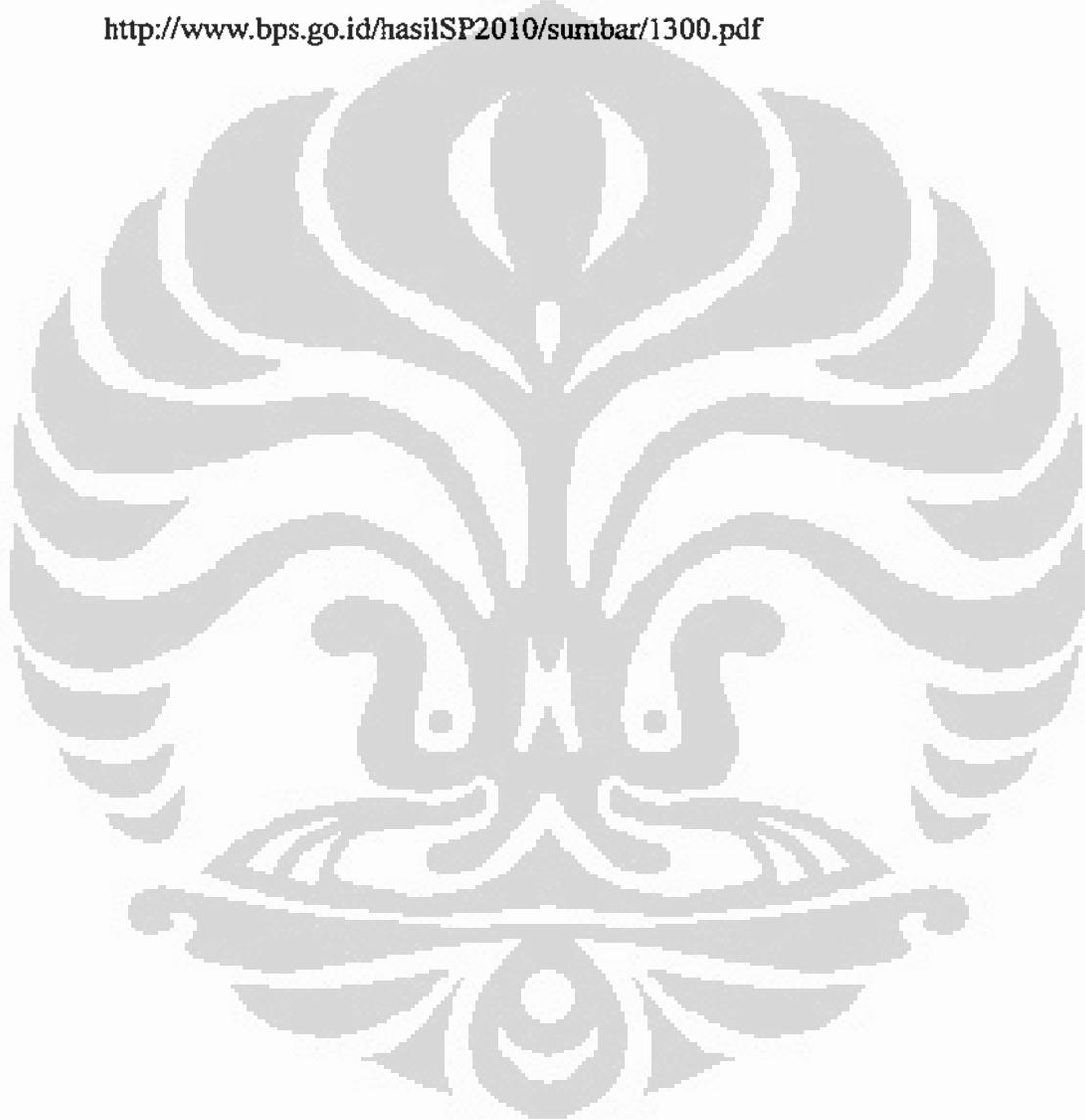
<http://www.mail-archive.com/porsenipar@opja.or.id/msg01740.html>

http://rindam-brawijaya.blogspot.com/2010_05_09_archive.html , *Sosialisasi Susunan Organisasi TNI dan Optimalisasi Peran TNI*

<http://ayahrachmat.blogspot.com/2009/10/ring-of-fire.html> Wikipedia ,Pacific Ring of Fire,USGS Description : Ring of Fire, Plate Tectonics, Sea Floor Spreading, Subduction Zone, Hot Spot., dalam

<http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=41729>Rabu,27 Oktober 2010 , 08:50:00 Tsunami Sapu Mentawai.

<http://www.bps.go.id/hasilSP2010/sumbar/1300.pdf>



Lampiran 1

DAFTAR PENGERTIAN

1. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.¹
2. **Bencana alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.²
3. **Bencana non alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.³
4. **Bencana sosial** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.⁴
5. **Penyelenggaraan penanggulangan bencana** adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.⁵
6. **Ancaman** pada hakekatnya adalah setiap usaha dan kegiatan, baik yang berasal dari luar negeri atau bersifat lintas Negara maupun yang timbul didalam negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara, dan keselamatan segenap bangsa.⁶

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, BAB I, Ketentuan Umum, Pasal 1, ayat 1

² *Ibid*, ayat 2

³ *Ibid*, ayat 3

⁴ *Ibid*, ayat 4

⁵ *Ibid*, ayat 5

⁶ Departemen Pertahanan RI, *Doktrin Pertahanan Negara*, Jakarta, Dephan RI, Cetakan Pertama, Desember 2007, hal 19.

7. **Kesiapsiagaan** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.⁷
8. **Peringatan dini** adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.⁸
9. **Mitigasi** adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.⁹
10. **Tanggap darurat bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.¹⁰
11. **Rehabilitasi** adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.¹¹
12. **Rekonstruksi** adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun.¹²
13. **Ancaman bencana** adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.¹³
14. **Rawan bencana** adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan

⁷ Ibid, ayat 7

⁸ Ibid, ayat 8

⁹ Ibid, ayat 9

¹⁰ Ibid, ayat 10

¹¹ Ibid, ayat 11

¹² Ibid, ayat 12

¹³ Ibid, ayat 14

mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.¹⁴

15. *Bantuan darurat bencana* adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.¹⁵

16. *Status keadaan darurat bencana* adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.¹⁶

17. *Komando Resort Militer* disingkat *Korem* adalah Badan Pelaksana Kodam sebagai Subkompartemen Strategis matra darat yang bersifat kewilayahan dan berkedudukan langsung dibawah Pangdam.¹⁷

18. *Pemerintah Pusat*, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸

19. *Pemerintah daerah* adalah gubernur, bupati/walikota atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.¹⁹

20. *Badan Nasional Penanggulangan Bencana*, yang selanjutnya disingkat dengan **BNPB**, adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰

21. *Badan Penanggulangan Bencana Daerah*, yang selanjutnya disingkat **BPBD**, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.²¹

22. *Pemberdayaan Wilayah Pertahanan* adalah kemampuan TNI untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan tangkal, deteksi, dan cegah dini terhadap berbagai perkembangan situasi dan kondisi yang dapat mengganggu stabilitas

¹⁴ Ibid, ayat 15

¹⁵ Ibid, ayat 19

¹⁶ Ibid, ayat 20

¹⁷ Peraturan KASAD; Nomor Perkasad/17/IV/2008 Tanggal 8 April 2008 Tentang Orgas Korem; Hal 1.

¹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Bab 1.

Pasal 1: Ayat 16.

¹⁹ Ibid, Ayat 17

²⁰ Ibid, Ayat 18

²¹ Ibid, Ayat 19.

kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memberdayakan kepekaan teritorial, serta membantu pemerintah memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.²²

23. *Pembinaan Teritorial TNI AD* adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan serta pengendalian potensi wilayah yang diselenggarakan bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa dalam rangka menjadikan wilayah darat sebagai ruang, alat dan kondisi juang guna kepentingan pertahanan negara aspek darat.²³

24. *Tugas pokok TNI* adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.²⁴

²² Mabasad, Staf Umum Teritorial, *Vademikum Teritorial Angkatan Darat*, Cetakan Pertama, Edisi Tahun 2009, Jakarta, Desember 2009; hal 452.

²³ Markas Besar TNI AD, *Buku Petunjuk Induk tentang Teritorial*, Jakarta, 2002, hal 28.

²⁴ Undang-Undang RI No 34/2004 tentang TNI, Pasal 7, Ayat 1.

Lampiran 2**DAFTAR NARA SUMBER/ INFORMAN PENELITIAN**

NO 1	Instansi/Unit/Organisasi 2	Jabatan 3	Nama 4	Ket 5
1	Masyarakat	Wk Sekjen DPP HANURA (Mantan Anggota Komisi I DPR RI). Ketua Komisi I DPR RI Dosen Fisip& PKN UI Sekjen LVRI/DosenPKN UI Anggota Komisi I DPR RI Pengamat Militer Guru Besar ITS Surabaya TokohMasyarakat Pariaman Redaktur Majalah Tempo Kasmien Maharuyung Sumbar (Relawan)	Dr.Yuddy Chrisnandi, ME Mahfudz Siddiq Prof.DR Burhan D Magenda Laksda (Purn) Wahyono, Sk,PHD Nurhayati Ali Assegaf Edy Prasetyono Rahardi Ramelan Syafruddin Setri Yasra Dasril	
2	BNPB BPBD Prop Sumbar	Kasi Tahnas Konas Menwa (Relawan BNPB) Kepala BPBD	Yudha Luqiasco Harmensyah	
3	Kodam I/BB	Kapendam I/BB Kasrem 032/Wirabraja Pasibinkomsos Rem 032/Wirabraja Pasi Bhakti TNI Rem 032/ Wirabraja Kasetum Rem 032/Wirabraja	Letkol Caj Asren Nasution Letkol Inf Yan Pulung Mayor Caj. Wendrizal Mayor Inf. Risa Wilsu Kpt (K) Caj Tuti H	
4	Unit Analisis	Danrem 032/Wirabraja Dandim 0308/Pariaman Dandim 0319/Mentawai	Kol. Inf. Mulyono Mayor Inf. Yondri Nova Mayor Inf. Zulfansaz	

Lampiran 3

GARIS BESAR WAWANCARA TERHADAP NARASUMBER

1. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap *ancaman terjadinya bencana*, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.

PERTANYAAN

- a. Bagaimana menurut bapak/ibu kebijakan nasional penanggulangan bencana alam saat ini?
 - b. Apakah kebijakan tersebut sudah berjalan secara efektif dan terimplementasi dengan baik sampai ke tingkat daerah ?
 - c. Bagaimana sebaiknya respon kita, baik pemerintah maupun segenap komponen bangsa ini mengantisipasi ancaman bencana alam yang sering terjadi disebagian besar wilayah NKRI ini?
2. Banyak peraturan perundang-undangan tidak bisa berjalan karena lemahnya koordinasi antar lembaga/ instansi pemerintah.

PERTANYAAN

- a. Apakah dengan terbitnya UU No.24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana sudah mampu merespon ancaman bencana yang terjadi?
 - b. Apakah UU tersebut telah tersosialisasi dan terimplementasi dengan baik sampai ke tingkat daerah?
3. Sesuai amanat UU 24/2007 tersebut, ditingkat pusat dibentuk BNPB dan di daerah dibentuk BPBD, sebagai suatu badan yang bertanggung jawab dalam upaya penanggulangan bencana.

PERTANYAAN

- a. Apakah badan ini sudah terbentuk diseluruh wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang ada di Indonesia?

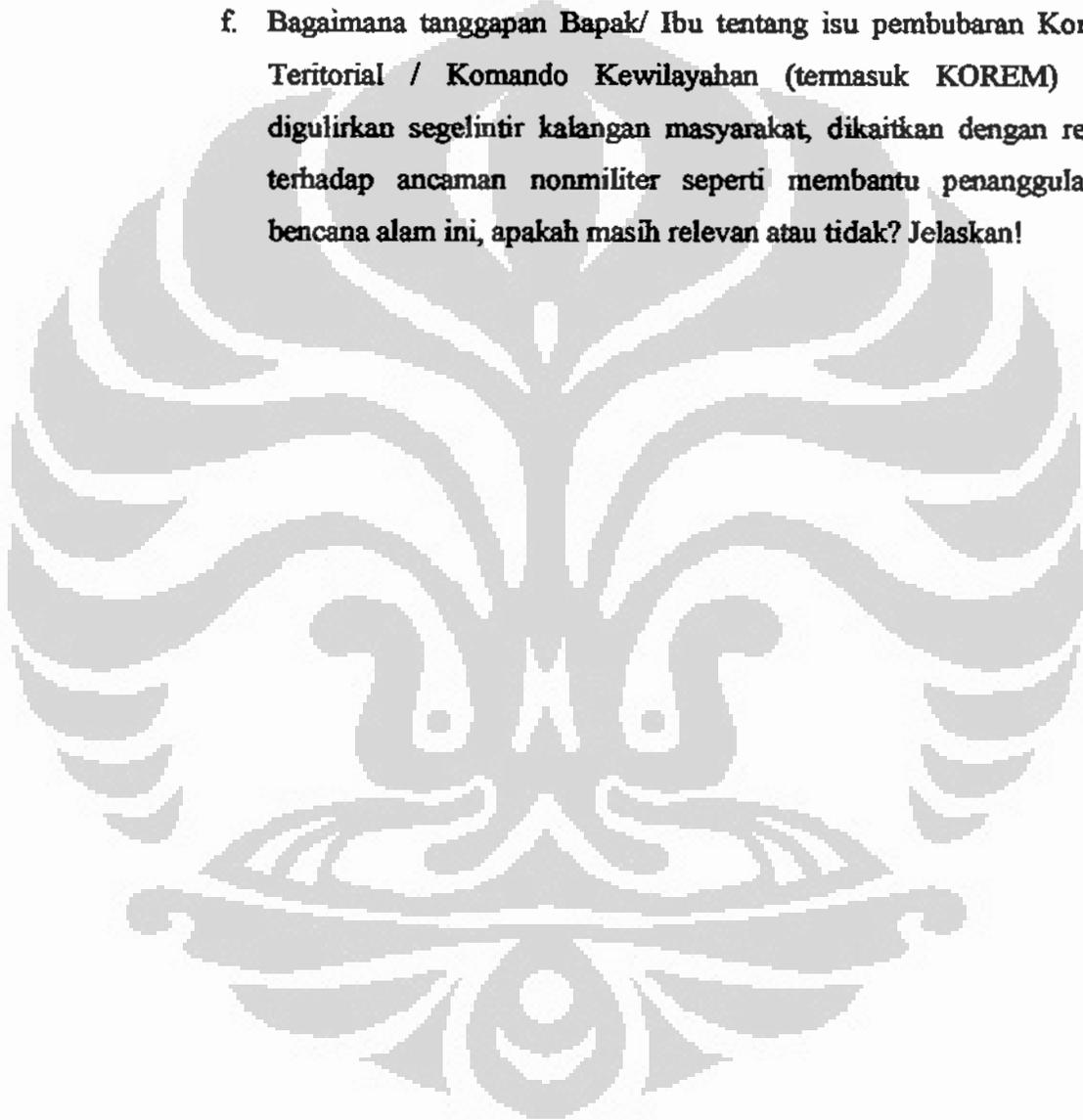
- b. Apakah Badan ini sudah mampu merespon ancaman bencana yang terjadi dengan baik?
 - c. Apakah unsur pelaksana BNPB yang tidak memiliki keanggotaan yang bersifat tetap, melainkan memanfaatkan keberadaan organisasi-organisasi yang berada di pemerintah atau masyarakat seperti TNI, lembaga medis, LSM dan organisasi sosial lainnya sudah efektif berjalan dibawah satu komando sampai ketinggian daerah?
 - d. Apakah sudah terpenuhi prinsip- prinsip cepat dan tepat, prioritas, serta koordinasi dan keterpaduan dalam penanggulangan bencana saat ini dibawah kendali BNPB/BPBD?.
4. *Pasal 7 UU 34/ 2004* dinyatakan bahwa *Tugas pokok TNI* adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari *ancaman* dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok dimaksud dilakukan dengan operasi militer untuk perang (OMP);, dan operasi militer selain perang, (OMSP); yang antara lain *membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan.*

PERTANYAAN.

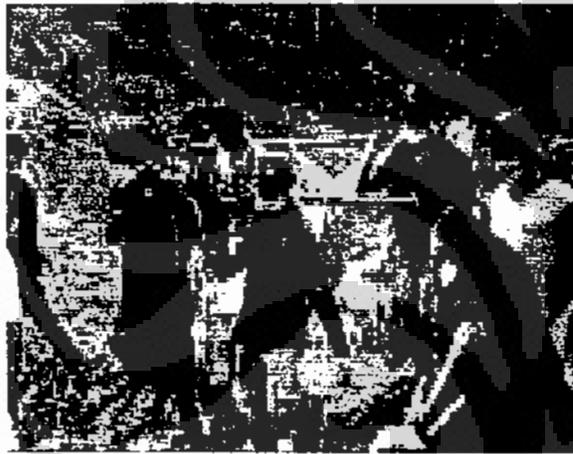
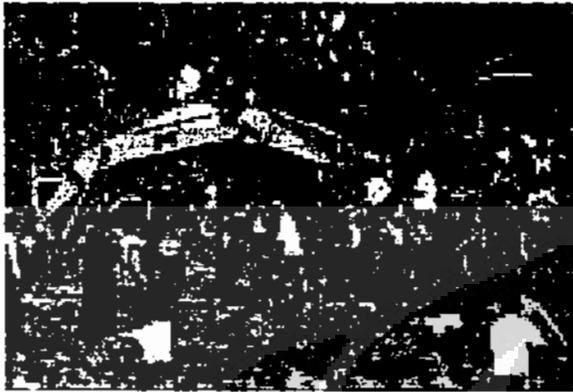
- a. Bagaimana tanggapan Bapak/ Ibu tentang peran TNI dalam membantu penanggulangan bencana alam saat ini?
- b. Apakah peran TNI dalam membantu penanggulangan bencana alam sudah memenuhi prinsip- prinsip OMSP secara profesional?
- c. Bagaimana Bapak/Ibu melihat peran Komando Kewilayahan (Korem 032/Wirabraja) dalam membantu penanggulangan bencana gempa bumi Sumbar tanggal 30 September 2009 serta gempa bumi dan gelombang tsunami Mentawai 25 Oktober 2010 yang lalu?
- d. Apakah Bapak/ Ibu setuju bahwa dalam kondisi damai, sebaiknya pemberdayaan wilayah pertahanan (yang dikenal dengan istilah

disinergikan pada upaya mengantisipasi ancaman bencana alam yang sering terjadi? Jelaskan!

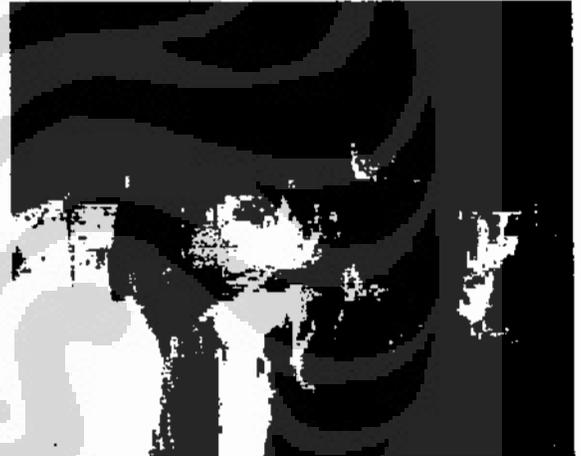
- e. Apakah menurut Bapak/ Ibu Institusi TNI sudah didukung dengan sarana, sumber daya prajurit dan anggaran yang memadai dan siap pakai dalam membantu penanggulangan bencana?
- f. Bagaimana tanggapan Bapak/ Ibu tentang isu pembubaran Komado Teritorial / Komando Kewilayahan (termasuk KOREM) yang digulirkan segelintir kalangan masyarakat, dikaitkan dengan respon terhadap ancaman nonmiliter seperti membantu penanggulangan bencana alam ini, apakah masih relevan atau tidak? Jelaskan!



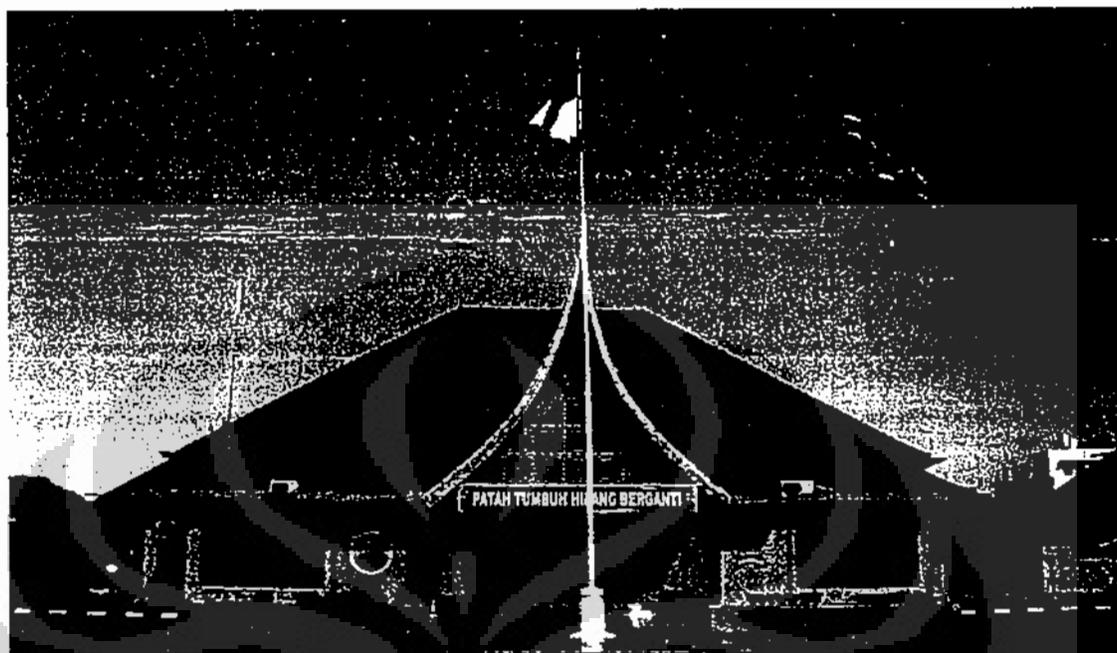
PARIAMAN



MENTAWAI



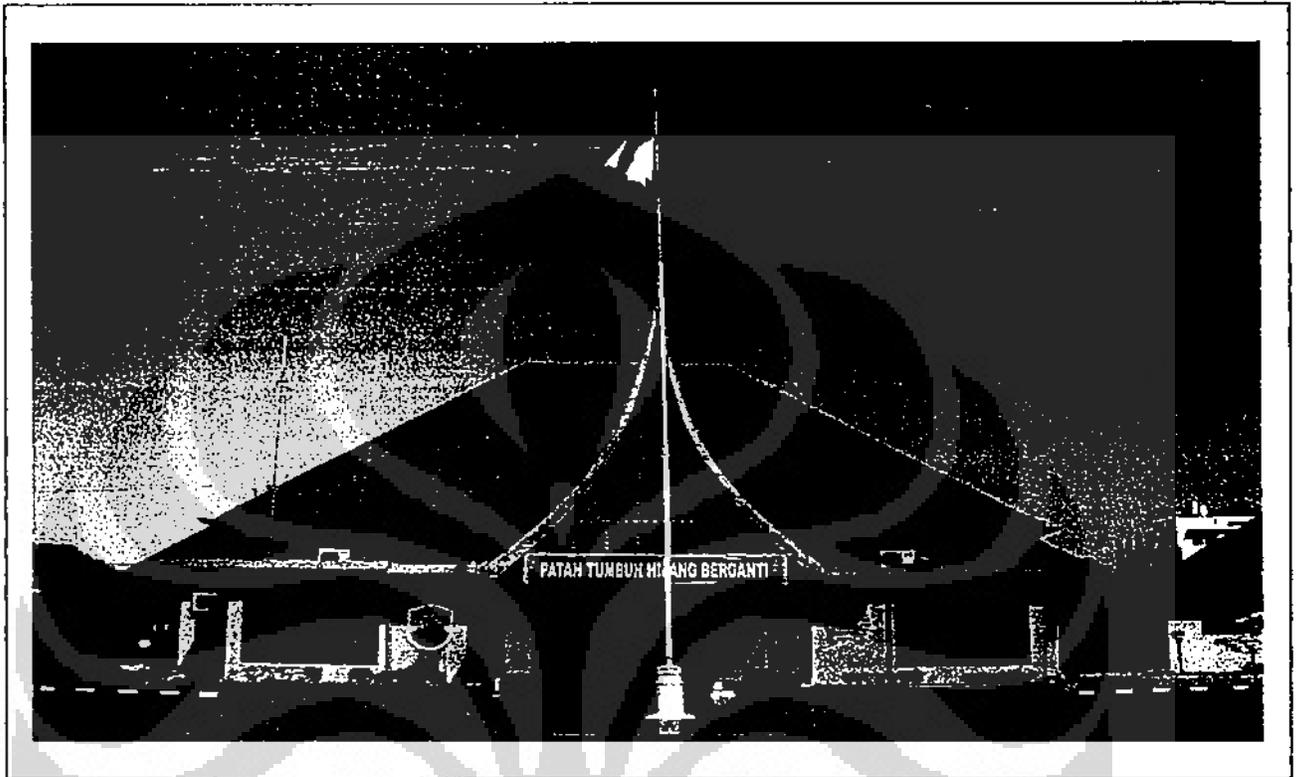
KANTOR MAKOREM 032/WIRABRAJA



KUNJUNGAN KASAD PADA SAAT BENCANA GEMPA BUMI TANGGAL 30 SEPTEMBER 2009



MARKAS KOMANDO KOREM 032/WIRABRAJA



MARKAS KODIM 0304/AGAM



MARKAS KODIM 0305/PASAMAN



MARKAS KODIM 0306/50 KOTA



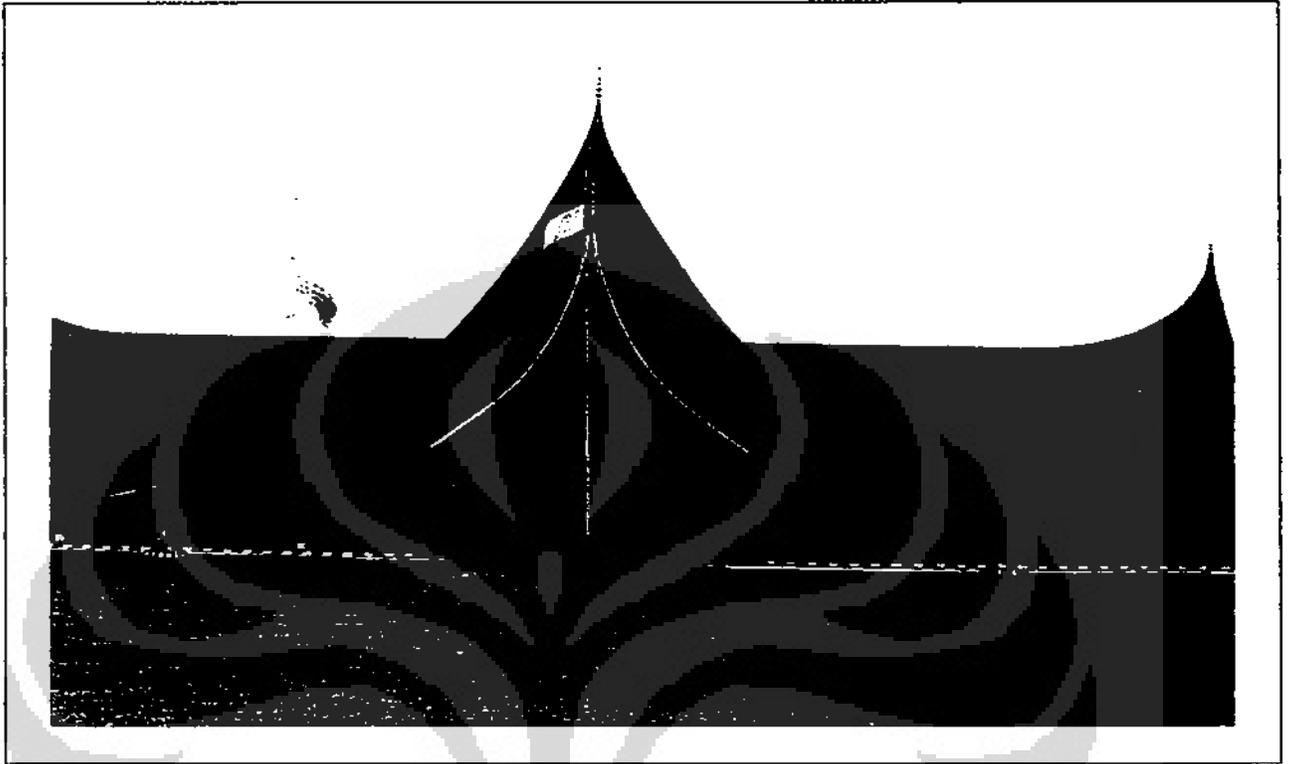
MARKAS KODIM 0307/TANAH DATAR



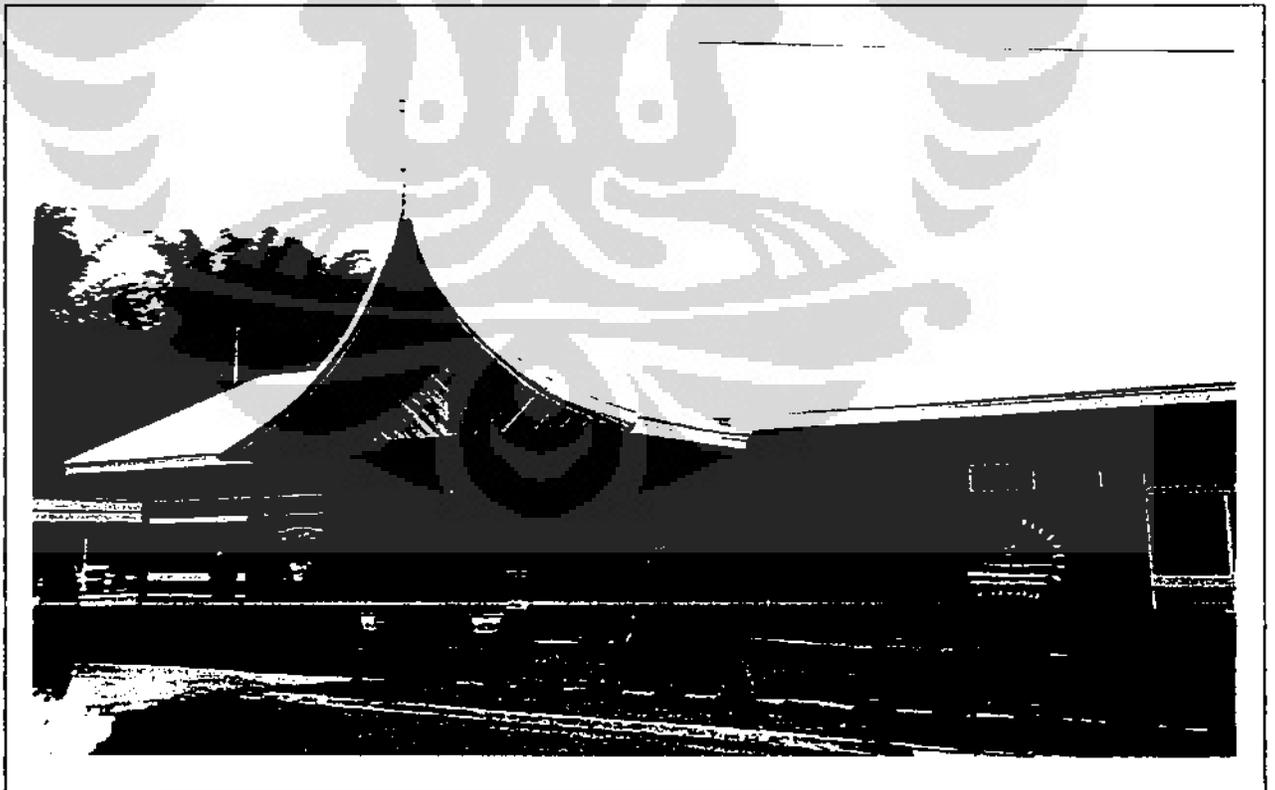
MARKAS KODIM 0308/PARIAMAN



MARKAS KODIM 0309/SOLOK



MARKAS KODIM 0310/SWL – SJJ



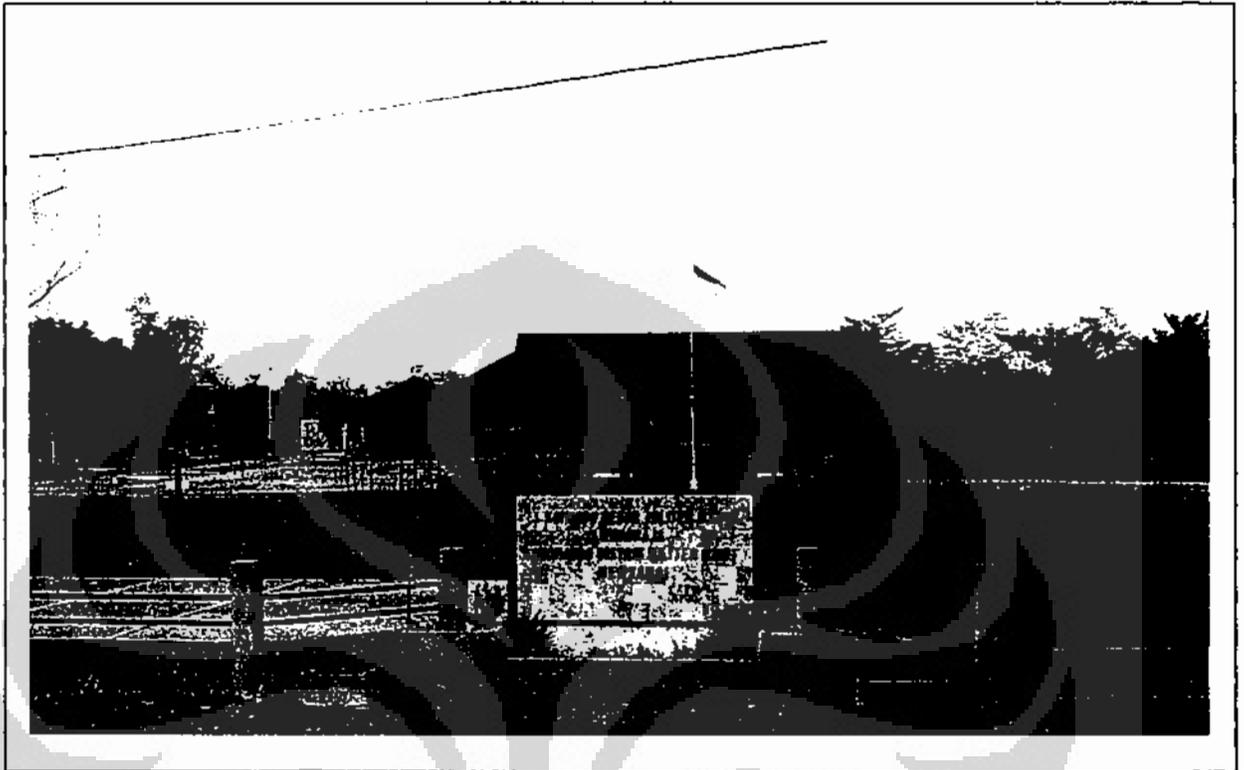
MARKAS KODIM 0311/PAINAN



MARKAS KODIM 0312/PADANG



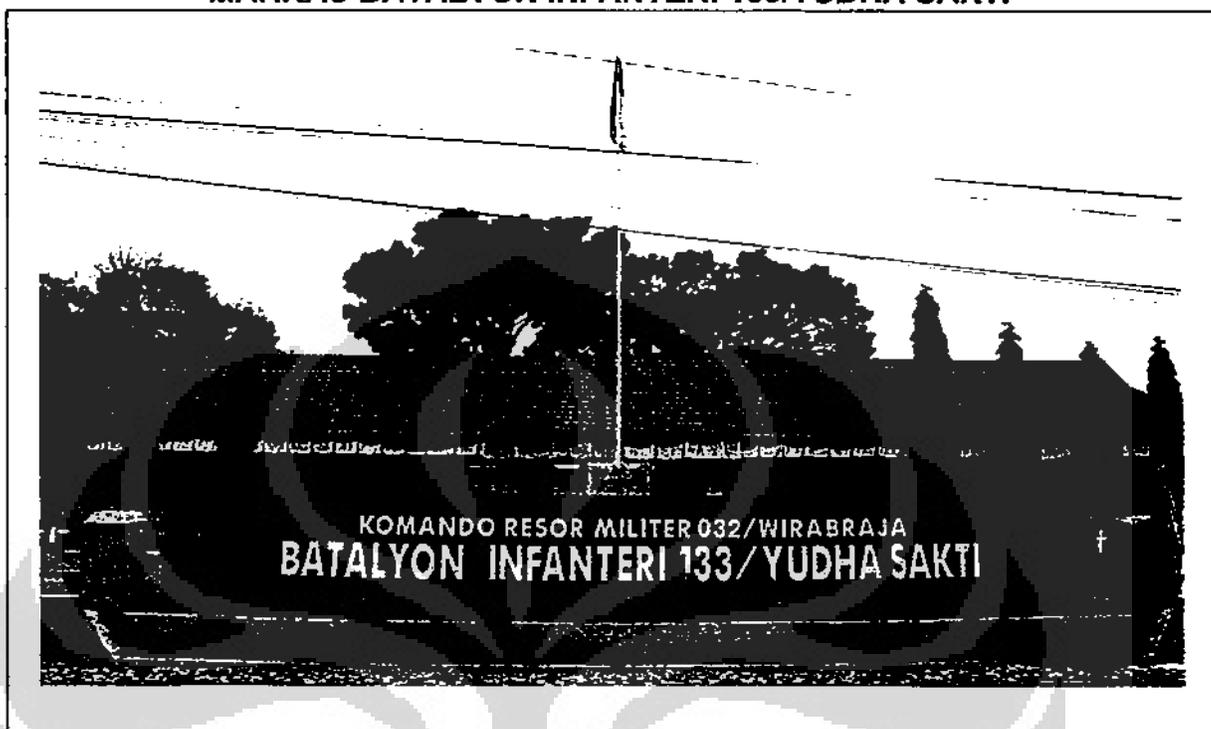
MARKAS KODIM 0319/MENTAWAI



MARKAS BATALYON INFANTERI 131/BRAJA SAKTI



MARKAS BATALYON INFANTERI 133/YUDHA SAKTI



**KUNJUNGAN KASAD PADA SAAT
BENCANA GEMPA BUMI TANGGAL 30 SEPTEMBER 2009**



SURAT KETERANGAN
Nomor : SK / 07 / X / 2010

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yondri Nova
Pangkat/Corps : Mayor Inf
Nrp : 546814
Jabatan : Kasdim 0308/Pariaman
Kesatuan : Kodim 0308/Pariaman

Menerangkan bahwa :

Nama : Adril
NPM : 0806448131
Program Studi : Magister Pengkajian Ketahanan Nasional Angkatan 27 TA.
2008 / 2009.

Adalah benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Satuan Kodim 0308/Pm Rem 032/Wbr pada tanggal 30 September 2010 s.d 08 Oktober 2010 untuk bahan penyusunan tesis pada Program Pascasarjana KSKN Universitas Indonesia dengan judul : **Peran TNI Dalam Penanggulangan Bencana Alam (Studi Kasus Peran Korem 032/Wbr dalam Penanggulangan Bencana Alam di Sumbar)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pariaman, 8 Oktober 2010



KOMANDO DAERAH MILITER I/BUKIT BARISAN
KOMANDO RESOR MILITER 032/WIRABRAJA

SURAT KETERANGAN
Nomor : SK / 06 / X / 2010

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mulyono
Pangkat/Korps : Kolonel Inf
NRP : 29593
Jabatan : Danrem 032/Wirabraja
Kesatuan : Korem 032/Wirabraja

Menerangkan bahwa :

Nama : Mayor Inf. Drs. Adril
NPM : 0806448131
Program Studi : Magister Pengkajian Ketahanan Nasional Angkatan
27 TA 2008/2009).

Adalah benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Satuan Korem 032/Wirabraja pada tanggal 27 Agustus 2010 s/d 1 Oktober 2010 untuk bahan penyusunan tesis pada Program Pascasarjana KSKN Universitas Indonesia dengan judul : ***Peran TNI Dalam Penanggulangan Bencana Alam (Studi Kasus Peran Korem 032/Wirabraja dalam Penanggulangan Bencana Alam di Sumbar)***.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

